

## KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat menyampaikan "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010".

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan dan tugas di Sub Sektor Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai Desember 2010, yang menyajikan berbagai informasi mengenai moda transportasi darat, yang meliputi bidang lalu lintas jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan dan keselamatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai lingkup kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi darat pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas untuk kemajuan transportasi dan kejayaan bangsa dan negara.

Jakarta,   Maret 2011

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
A. MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	I-1
C. VISI DAN MISI	I-2
D. RUANG LINGKUP	I-3
<b>BAB II KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF</b>	<b>II-1</b>
A. BIDANG PERENCANAAN	II-1
B. BIDANG KEUANGAN	II-11
C. BIDANG HUKUM	II-19
D. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UMUM	II-36
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010</b>	<b>III-1</b>
A. BIDANG PEMERINTAHAN	III-1
1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	III-1
2. DIREKTORAT LLAJ	III-11
3. DIREKTORAT LLASDP	III-29
4. DIREKTORAT BSTP	III-40
5. DIREKTORAT KTD	III-49
B. BIDANG PEMBANGUNAN	III-55
C. BANTUAN LUAR NEGERI	III-59
<b>BAB IV OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>IV-1</b>
A. LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	IV-1
1. Umum	IV-1
2. Perkembangan Prasarana LLAJ	IV-4
3. Perkembangan Sarana LLAJ	IV-12
4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan PPNS Bidang LLAJ	IV-13
5. Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-16
6. Permasalahan yang dihadapi	IV-17
7. Upaya yang dilakukan	IV-21

B.	LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN	IV-22
1.	Umum	IV-22
2.	Perkembangan Prasarana LLASDP	IV-23
3.	Perkembangan Sarana LLASDP	IV-32
4.	Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan	IV-34
5.	Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-37
6.	Permasalahan yang dihadapi	IV-39
7.	Upaya yang dilakukan	IV-40
C.	DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN	IV-40
1.	Umum	IV-40
2.	Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan	IV-47
3.	Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan	IV-54
4.	Kinerja Angkutan Perkotaan	IV-57
5.	Program Gasifikasi Kendaraan Umum Perkotaan	IV-57
6.	Kegiatan-kegiatan Strategis	IV-58
7.	Permasalahan yang dihadapi	IV-59
8.	Upaya yang dilakukan	IV-59
D.	DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	IV-60
1.	Umum	IV-60
2.	Data Kecelakaan Transportasi Jalan	IV-61
3.	Kegiatan Keselamatan Transportasi Jalan	IV-64
4.	Permasalahan yang dihadapi	IV-71
5.	Upaya yang dilakukan	IV-71
<b>BAB</b>	<b>V KINERJA UPT PERHUBUNGAN DARAT</b>	<b>V-1</b>
A.	UPT BLJSKB Bekasi	V-1
B.	UPT Penyeberangan	V-4
C.	KINERJA BUMN	V-18
<b>BAB</b>	<b>VI PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
A.	ANEV LEBARAN TAHUN 2010 (1431 H), NATAL TAHUN 2010 DAN TAHUN BARU 2011	
B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
C.	LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA TAHUN ANGGARAN 2010	

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2010	II-11
Tabel III-1	Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat TA. 2010	III-55
Tabel III-2	Progres APBN T.A 2010 per 31 Desember 2010 Sub Sektor Perhubungan Darat	III-55
Tabel III-3	Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ	III-56
Tabel III-4	Program dan Realisasi Pembangunan Bidang Perkotaan	III-56
Tabel III-5	Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP	III-58
Tabel IV-1	Kepadatan Penduduk	IV-1
Tabel IV-2	Aset Jalan Jembatan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Jumlah Penduduk/ Luas Wilayah	IV-4
Tabel IV-3	Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2010	IV-5
Tabel IV-4	Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2010	IV-7
Tabel IV-5	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Kuching untuk melayani trayek Kuching - Pontianak	IV-9
Tabel IV-6	Perusahaan Kendaraan Umum yang berdomisili di Pontianak untuk melayani trayek Pontianak-Kuching	IV-10
Tabel IV-7	Jumlah Terminal Tahun 2005-2010	IV-11
Tabel IV-8	Rekapitulasi Keputusan Dirjen Hubdat Tentang Pengesahan Dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun	IV-12
Tabel IV-9	Rekapitulasi Data Pelanggaran Di Jembatan Timbang Tahun 2010	IV-13
Tabel IV-10	Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2010	IV-13
Tabel IV-11	Jumlah Pelanggaran Perizinan, Operasional dan Persyaratan Teknis Laik Jalan Tahun 2010	IV-14
Tabel IV-12	Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2010	IV-15
Tabel IV-13	Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif Tahun 2005 - 2010	IV-16
Tabel IV-14	Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2010 berdasarkan domisili perusahaan angkutan AKAP	IV-16
Tabel IV-15	Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan	IV-24
Tabel IV-16	Lintas Penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan	IV-24
Tabel IV-17	Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota	IV-25

Tabel IV-18	Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan	IV-26
Tabel IV-19	Lintas Penyeberangan Komersil	IV-26
Tabel IV-20	Lintas Penyeberangan Bersubsidi	IV-28
Tabel IV-21	Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan	IV-30
Tabel IV-22	Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP	IV-31
Tabel IV-23	Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau	IV-31
Tabel IV-24	Jumlah Kapal SDP yang beroperasi	IV-32
Tabel IV-25	Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi berdasarkan Kepemilikan	IV-33
Tabel IV-26	Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005 - 2010	IV-33
Tabel IV-27	Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai	IV-33
Tabel IV-28	Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan	IV-34
Tabel IV-29	Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005-2010	IV-34
Tabel IV-30	Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil seluruh Lintas Tahun 2010	IV-34
Tabel IV-31	Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis seluruh Lintas Tahun 2010	IV-35
Tabel IV-32	Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-42
Tabel IV-33	Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek	IV-42
Tabel IV-34	Data Pelayanan Taksi di Kawasan Perkotaan	IV-43
Tabel IV-35	Data Angkutan Pemuat Moda antara Angkutan Jalan dengan Angkutan Udara	IV-44
Tabel IV-36	Data Prasarana Tahun 2010	IV-48
Tabel IV-37	Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL	IV-51
Tabel IV-38	Data Lalu Lintas Tahun 2010	IV-52
Tabel IV-39	Jumlah Angkutan Umum	IV-54
Tabel IV-40	Jumlah Pengadaan Bus Ukuran Sedang Non AC untuk Pemerintah Kota/Kab./Perguruan Tinggi	IV-56
Tabel IV-41	Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2006-2010	IV-61
Tabel IV-42	Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor berdasarkan tingkat kecelakaan Tahun 2006-2010	IV-62
Tabel IV-43	Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2006-2010	IV-62
Tabel IV-44	Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban Tahun 2006-2010	IV-63

Tabel IV-45	Korban Kecelakaan berdasar Usia Korban Tahun 2006-2010	IV-64
Tabel V-1	Rekapitulasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di BLJSKB Tahun 2006 - 2010	V-3
Tabel V-2	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	V-6
Tabel V-3	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010	V-7
Tabel V-4	Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	V-10
Tabel V-5	Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010	V-14
Tabel V-6	Kinerja PT. Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2005-2009	V-15
Tabel V-7	Kinerja Perum DAMRI Periode 2005-2009	V-17

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1. Maksud

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 disusun dengan maksud sebagai pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### 2. Tujuan

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 disusun dengan tujuan untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

### B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

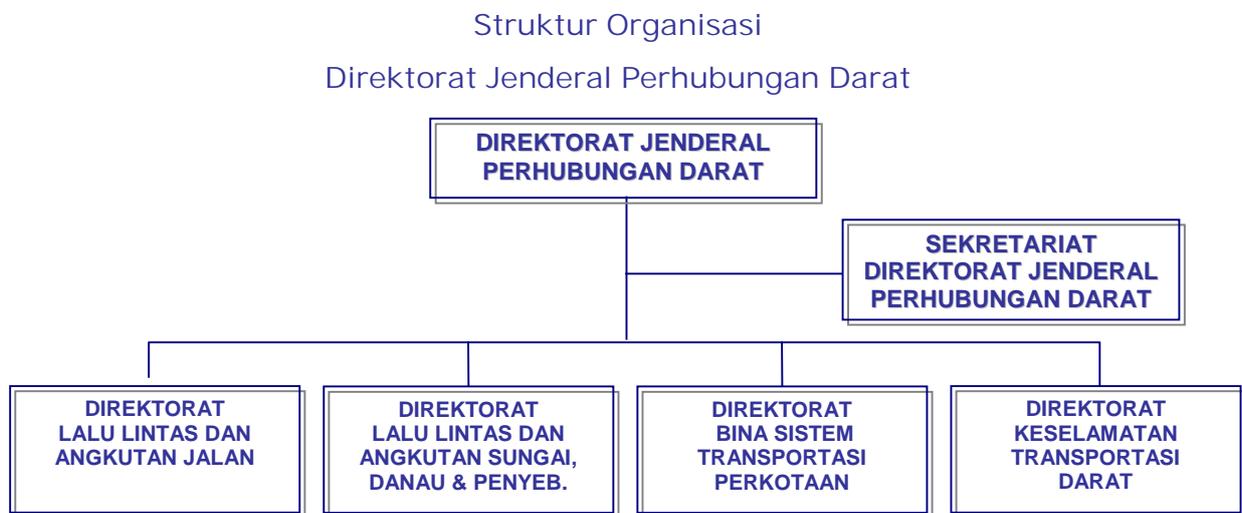
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, transportasi perkotaan serta keselamatan transportasi darat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Adapun Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :



### C. VISI DAN MISI

#### 1. Visi

“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan”

#### 2. Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
- b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan, perkotaan, keselamatan transportasi darat yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mendorong berkembangnya tata niaga dan industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

#### D. RUANG LINGKUP

Penyusunan buku ini mencakup pelaksanaan kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan

Kegiatan di bidang pemerintahan mencakup kegiatan non fisik yang bersifat rutin maupun kegiatan-kegiatan fisik, seperti : penyusunan juknis, kebijakan-kebijakan dan lain-lain.

2. Bidang Pembangunan

Kegiatan di bidang pembangunan mencakup kegiatan fisik, dimana pendanaannya baik rutin dan pembangunan dibiayai oleh APBN yang tersusun dalam Rencana Kerja Anggaran.

3. Bidang Operasional

Kegiatan di bidang operasional mencakup perencanaan teknis, fasilitas perlengkapan ataupun pendukung yang mana kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut pada pembinaan teknis.

## B A B II

### KEGIATAN PELAYANAN DAN ADMINISTRATIF

#### A. BIDANG PERENCANAAN

Berdasarkan proses perencanaan yang tertuang dalam Pedoman Perencanaan KM 31 Tahun 2006 di lingkungan Kementerian Perhubungan, di bidang Perencanaan telah dilakukan kegiatan tahun 2010, antara lain :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;  
Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari :
  - a. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik.
  - b. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana.
  - c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana.
  - d. Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana.
  - e. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan.
2. Penyusunan Rencana Strategis 2010-2014;  
Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan darat, yaitu:
  - a. Strategi Pembangunan Perhubungan Darat.
  - b. Strategi Pemulihan dan Penataan Penyelenggaraan Perhubungan Darat.
3. Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010;  
Dalam penetapan kinerja berdasarkan pada prioritas program transportasi darat tahun 2010 sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat.
  - b. Pemulihan kondisi pelayanan armada angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
  - c. Pembangunan perkotaan terutama di kota-kota besar diprioritaskan pada pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan keandalan angkutan umum.
  - d. Pelayanan Keperintisan LLAJ dan LLASDP.
  - e. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan SDP; rehabilitasi & pemeliharaan sarana & prasarana transportasi SDP, pengembangan

sarana SDP; serta penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan.

4. Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK Tahun 2011;  
Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat untuk tahun 2011.
5. Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2010;  
Melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi tugas pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta pepaduan jaringan transportasi darat tahun 2010.
6. Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010;  
Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah dan Luar Negeri (PHLN) pada tahun 2010 dengan total pagu sebesar Rp. 5.000.000.000,- terserap dengan realisasi 100%.
7. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010;  
LAKIP disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada tahun 2010, ada beberapa kegiatan yang belum dapat dinilai hasil kerjanya dikarenakan ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Menyusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010;  
Sebagai wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan bertujuan untuk evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
9. Penyusunan Data Statistik Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010;
  - a. Menyusun format struktur data dan informasi perhubungan darat.
  - b. Melakukan pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.
  - c. Melakukan updating data perhubungan darat.
  - d. Melakukan kompilasi data dan informasi.
  - e. Melakukan pemetaan data dan informasi kondisi dan perkembangan perhubungan darat.

- f. Melakukan editing dan pengelompokan data terhadap data yang sifatnya tahunan (time series).

10. Pengembangan Sistem Informasi;

- a. Melakukan pemeliharaan jaringan LAN Ditjen Perhubungan Darat secara bertahap.
- b. Melakukan Pengembangan Sistem Informasi melalui penyempurnaan tampilan website dan perbaikan konten serta pengembangan SIM kepegawaian khususnya pada Penguji Kendaraan Bermotor.
- c. Melakukan bantuan teknis dengan menampilkan sistem informasi Perhubungan Darat dalam bentuk yang interaktif dan informatif.
- d. Melakukan pengendalian operasional.
- e. Melakukan pengembangan data perhubungan darat pada profil perhubungan darat tahun 2010.

11. Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);

Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2010 sebanyak 10 Diktum dengan rincian sebagai berikut :

- a. Diktum Pertama tentang dorongan untuk melaporkan LHKPN, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
  - 1) Mendata jumlah PNS di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang wajib membuat LHKPN;
  - 2) Melakukan klasifikasi terhadap PNS yang sudah dan belum pernah membuat LHKPN;
  - 3) Penyampaian Formulir LHKPN kepada Pejabat yang bersangkutan; dan
  - 4) Pemantauan pengembalian Formulir LHKPN.
- b. Diktum Kedua tentang penetapan kinerja, kegiatan yang telah dilakukan yaitu menetapkan kinerja unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2009 kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat : UM.007/2/7/DJPD/2010 tanggal 12 Maret 2010 perihal LAKIP Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2009 dan LAKIP Setditjen Perhubungan Darat Tahun 2009; dan

- 2) Penyampaian Laporan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dengan Nomor Surat : UM.007/3/4/DJPD/2010 tanggal 2 Juni 2010 perihal Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja Setditjen Perhubungan Darat Tahun 2010.
- c. Diktum Ketiga tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan yang dilakukan yaitu menginventarisasi jenis pelayanan publik yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  - 2) Penetapan lulus tidaknya kendaraan uji, pengesahan dan sertifikat berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Pasal 21 ayat (1) bahwa Tipe Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji diberikan pengesahan dan sertifikasi uji tipe oleh Direktur Jenderal; dan
  - 3) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menerapkan standar Euro 2. Dengan sistem penguji ini kendaraan disimulasikan seakan bergerak dalam kondisi nyata, sesuai dengan kecepatan dan bobot kendaraan. Gas buang kendaraan ditampung dan dipisahkan antara partikel karbon monoksida (CO), senyawa hidrokarbon dan nitrogen oksida (HC+NOx) dengan partikel lain.
- d. Diktum Keempat tentang penetapan program dan wilayah bebas korupsi, kegiatan yang dilakukan adalah menetapkan Sub Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo sebagai wilayah bebas Korupsi.
- e. Diktum Kelima tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, kegiatan yang telah dilakukan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- 1) Mendata jumlah Pengelola Anggaran yang sudah/belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) Mendata jumlah Pengelola Anggaran yang habis masa berlaku sertifikatnya;

- 3) Menyelenggarakan bimbingan teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
  - 4) Monitoring pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - 5) Monitoring pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa melalui e-procurement;
- f. Diktum Keenam tentang kesederhanaan hidup, kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi tentang pola hidup sederhana dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
- 1) Memonitor pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - 2) Memonitor penggunaan pakaian batik pada setiap hari Jum'at di lingkungan Kantor Ditjen Perhubungan Darat;
  - 3) Himbauan kepada pegawai untuk menggunakan kendaraan umum atau kendaraan operasional kantor (jemputan) dalam melaksanakan tugas sehari-hari; dan
  - 4) Kegiatan penghematan pemakaian telepon, air dan listrik di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- g. Diktum Ketujuh tentang dukungan kepada penegak hukum yaitu dengan mendukung Sekretariat Jenderal dalam melakukan koordinasi dengan Penegak Hukum dan melakukan pendampingan untuk Bantuan Hukum di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
- h. Diktum Kedelapan tentang kerjasama dengan KPK tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi dimana kegiatan yang dilakukan adalah mendukung kebijakan organisasi dalam kerjasama dengan KPK dengan rincian uraian sebagai berikut :
- 1) Mengisi dan menyampaikan formulir PIAK beserta data dukungnya;
  - 2) Mengisi dan menyampaikan formulir Pelayanan Publik beserta data dukungnya; dan
  - 3) Penyiapan paket kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sampai dengan bulan Nopember 2010 jumlah kegiatan yang telah dilelangkan sebanyak 1.094 kegiatan dengan perincian bidang LLAJ sebanyak 765 paket dan bidang LLASDP sebanyak 329 paket, dari total keseluruhan kegiatan yang dilelangkan sebanyak 1200 kegiatan.
- i. Diktum Kesembilan tentang peningkatan, pengawasan dan pembinaan aparatur meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan Instruksi Dirjen tentang pencegahan perilaku koruptif dan melakukan monitoring atas perilaku koruptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan dikeluarkannya Instruksi Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3475/HK.403/DRJD/2007 tgl 12 September 2007 tentang Pencegahan Perilaku Koruptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) Pelaksanaan ESQ (Emotional Spiritual Quetient) Reguler Training bagi para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tanggal 25-26 November 2010. Kegiatan ini diharapkan bisa membentuk karakter pegawai untuk mengetahui jati dirinya, mengetahui Tuhannya, mengetahui orang tuanya menurut agamanya masing-masing sehingga bisa menjadi pegawai jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, adil, peduli dan visioner;
- 3) Mengedarkan Instruksi Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan KKN di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2010; Rakornis Ditjen Hubdat dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali pada tanggal 19 s.d 21 Oktober 2010 dan diikuti oleh 558 peserta yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kemenhub, Dishub Propinsi, Kabupaten/Kota, BUMN dan UPT dilingkungan Ditjen Hubdat.

Hasil Rumusan Rakornis Bidang Perhubungan Darat Tahun 2010 yang telah disepakati antara lain :

- a. Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2010 memiliki makna yang cukup strategis sebagai wahana koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pembangunan sektor perhubungan darat guna meningkatkan kemaslahatan masyarakat sejalan dengan implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. Tema rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat tahun 2010 yaitu "REVITALISASI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PEMAKAI JASA", mencerminkan sikap dan semangat bagi kita untuk senantiasa cerdas dan tanggap dalam melakukan pembenahan dan penyempurnaan, yang sejalan dengan modernisasi pembangunan di segala bidang, termasuk penyelenggaraan transportasi sebagai pendukung pembangunan nasional.

- c. Revitalisasi penyelenggaraan transportasi darat, yaitu transportasi angkutan jalan, dan transportasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diperlukan untuk memenuhi tuntutan paradigma baru dalam penyelenggaraan transportasi darat melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas institusi perhubungan, baik SDM maupun kelembagaannya yang bertumpu pada kinerja yang tinggi dan kemampuan manajerial yang memadai.
- d. Isu strategis yang meliputi upaya restrukturisasi kebijakan bidang hukum/legalitas, peningkatan keselamatan, upaya dalam menegakkan wibawa pemerintah, penataan dan peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan angkutan umum di perkotaan serta peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah sebagian dari sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian kita bersama untuk segera ditindak-lanjuti.
- e. Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengandung adanya suatu paradigma baru yang harus disertai dengan perubahan mind set, penyamaan persepsi dan interpretasi terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Dalam tataran implementasi Undang-Undang tersebut terdapat tantangan besar dan tugas-tugas penting yang akan dihadapi diantaranya adalah:
  - 1) Revitalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
    - a) Penyelenggaraan terminal penumpang yang baik mulai dari tataran perencanaan pembangunan sampai dengan penyelenggaraan operasionalnya seperti ketepatan dalam menentukan lokasi terminal dengan memperhatikan aksesibilitas, rehabilitasi terminal penumpang tipe A, peningkatan dan pemenuhan kompetensi petugas operasional terminal, setiap Ibukota provinsi mempunyai terminal penumpang tipe A, penyediaan prasarana terminal di lokasi transmigrasi atau perbatasan antar negara dalam satu kesatuan pola perencanaan.
    - b) Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mendorong bahwa PKB dilakukan secara terukur dalam pengertian menggunakan peralatan mekanis dan tenaga yang berkompeten, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, peningkatan kompetensi SDM penguji, partisipasi pihak swasta sebagai unit PKB berkala serta penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan PKB.

- c) Penyelenggaraan lalu lintas jalan yaitu mendorong pengadaan dan pembangunan perlengkapan jalan di jalan nasional dengan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas, melalui program DAK untuk jalan kabupaten/kota, peran unit Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagai salah satu unit kerja penanganan muatan lebih melalui akreditasi unit jembatan timbang serta pemanfaatan teknologi informasi.
- d) Penyelenggaraan angkutan jalan mulai dari proses perijinan yang berdasarkan demand, transparan, penerapan e-lisensi yang mengarah ke manajemen yang berlabel ISO 9001, penyelenggara angkutan umum adalah badan hukum bukan perorangan/individu, penyediaan sarana angkutan umum perintis pada lokasi-lokasi daerah tertinggal/terpencil, tanggung jawab pemerintah yaitu menjamin tersedianya angkutan umum massal kepada masyarakat yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- e) Mendorong mempercepat pembentukan forum LLAJ baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- f) Penyelenggaraan transportasi perkotaan :
  - i. Terintegrasinya Perencanaan Transportasi Perkotaan dengan Perencanaan Tata Guna Lahan;
  - ii. Penyusunan Pola Transportasi Perkotaan yang memprioritaskan pengembangan angkutan umum massal;
  - iii. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Umum diperkotaan dan angkutan umum massal berbasis jalan termasuk sarana dan prasarananya;
  - iv. Integrasi pelayanan angkutan umum di perkotaan (KA, Bus, Bandara, Pelabuhan);
  - v. Pembangunan dan pengaturan parkir serta fasilitas park and ride;
- g) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian :
  - i. Dilaksanakan di terminal dan jembatan timbang.
  - ii. Untuk penindakan pelanggaran di jalan harus didampingi petugas Polri.
- h) Pengembangan sumber daya manusia;
  - i. Mendorong ke Pemda untuk melakukan perekrutan tenaga terdidik yang dihasilkan oleh STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat), Sekolah Tinggi ASDP dan D2 PKB Kementerian Perhubungan.

- ii. Peningkatan anggaran untuk workshop, lokakarya, pertemuan teknis yang terkait di bidang LLAJ.
  - iii. Pemberian sanksi dan penghargaan (reward dan punishment) untuk petugas pelaksana kegiatan.
- i) Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Integrasi sistem informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi informasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun daerah.
  - ii. Pengembangan VMS dan CCTV untuk melakukan monitoring lalu lintas dan informasi kepada masyarakat tentang kondisi lalu lintas.
  - iii. Pemasangan GPS dan Smart Card untuk memantau posisi kedatangan dan keberangkatan bus.
  - iv. Pemanfaatan jejaring sosial untuk pengaduan dan informasi kepada masyarakat.
- 2) Revitalisasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Perkembangan angkutan penyeberangan berkembang sangat pesat dalam 15 tahun terakhir. Pola pembangunan infrastruktur yang relatif murah, terintegrasi dengan jaringan jalan raya dan kereta api, pelayanan yang reguler dengan frekuensi yang tetap, upaya subsidi yang berkesinambungan dan menjangkau wilayah yang relatif terpencil menjadikan keunggulan ini dirasakan secara signifikan oleh masyarakat pengguna. Peran strategis ini perlu dipertahankan mengingat penyeberangan merupakan jembatan bergerak bagi moda transportasi darat lainnya. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan bidang LLASDP maka terdapat beberapa perubahan yang merupakan isu-isu strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang, antara lain:

- a) Jaringan Transportasi Penyeberangan;
- b) Otoritas Pelabuhan Laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c) Alur-pelayaran sungai;
- d) NCVS (Non Convention Vessel Standard);
- e) Potensi Angkutan Sungai;
- f) Perlindungan Lingkungan Maritim; dan
- g) Sistem Informasi Pelayaran;

### 3) Keselamatan Transportasi Darat

Dalam upaya menurunkan tingkat kecelakaan untuk mewujudkan Road Map to Zero Accident mutlak diperlukan koordinasi antar instansi dalam suatu forum koordinasi yang nantinya berfungsi mengkoordinasikan semua hal yang terkait dengan keselamatan transportasi dengan semua unit kerja terkait.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ) dan Rencana Umum Keselamatan LLAJ perlu mendapat perhatian dari seluruh peserta Rakornis untuk melihat secara perspektif terhadap hal-hal yang secara bersama-sama perlu untuk dipersiapkan dan dilakukan.

### 4) Pengembangan Kompetensi SDM Perhubungan Darat.

Pengembangan kompetensi SDM Perhubungan Darat sangat mutlak diperlukan peningkatan mengingat bahwa saat ini kondisi SDM Perhubungan Darat masih jauh dari harapan, di bawah ini yang merupakan gambaran umum SDM tersebut yaitu :

- a) Belum ditetapkannya jenis dan standart kompetensi yang dibutuhkan di sub sektor perhubungan darat.
- b) Terbatasnya tenaga teknis yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.
- c) Mutasi pejabat dan tenaga teknis yang terlalu cepat, sedang pejabat pengganti umumnya tidak memiliki pengetahuan di bidang perhubungan darat.
- d) Tenaga teknis transportasi darat cenderung terkonsentrasi di pulau Jawa.
- e) Kesenjangan kualitas aparatur pusat dan daerah.

Strategi percepatan peningkatan kualitas SDM dengan beberapa langkah, yaitu :

- a) Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Seminar.
  - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas diklat terpusat maupun di setiap propinsi.
  - c) In house training di 50 kabupaten/kota dan konsultasi man power planning daerah.
  - d) Kerjasama dengan lembaga pendidikan (UI, UGM, ITB dsb).
- f. Usulan program pembangunan yang disampaikan ke Perhubungan Darat dalam rangka meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta peningkatan keselamatan dari Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) seringkali tidak

mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan yaitu KM.31 tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan.

- g. Di bidang hukum, 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari 12 (dua belas) RPP yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ telah selesai melalui proses pembahasan antar kementerian dan saat ini telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Ketiga RPP tersebut adalah :
- 1) RPP Forum LLAJ.
  - 2) RPP Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - 3) RPP Kendaraan.
- h. Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pembentukan Posko Terpadu Angkutan Lebaran tahun 2010/1431 H yang berlangsung dari H-7 hingga H+7, dimana penyelenggaraannya cukup sukses jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini menunjukkan bahwa kita semakin dapat meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan sebagai salah satu wujud daripada semangat Undang-undang nomor 22 tahun 2009.

## B. BIDANG KEUANGAN

### 1. Pelaksanaan Anggaran

#### a. Pagu Anggaran dan Realisasi Versi SAI

Dana Anggaran Belanja tahun 2010 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar Rp. 1.838.442.619.000,- yang terdiri dari RM Rp. 1.833.442.619.000,- dan PLN Rp. 5.000.000.000,- Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.720.361.328.000,- yang terdiri dari RM Rp. 1.719.597.385.000,-, dan PLN Rp. 763.942.400,-. Selanjutnya untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel II.1 :

Tabel II.1  
Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2010

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
DIPA Reguler		
1 Rincian Sumber Dana		
a RM	Rp. 1.833.442.619.000,-	Rp. 1.720.361.328.000,-
b PLN	Rp. 5.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000,-
2 Rincian Belanja		
a Belanja Pegawai	Rp. 34.966.237.000,-	Rp. 28.521.114.464,-
b Belanja Barang	Rp. 299.220.853.000,-	Rp. 267.747.091.778,-
c Belanja Modal	Rp. 1.499.255.529.000,-	Rp. 1.424.093.121.958,-
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)		
DIPA PNBP TA. 2009		
1 UPT BPLJSKB	Rp. 5.500.000.000,-	Rp. 5.376.552.004,-
2 UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangu	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 2.453.513.956,-
3 UPT Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	Rp. 85.000.000,-	Rp. 67.281.269,-
4 UPT Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	Rp. 25.000.000,-	Rp. 19.134.973,-

Sumber : Bagian Keuangan Ditjen Hubdat, 2010

b. Kegiatan yang tidak Terserap T.A 2010

Total Sisa Anggaran yang tidak terserap pada T.A 2010 yaitu Rp. 118.081.290.800,- yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.445.122.536,- yang terdiri dari :

- a) Transito Kantor Pusat Ditjen Hubdat Rp. 1.769.145.000,-
- b) Sisa gaji dan lembur Ditjen Hubdat Rp. 4.675.977.536,-

2) Belanja Barang sebesar Rp. 31.473.761.222,- yang terdiri dari :

- a) Sisa Kontrak Subsidi Perintis SDP Rp. 19.845.152.525,-
- b) Sisa Kontrak Subsidi Bus Perintis LLAJ Rp. 2.204.038.102,-
- c) Pakaian Dinas Pegawai Rp. 76.650.000,-
- d) Sisa Belanja Barang Lainnya Rp. 22.125.840.627,-
- e) Sisa Belanja Barang Lainnya Rp. 9.347.920.595,-

3) Belanja Modal sebesar Rp. 80.162.407.042,- yang terdiri dari :

- a) Pembangunan Dermaga Penyeberangan P. Sapeken Kab. Sumenep Tahap I Rp. 4.000.000.000,-
- b) Pembangunan Shelter di Jabotabek Rp. 1.000.000.000,-
- c) T.A IBRD Road Safety Awareness 3843/INO SRIP Rp. 4.236.057.000,-
- d) Pembangunan Gedung Arsip Rp. 5.000.000.000,-
- e) Pembangunan Jembatan Timbang di Cekik Bali Rp. 3.000.000.000,-

f) Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB di Propinsi NAD dan Kalimantan Tengah	Rp.	1.707.000.000,-
g) Pembangunan Gedung Operasional	Rp.	1.703.016.000,-
h) Pengadaan Alat Laboratorium	Rp.	476.800.000,-
i) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp.	25.000.000,-
j) Studi LLASDP	Rp.	100.000.000,-
k) Sisa Kontrak Strategis	Rp.	47.482.667.000,-
l) Sisa Kontrak Non Strategis	Rp.	11.431.867.000,-
4) Pinjaman Luar Negeri Sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri dari :		
a) Satker Peningkat. Keselamat. Trans.Darat	Rp.	5.000.000.000,-

## 2. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

Dalam rangka penatausahaan barang inventaris milik negara, telah dilaksanakan kegiatan Pencatatan Atas Laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

### a. Ringkasan Laporan Barang

#### 1) Tanah

Saldo Tanah pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 495.331.713.669,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 530.522.908.607,- mutasi tambah Rp. 20.8944.759.659,- dan mutasi kurang Rp. 56.085.954.597,-.

#### 2) Peralatan dan Mesin

Saldo BMN berupa Peralatan dan Mesin Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 639.170.501.108,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 631.710.902.631,- mutasi tambah Rp. 553.574.151.159,- dan mutasi kurang Rp. 546.114.552.682,-

#### 3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 635.729.175.943,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 459.362.437.859,- dan mutasi tambah Rp. 233.802.294.128,- dan mutasi kurang Rp. 57.435.556.044,-

4) Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 654.201.366.133,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 415.308.983.675,- mutasi tambah Rp. 309.041.549.398,- dan mutasi kurang Rp. 70.149.166.940,-

5) Irigasi

Saldo Irigasi pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 80.641.147.469,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 28.412.064.969,- mutasi tambah Rp. 118.679.866.000,- dan mutasi kurang Rp. 66.450.783.500,-.

6) Jaringan

Saldo Jaringan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.119.202.713,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 372.174.713,- mutasi tambah Rp. 747.028.000,-.

7) Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 39.448.514.849,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 26.574.020.249,- mutasi tambah Rp. 12.874.494.600,-.

8) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan

Saldo aset tetap yang tidak digunakan pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 13.361.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 0,- mutasi tambah Rp. 13.361.000,-.

b. Informasi Tambahan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal 31 Desember 2010 pada Ditjen Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 2.490.235.054.938,-.

2) Persediaan

Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp. 72.500,-

3) Informasi Lainnya

a) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang masih dalam proses pengerjaan atau dalam proses serah terima hasil pekerjaan, sehingga belum dikatakan sebagai aset definitif yang tercatat dalam SABMN.

Pengakuan aset konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset definitif apabila telah terjadi proses serah terima hasil pekerjaan dari kontraktor kepada KPA setempat.

Pada pekerjaan T.A 2010 serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan pada tahun 2010, sehingga pada laporan BMN T.A 2010 hasil pekerjaan tersebut belum termasuk dalam aset definitif. Baru pada tahun 2010. (setelah dilakukan serah terima hasil pekerjaan), hasil pekerjaan tersebut akan tercatat sebagai aset definitif pada mutasi tambah berupa penyelesaian pembangunan.

b) Persediaan

Persediaan yang dimaksud disini adalah berupa perlengkapan habis pakai yang digunakan dalam rangka menunjang pekerjaan administratif Ditjen Perhubungan Darat. Kebanyakan persediaan akan habis (saldo 0) pada akhir periode pelaporan. Persediaan yang tercatat pada laporan BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 72.500,-.

c. Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan pada tahun 2010 untuk pekerjaan T.A 2009, adalah sebagai berikut :

1) Program LLAJ terdapat 15 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :

- a) Satker Pengembangan LLAJ Riau
- b) Satker Pengembangan LLAJ Jambi
- c) Satker Pengembangan LLAJ Bengkulu
- d) Satker Pengembangan LLAJ Lampung
- e) Satker Pengembangan LLAJ Banten
- f) Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Perkotaan
- g) Satker Peningkatan Pembinaan Transportasi Darat
- h) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat
- i) Satker Pengembangan LLAJ Nusa Tenggara Barat
- j) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Barat
- k) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Tengah
- l) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan
- m) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Selatan
- n) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Barat
- o) Satker Pengembangan LLAJ Papua
- p) Satker Pengadaan Sarana Angkutan Perkotaan

2) Program LLASDP terdapat 24 Satker yang telah melakukan serah terima sebagai berikut :

- a) Satker Pengembangan LLASDP Nanggroe Aceh Darussalam
- b) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Utara
- c) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Barat
- d) Satker Pengembangan LLASDP Riau
- e) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Selatan
- f) Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu
- g) Satker Pengembangan LLASDP Lampung
- h) Satker Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi SDP
- i) Satker Perencanaan Teknik dan Pengawasan Transportasi SDP
- j) Satker Pengembangan Sarana transportasi SDP
- k) Satker Penunjang Keperintisan
- l) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Barat
- m) Satker Pengembangan LLASDP Jawa Tengah
- n) Satker Pengembangan LLASDP Bali
- o) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Barat
- p) Satker Pengembangan LLASDP Nusa Tenggara Timur
- q) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Barat
- r) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Selatan
- s) Satker Pengembangan LLASDP Kalimantan Timur
- t) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara
- u) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Selatan
- v) Satker Pengembangan LLASDP Maluku
- w) Satker Pengembangan LLASDP Papua
- x) Satker Pengembangan LLASDP Papua Barat
- y) BRR NAD - NIAS

### 3. Verifikasi Anggaran

a. Melaksanakan monitoring dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan anggaran, Usulan calon pengelola anggaran dan proses tindak lanjut LHA, TP/TGR yang dilakukan oleh instansi/ Badan Pemeriksa/ Pengawas Keuangan Negara, secara rinci meliputi kegiatan:

- 1) Menyiapkan Rencana Jaringan Kerja (Network Planning), Bagan Balok (Barchart) dan Kurva S, Sub. Sektor Transportasi Darat;

- 2) Meneliti dan mengevaluasi Usulan Calon Pengelola Anggaran di lingkungan Sub. Sektor Transportasi Darat meliputi : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran;
  - 3) Meneliti dan memverifikasi serta mengevaluasi data dukung tindak lanjut Laporan Hasil Audit Badan/Instansi Pemeriksa dan menyiapkan surat kepada KPA Satker baik Surat Teguran maupun pengembalian Indikasi Kerugian Negara (TGR);
  - 4) Meneliti/memverifikasi dan mengevaluasi Surat Sanggahan Banding maupun Surat Pengaduan dari Peserta Lelang/LSM.
- b. Pembahasan Usulan Calon Pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2010
- 1) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja (SATKER) meliputi:
    - a) Program LLAJ 40 Satuan Kerja;
    - b) Program LLASDP 37 Satuan Kerja.
  - 2) Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima/pengeluaran UPT meliputi:
    - a) Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
    - b) UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
      - i. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
      - ii. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
      - iii. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo;
      - iv. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan
- 1) ITJEN :
 

Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2010 sebanyak 220 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 970.353.895,96

Dari 220 temuan tersebut, telah tuntas sebanyak 57 temuan dan telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 627.231.832,- sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 38 temuan dengan rincian sebagai berikut :

    - a) Satker Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan (1 temuan);
    - b) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2 temuan);

- c) Satker Pengembangan LLAJ Sulawesi Tengah (3 temuan);
- d) Satker Pengembangan LLAJ Papua (4 temuan);
- e) Satker Pengembangan LLASDP Bengkulu (2 temuan);
- f) BPLJSKB Bekasi (2 temuan);
- g) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah (7 temuan);
- h) Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi (2 temuan);
- i) Pelabuhan Penyeberangan Kariangau (5 temuan);
- j) Satker Pengembangan LLAJ Maluku Utara (2 temuan);
- k) Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Timur (2 temuan);
- l) Satker Pengembangan LLASDP Sumatera Selatan (1 temuan);
- m) Satker Pengembangan LLAJ Gorontalo (5 temuan).

Laporan Hasil Audit (LHA) yang belum ditindaklanjuti sebanyak 125 temuan dan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 337.468.672,16,- dari 27 Satker, hal ini disebabkan belum adanya tanggapan dari satker yang bersangkutan.

## 2) BPK- RI

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan tahun 2010 sebanyak 13 temuan dan 20 saran. LHA yang telah dinyatakan selesai sebanyak 15 LHA dan masih dalam status pantau 5 LHA dengan rincian sebagai berikut :

- a) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara (1 temuan dan 1 saran);
- b) Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan Transportasi Jalan (1 temuan dan 1 saran);
- c) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Utara (2 temuan dan 3 saran);
- d) Satker Standarisasi Perencanaan Jaringan Transportasi Jalan (5 temuan dan 10 saran);
- e) Satker Pengembangan Sarana Transportasi SDP (4 temuan dan 5 saran).

Jumlah TGR yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 3.811.114.186,- dan telah disetorkan sebesar Rp. 511.279.314,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 3.299.834.871,-

## 3) BPKP

Di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan tahun 2010 terdapat Temuan Hasil Pengawasan BPKP terdapat 10 temuan pada Satker Standarisasi

Perencanaan Jaringan dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan nilai Rp. 2.167.852.344,04,- .Dari nilai tersebut sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 1.362.370.096,37,- sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 805.482.247,67,- yang belum disetorkan.

- d. Surat Sanggahan Banding dari Peserta Lelang/LSM Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 (tujuh) surat, meliputi :
- 1) Satker Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo;
  - 2) Satker Pengembangan LLASDP Riau;
  - 3) Satker Pengembangan LLAJ Gorontalo;
  - 4) Satker Pengembangan LLAJ Jawa Barat;
  - 5) Satker Pengembangan LLAJ Riau;
  - 6) Satker Pengembangan Fasilitas LLAJ;
  - 7) Satker Pengembangan LLASDP Sulawesi Tenggara.

## C. BIDANG HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

### 1. Bidang Hukum

Pada Tahun 2010 untuk Peraturan Perundang-Undangan di Sub Sektor Perhubungan Darat yang telah ditetapkan, meliputi :

a. Peraturan Pemerintah :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

b. Peraturan Menteri Perhubungan :

- 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.231 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431H);
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 71 Tahun 2010 Tentang Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- 4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2010 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2010;
- 7) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelabuhan Tanjung Api-api di Provinsi Sumatera Selatan – Pelabuhan Tanjung Kelian di Bangka Belitung Sebagai Lintas Batas Penyeberangan;
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 213 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelabuhan Lintas Penyeberangan Dabo di Provinsi Kepulauan Riau – Pelabuhan Kuala Tungkal di Provinsi Jambi serta Kampung Balak di Provinsi Riau – Tanjung Balai Karimun di Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lintas Penyeberangan;
- 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 265 Tahun 2010 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Singkil di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam – Pelabuhan Gunung Sitoli di Provinsi Sumatera Utara Sebagai Lintas Penyeberangan;
- 10) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 370 Tahun 2010 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Wahai di Provinsi Maluku – Waigama di Provinsi Papua Barat Sebagai Pelabuhan Laut Untuk Angkutan Penyeberangan.

c. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

- 1) Peraturan Dirjen Nomor : SK. 2752/HK.003/DRJD/2010 Tentang Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan serta pemberian peringatan atau petunjuk pada jalan tol JORR WI Ruas Kebun Jeruk-Penjaringan;
- 2) Instruksi Dirjen Nomor: SK. 4320/KU.006/DRJD/2010 Tentang Perlakuan (Treatment) akuntansi terhadap hasil pekerjaan belanja modal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) Peraturan Dirjen Nomor : SK. 4159/HK.005/DRJD/2010 Tentang Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada jalan tol Jakarta-Merak;
- 4) Keputusan Dirjen Nomor : SK. 3747/KP.801/DRJD/2010 Tentang Tim monitoring Angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- 5) Peraturan Dirjen Nomor : AJ. 402/42/12/DRJD/2010 Tentang Bantuan teknis pengadaan peralatan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah/Kota;
- 6) Keputusan Dirjen tentang perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor : SK. 1401/A.402/DJPD/2010 Tentang Penetapan percetakan buku uji dan tanah uji berkala kendaraan bermotor
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan darat Nomor : SK. 1401/AJ. 402/DJPD/2010 Tentang Penetapan percetakan buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
- 8) Keputusan Dirjen No. SK. 1729/AJ.402/DJPD/2010 Tentang penetapan percetakan buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor;
- 9) Keputusan Dirjen No. SK. 2511/AJ/405/DJPD/2010 Tentang penetapan percetakan stiker tanda samping kendaraan bermotor;
- 10) Keputusan Dirjen No. SK 1423/AJ.402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor buku uji dan tanda uni kendaraan bermotor;
- 11) Keputusan Dirjen No. SK 1336/AJ.402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor stiker tanda samping kendaraan bermotor;
- 12) Keputusan Dirjen No. SK 1337/AJ. 402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor
- 13) Keputusan Dirjen No. SK. 1304/AJ. 402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- 14) Keputusan Dirjen No. SK. 1303/AJ. 402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- 15) Keputusan Dirjen No. SK. 1107/AJ. 402/DJPD/2010 Tentang Rekomendasi distributor buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- 16) Keputusan Dirjen Nomor : SK.242/HK.0104/DRJD/2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.

Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan (berkelanjutan) :

a. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
  - (a) RPP tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - (b) RPP tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan;
  - (c) RPP tentang Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor Di Jalan;

- (d) RPP tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ;
  - (e) RPP tentang Jaringan LLAJ;
  - (f) RPP tentang Dampak Lingkungan LLAJ;
  - (g) RPP tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - (h) RPP tentang Kendaraan;
  - (i) RPP tentang Diklat Pengemudi;
  - (j) RPP tentang Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ;
  - (k) RPP tentang Angkutan;
  - (l) RPP tentang Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- 2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :
- (a) RPM tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor;
  - (b) RPM tentang Terminal;
  - (c) RPM tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - (d) RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
  - (e) RPM tentang Angkutan Massal;
  - (f) RPM tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - (g) RPM tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
  - (h) RPM tentang Tarif Penumpang;
  - (i) RPM tentang Rambu Lalu Lintas;
  - (j) RPM tentang Marka.
- 3) Rancangan Peraturan Dirjen berdasarkan peraturan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1992 maupun Peraturan Menteri yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 antara lain :
- (a) RPD tentang Angkutan Taxi Bandara;
  - (b) RPD tentang Angkutan Barang Berbahaya;
  - (c) RPD tentang Kendaraan Listrik di Jalan.

- b. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan  
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai pelaksana UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sedangkan untuk

penyusunan Peraturan pemerintah sudah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah maka perlu disusun Peraturan Menteri dan peraturan Dirjen antara lain :

1). Rancangan Peraturan Menteri :

- (a) RPM Tentang Alur Pelayaran dan Lalu lintas Sungai dan Danau;
- (b) RPM Tentang Pelabuhan yang di gunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

2). Rancangan Peraturan Dirjen : RPD tentang Angkutan Penyeberangan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Sedangkan Revisi Peraturan Pemerintah dibidang LLASDP yang telah ditetapkan Pada tahun 2010 yaitu Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim.

Sedangkan RPP Bidang LLAJ direncanakan yang akan disusun 12 RPP sebagaimana tersebut diatas untuk posisi masing-masing RPP antara lain :

Tabel II.2  
Posisi Rancangan Peraturan Pemerintah  
Sebagai Pelaksanaan UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

No.	JUDUL RPP	POSISI	KETERANGAN
1.	RPP Forum LLAJ	Pembahasan Harmonisasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	Direncanakan dibahas pada Bulan Januari 2011
2.	RPP Pemeriksaan dan Penindakan Kendaraan Bermotor dijalan	idem	idem
3.	RPP Kendaraan	idem	idem
4.	RPP Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pembahasan Antar Kementerian	menunggu masukan dari kementerian terkait dan direncanakan dibahas pada Bulan Januari 2011
5.	RPP Jaringan LLAJ	Pembahasan Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ)	Dalam pembahasan secara rutin
6.	RPP Dampak Lingkungan LLAJ	idem	idem
7.	RPP Keamanan dan Keselamatan LLAJ	idem	idem
8.	RPP Angkutan	idem	idem
9.	RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ	idem	idem

10.	RPP Pembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ	Kelompok Kerja (5 Instansi Pembina LLAJ)	Dipending menunggu pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM terkait materi yang akan diatur
11.	RPP Diklat Pengemudi	Kepolisian.	Menunggu Draft dari Kepolisian sebagai penanggung jawab materi RPP
12.	RPP Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana LLAJ	Kementerian Perindustrian	Menunggu Draft dari Kementerian Perindustrian sebagai penanggung jawab materi RPP

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2010



Gambar II.1  
Pembahasan RPP LLAJ antar  
Kementerian



Gambar II.2  
Pembahasan RPP LLAJ antar 5  
Instansi Pembina LLAJ

Untuk penelaahan Peraturan Perundang-undangan di bidang Transportasi Darat, Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan verifikasi PERDA dan Raperda yang berkaitan dengan Ditjen Perhubungan Darat dari seluruh Indonesia dimana kegiatannya berkelanjutan.

a. Pelaksanaan dokumentasi dan bantuan hukum.

Bagian Hukum juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pertimbangan hukum, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut :

a. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 antara lain :

- 1) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dibidang LLAJ dan LLASDP;
- 2) Pemberian bantuan hukum dalam perkara :
  - a) Perkara Perdata No.1675/Pid.B/2006/PN. Sby (Kasus Tanah di Jalan Basuki Ramat No. 78 Surabaya);
  - b) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak;

- c) Perkara Perdata No. 26/Pdt.6/2001/PN.AB (kasus pelabuhan penyeberangan Hunimua Ambon);
  - d) Perkara Perdata No. 11/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara perdata dalam kasus Tabung Gas BBG Steve Sugita);
  - e) Perkara Perdata No. 27/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara Airbag Suzuki Grand Vitara);
- 3) Pemberian pertimbangan hukum
- Pertimbangan hukum diberikan dalam rangka permasalahan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas surat-surat sanggahan, pengaduan masyarakat, ataupun permasalahan teknis lainnya yang memerlukan tanggapan dan jawaban yang memerlukan dukungan pertimbangan dan kajian dari sisi legal atau peraturan perundangan yang berlaku, seperti Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama, dsb.
- b. Kegiatan yang sedang dilaksanakan (berkelanjutan)
- Pemberiaan bantuan hukum :
- 1) Perkara Perdata No.1675/Pid.B/2006/PN. Sby (Kasus Tanah di Jalan Basuki Ramat No. 78 Surabaya), Posisi masih dalam proses kasasi di Makamah Agung;
  - 2) Kasus antara PT. ASDP (persero) sekarang Ferry Indonesia dengan PT. Infiniti Indosakti terkait dengan dermaga IV Merak, Pemerintah menunggu proses penyelesaiannya antara PT. ASDP dengan PT. Infiniti;
  - 3) Perkara Perdata No. 26/Pdt.6/2001/PN.AB (kasus pelabuhan penyeberangan Hunimua Ambon), mengingat pada tahun 2006 diselenggarakan anggaran ganti rugi yang ganti ruginya disediakan oleh Pemerintah Pusat dan pelaksanaannya Pemerintah Daerah ternyata tidak dapat melaksanakan ganti rugi karena tidak jelas Ahli Waris, maka anggaran kembali ke Pemerintah dan sampai saat ini masih menunggu penyelesaian daerah;
  - 4) Perkara Perdata No. 11/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara perdata dalam kasus Steve Sugita), kelanjutan proses Kasasi di Makamah Agung masih berjalan dan menunggu putusan Kasasi;
  - 5) Perkara Perdata No. 27/Pdt.6/2007/PN Jaksel (Perkara Airbag Suzuki Grand Vitara), kelanjutan proses Banding di Pengadilan Tinggi masih berjalan dan menunggu Putusan Banding;

6) Pembahasan Kontrak Memori Kasasi Atas Perkara Nomor :  
354/PDT.G/2008/PT.DKI.

Kegiatan pemberian pertimbangan hukum yang telah dilakukan selama tahun 2010 antara lain dalam pembahasan :

- 1) Kasus Klarifikasi Terhadap Asuransi Tambahan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Putra 15 maret 2010;
- 2) Kasus LLASDP Pemanggilan Saksi, 5 Januari 2010;
- 3) Kasus Klarifikasi Terhadap Pungutan Liar di Jembatan Timbang yang dikelola oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sumatera Utara, 21 Juni 2010;
- 4) Kasus Iplementasi UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Kasus PPD mengenai pengaduan masyarakat. 9 Maret 2010;
- 6) Sanggah Banding Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengaduan dan Pemasangan Marka Jalan, 21 April 2010;
- 7) Pemberitahuan adanya Permohonan Sita Jaminan Pelabuhan Ferry Kariangau Balik Papan, 29 Oktober 2010;
- 8) Kasus Tindakan Asusila a/n Indra Jony, 19 Nopember 2010;
- 9) Pengaduan masyarakat Sukodono Medan tentang Oknum Dinas Perhubungan Sumatera Utara;
- 10) Permohonan Sidang Pembahasan UKL-UPL Pelabuhan Penyeberangan Marisa, 6 Nopember 2010;
- 11) Sanggah Banding terhadap Hasil Pelelangan Ulang Pengembangan Sistem Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahap I 4 Mei 2010;
- 12) Kasus Dit. BSTP mengenai Konfirmasi Kasus 19 Juli 2010;
- 13) Sanggah Banding/pengaduan proses lelang paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan – Satker Tahun 2010, 19 Maret 2010;
- 14) Sanggah Banding Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kampung Balak Tahap IV, 11 Maret 2010;
- 15) Sanggah Banding Satker LLAJ Jawa Barat Pebruari 2010;
- 16) Sanggah Banding tidak diterima Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Marisa Tahap IV;

- 17) Sanggah Banding tidak diterima Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kampung Balak Tahap IV, 21 April 2010;
- 18) Sanggah Banding tidak diterima Pekerjaan pengadaan dan pemasangan Marka Jalan 30 April 2010;
- 19) Sanggah Banding tidak diterima Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan, 22 April 2010;
- 20) Sanggah Banding tidak diterima Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail, 21 Mei 2010;
- 21) Sanggah Banding Tidak diterima Pekerjaan Sistem Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahap I. 21 Mei 2010;
- 22) Sanggah Banding tidak diterima pekerjaan Marka Jalan sepanjang 100.000 M 21 Juni 2010.

Hambatan yang dialami oleh bagian hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum maupun penyusunan peraturan masih perlu dukungan peningkatan kualitas SDM dan koordinasi dalam melakukan penanganan kasus-kasus yang ada dilingkungan Ditjen Hubdat, serta dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan penelaahan peraturan perundangan di mana memerlukan kecermatan, ketelitian serta kemampuan dalam penguasaan penerapan peraturan perundangan dalam penyelesaian permasalahan hukum tersebut. Upaya yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu perlunya peningkatan potensi SDM melalui Diklat/kursus di bidang bantuan hukum, bidang penyusunan maupun kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang Hukum secara berkelanjutan.

b. Data kesepakatan bersama di bidang transportasi darat :

Data Perjanjian, MoU, antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 :

Tabel II.3  
Kesepakatan Bersama Ditjen Perhubungan Darat dengan Instansi Terkait

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
1	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bogor	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bogor	Bogor, 3 Oktober 2005	5 Tahun
2	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal	Kemenhub dan Pemkab Malang, Pemkot Malang dan Pemkot Batu	Jakarta, 24 Maret 2006	5 Tahun

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
	Berbasis Jalan di Malang Raya			
3	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Bandung	Ditjen Hubdat dan Pemkot Bandung	Bandung, 7 Juli 2005	5 Tahun
4	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Yogyakarta	Ditjen Hubdat dan Pemkot Yogyakarta	Yogyakarta, 13 Desember 2005	36 Bulan
5	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal di Kota Pekanbaru	Kemenhub dan Pemkot Pekanbaru	Pekanbaru, 9 Maret 2007	5 Tahun
6	Perencanaan, Pembangunan, Pengoperasian dan Pendanaan Transportasi Perkotaan di Kota Batam, Propinsi Riau Kepulauan sebagai Kota Percontohan	Ditjen Hubdat dan Pemkot Batam	Jakarta, 27 Agustus 2004	5 Tahun
7	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surakarta	Kemenhub dan Pemkot Surakarta	Surakarta, 11 Desember 2006	48 Bulan
8	Pengembangan Transportasi Perkotaan di Propinsi DI Yogyakarta	Kemenhub, Pemprop DIY dan Universitas Gajah Mada	Yogyakarta, 21 Agustus 2007	5 Tahun
9	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Makasar	Kemenhub dan Pemkot Makasar	Makasar, 14 Agustus 2007	5 Tahun
10	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Pontianak	Kemenhub dan Pemkot Pontianak	Jakarta, 12 Februari 2008	5 Tahun
11	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Surabaya	Kemenhub dan Pemkot Surabaya	Surabaya, 7 Juli 2006	5 Tahun
12	Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan	Ditjen Hubdat dan Kepolisian Negara	Jakarta, 26 Juli 2007	-

No	Kesepakatan Bersama	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus	RI		
13	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Semarang	Kemenhub dan Pemkot Semarang	Jakarta, 31 Juli 2008	5 tahun
14	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Gorontalo	Kemenhub dan Pemkot Gorontalo	Jakarta, 23 Juni 2009	5 tahun
15	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Padang	Kemenhub dan Pemkot Padang	Jakarta, 23 Juni 2009	5 tahun
16	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Manado	Kemenhub dan Pemkot Manado	Jakarta, 1 Juli 2009	5 tahun
17	Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan di Kota Palembang	Kemenhub dan Pemkot Palembang	Jakarta, 4 Desember 2009	5 tahun
18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat di Kawasan Transmigrasi	Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jakarta, 22 September 2010	

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2010

## 2. Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri

Kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri merupakan bidang tugas Sub Bagian Humas dan Kerjasama Luar Negeri. Beberapa kegiatan Humas dan Kerjasama Luar Negeri yang telah dilaksanakan tahun 2010 yang berhubungan dengan kegiatan Peliputan dan Dokumentasi antar lain kegiatan Dokumentasi, jumpa pers/siaran pers, pameran/visualisasi, langganan koran untuk keperluan klipring dan penerbitan news letter Info Hundat.

Sesuai dengan Tupoksi, Kegiatan Kerjasama Luar Negeri antara lain mengikuti rapat koordinasi penyiapan materi dalam rangka pertemuan kerjasama luar negeri, memberikan saran dan usulan delegasi yang akan menghadiri pertemuan,

menghimpun dan menelaah hasil kegiatan kerjasama luar negeri untuk keperluan tindaklanjut hasil pertemuan, melakukan koordinasi dengan unit kerja maupun instansi terkait dalam rangka menyusun materi pertemuan atau tanggapan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat termasuk perjanjian-perjanjian bilateral, regional maupun multilateral, serta kegiatan lain dalam rangka mendukung kegiatan kerjasama luar negeri.

Program pertemuan dalam rangka kerjasama luar negeri yang berkaitan dengan sub sektor transportasi darat selama tahun 2010 meliputi pertemuan bilateral, sub regional, regional dan multilateral. Kegiatan-kegiatan kerjasama tersebut ada yang dihadiri oleh wakil Ditjen Perhubungan Darat dan ada pula yang tidak dihadiri. Kehadiran wakil sub sektor perhubungan darat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta urgensinya. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang berlanjut dan terprogram setiap tahunnya dan juga kegiatan yang sifatnya insidental seperti workshop/ seminar/pelatihan yang merupakan hasil dari proyek kerjasama regional ataupun multilateral dan partnership lainnya.

Beberapa kegiatan bidang KSLN telah dilaksanakan/dihadiri oleh wakil Ditjen Hubdat pada tahun 2010, baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu :

Tabel II.4  
Kegiatan Kerjasama Luar Negeri pada Tahun 2010

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
1	Workshop "Implementing United Nations Legal Instruments: toward improving road safety in developing countries"	New Delhi, India 21-22 Januari 2010	Dit. LLAJ Dit. KTD
2	J-IEPA Workshop Sub WG 2 Workshop for Testing Engineers	Tokyo, Jepang. 18-30 Januari 2010	BPLJSKB Dit. LLAJ
3	ITSAP PRG Meeting	Sydney, Australia 17-19 Februari 2010	Dit. KTD Setditjen
4	The 18th ASEAN Land Transport Working	Phnom Penh	Dit. LLAJ
5	Group (LTWG 18th)	Cambodia 20-21 September 2010	Dit. KTD Setditjen
6	Regional Expert Group on Implementation of Decade of Action for Road Safety, 2011-2020	Bangkok, Thailand 21-23 September 2010	Dit. KTD Setditjen
7	The 7th BIMP-EAGA Transport, Infrastructure and ICT Development (TIICTD)	Balikpapan, Indonesia 7-8 Juli 2010	Dit. LLAJ Dit. BSTP Setditjen
8	The 29 <sup>th</sup> ASEAN Senior Transport Official Meeting (STOM)	Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam 1-3 Juni 2010	Dit. BSTP Dit. KTD Setditjen

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
9	The 17 <sup>th</sup> ASEAN Land Transport Working Group Meeting	Siem Reap, Cambodia 6-8 April 2010	Dit. KTD Dit LLAJ
10	The 8 <sup>th</sup> Forum on the Operationalisation of ASEAN Transport Facilitation Agreements 20 <sup>th</sup> ASEAN Transport Facilitation Working Group (TFWG) Meeting the 2 <sup>nd</sup> Meeting of the ASEAN Transport Transit Coordinating Board (TTCB)	Cebu City, Filipina 11-15 Oktober 2010	Dit. LLAJ Setditjen
11	The UN-ECE/WP29 High Level Meetings in Europe	Paris, Perancis Geneve, Swiss 3-8 Oktober 2010	Dirjen Hubdat Direktur LLAJ Kepala BPLJKSB
12	Future Leader Programme part of Kaohsiung Share/Transport Conference	Taiwan 13-19 September 2010	Dit. BSTP
13	The first WG Meeting on the Implementation of the Strategic Plan for China-ASEAN Transport Cooperation	Guangzhou, Cina 1-3 September 2010	Dit. LLAJ
14	The 2 <sup>nd</sup> STOM Experts Group Meeting	Jakarta, Indonesia 19-20 Agustus 2010	Setditjen
15	The 2 <sup>nd</sup> Meeting of the Joint Ministerial Commission on Bilateral Cooperation Between RI and PNG	Jakarta, Indonesia 3-4 Agustus 2010	Setditjen
16	The 3 <sup>rd</sup> Annual Global Infrastructure Projects	Kuala Lumpur, Malaysia 26-27 Juli 2010	Dit. BSTP
17	Pertemuan UNESCAP di Bali	Bali, Indonesia 15-16 Juli 2010	Dit. LLAJ
18	The 3 <sup>rd</sup> High Level Task Force on ASEAN Connectivity	Bangkok, Thailand 11-12 Juli 2010	Dit. LLAJ Setditjen
19	World Urban Transport Leaders Summit 2010	Singapura 30 Juni - 1 Juli 2010	Dit. BSTP
20	IMT-GT Special Consultation Meeting	Penang, Malaysia 28 Juni - 1 Juli 2010	Dit. LLASDP Setditjen
21	The 11 <sup>th</sup> ACCSQ Automotive Product Working Group Meeting	NayPyi Taw, Myanmar 24-26 Mei 2010	BPLJSKB Dit. LLAJ
22	Sidang Komisi ke 66 UN-ESCAP Senior Official Segment	Incheon, Republik Korea 13-15 Mei 2010	Dit. KTD Dit. LLAJ Setditjen
23	Joint Task Force RI-ROK ke -2	Seoul, Korea Selatan 25-26 Maret 2010	Dit. LLAJ
24	APEC Automotive Dialogue ke 12	Sapporo, Jepang 17-20 Mei 2010	Dit. LLAJ BPLJSKB
25	The 8 <sup>th</sup> ASEAN-Japan STOM Leaders Conference	Nara City, Jepang 17-19 Mei 2010	Dit. LLAJ Dit. KTD Setditjen
26	The 10 <sup>th</sup> JCM RI-RRT	Yogyakarta, Indonesia 2-3 April 2010	Direktur LLAJ Setditjen
27	The Richard J. Daley Global Cities Forum	Chicago, USA 27-29 April 2010	Direktur BSTP Dit. BSTP

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
28	The 19 <sup>th</sup> ASEAN Transport Facilitation Working Group	Boracay Island, Filipina 17-19 Maret 2010	Dit. LLAJ Setditjen
29	First STOM Experts Group Meeting	Jakarta, Indonesia 9-10 Februari 2010	Setditjen
30	The 6 <sup>th</sup> ASEAN-Japan Expert Group Meeting on Logistics	Bangkok, Thailand 9-10 Februari 2010	Dit. LLAJ
31	The first WG Meeting on the Implementation of the Strategic Plan for China-ASEAN Transport Cooperation	Guangzhou, China 1-3 September 2010	Dit. LLAJ
32	Expert Group Meeting on Preventing Motorcycle Injuries in Children	Bangkok, Thailand 21-23 Desember 2010	Dit. KTD Dit. KTD Dit. LLAJ Setditjen
33	The 30 <sup>th</sup> ASEAN Senior Transport Official Meeting (STOM) & The 16 <sup>th</sup> ASEAN Transport Minister (ATM)	Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam 8-12 Desember 2010	Dit. LLAJ Setditjen
34	Studi Lapangan ke Hongkong, China	Hongkong, China 11-18 Desember 2010	Dit. BSTP
35	Studi Lapangan ke Kota Wuhan/Shenzen, China	Wuhan/Shenzen, China 11-18 Desember 2010	Dit. LLAJ Setditjen Dit. BSTP
36	Studi Lapangan ke Kota Guangzhou, China	Guangzhou, China 11-18 Desember 2010	Dit. BSTP
37	PRC-ADB Knowledge-sharing Platform High Level Regional Workshop on Transport Infrastructure: An Instrument for Economic and Social Development	Beijing, China 8-11 November 2010	Dit. LLASDP Setditjen
38	Notifikasi United Nations Climate Change Conference	Cancun, Mexico 5-10 Desember 2010	Setditjen
39	BIMP-EAGA Special Meeting on the Implementation of the MoU on Transit and Interstate Transport of Goods and the MoU on Cross Border Movement of Buses and Coaches	Kinabalu, Malaysia 1-2 Desember 2010	Dit. LLAJ
40	The UN-ECE/WP29 High Level Meetings	Tokyo, Jepang 30 November - 3 Desember 2010	Dirjen Direktur LLAJ Dit. LLAJ BPLJSKB
41	BAQ Conference	Singapura 8-12 November 2010	Dit. BSTP
42	The 12 <sup>th</sup> ACCSQ-Automotive Product Working Group	Manila, Filipina 10-12 November 2010	Dit. LLAJ BPLJSKB Setditjen
43	Persidangan ke-28 KK/JKK Sosek Malindo	Johor Bahru, Malaysia 8-12 November 2010	Setditjen
44	The 5 <sup>th</sup> Session of the Euro-Asian Transport Links Expert Group Meeting	Tashkent, Uzbekistan 1-3 November 2010	Ditjen Hubdat Dit. LLAJ Setditjen

No	Kegiatan	Tempat/Waktu	Wakil Hubdat
45	BAQ 2010 Conference & Pre-event 1-day Learning session on Financing Sustainable Urban Transport	Singapura 8-11 November 2010	Sesditjen
46	Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration	Jepang 23-30 Oktober 2010	Dit. BSTP
47	GRSP Asia Road Safety Seminar	Siem Reap, Kamboja 3-5 November 2010	Dit. KTD Dit. LLAJ Dit. KTD
48	Pelatihan di Japan Automobile Research Institute (JARI)	Jepang 1-12 November 2010	BPLJSKB
49	The 33 <sup>rd</sup> APEC Transportation Working Group Meeting	Tokyo, Jepang 11-14 Oktober 2010	Dit. LLAJ Dit. KTD Dit. BSTP
50	The 8 <sup>th</sup> Forum on the Operationalisation of ASEAN Transport Facilitation Agreements 20 <sup>th</sup> ASEAN Transport Facilitation Working Group Meeting and the 2 <sup>nd</sup> Meeting of the ASEAN Transport Transit Coordinating Board (TTCB)	Cebu, Filipina 11-15 Oktober 2010	Dit. LLAJ Setditjen
51	Regional Workshop On Intelligent Transportation System	Tokyo, Jepang 8 – 10 Maret 2010	Dit. BSTP
52	17 <sup>th</sup> World Congress On ITS	Busan, Korea Selatan 24 – 30 Oktober 2010	Dit. BSTP

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2010

Kegiatan KSLN tahun 2010 yang tidak dapat dihadiri oleh wakil Ditjen Hubdat :

- a. Notifikasi United Nations Climate Change Conference di Cancun, Meksiko 5-10 Desember 2010.
- b. Pertemuan UNESCAP 1-3 November 2010 di Bangkok, Thailand.
- c. The 1<sup>st</sup> ASEAN-ROK Transport Cooperation Forum 30 September-1 Oktober 2010 di Jeju, Korea.

Proyek kegiatan yang dihasilkan berdasarkan program kerjasama luar negeri :

- a. Dari kerjasama RI – Australia dibawah program ITSAP dihasilkan Basic Road Safety Management Project yang terdiri dari 4 paket kegiatan yaitu :
  - 1) Paket 1, undangan 4 (empat) orang Indonesia untuk menghadiri Seminar di Canberra dan Sidney.
  - 2) Paket 2, koordinasi mengenai problem keselamatan di Indonesia oleh The Counten For Accident Research and Road Safety Queensland and (Carrs-Q) Australia.
  - 3) Paket 3, dan Paket 4, Workshop On Basic Road Safety Management, yang diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang peserta dari Dishub Propinsi DKI,

Dishub Kota Bogor, Bandung dan Sukabumi, POLRI serta Dinas Pekerjaan Umum Prop. DKI dan Kob/Kota Bandung, Bogor dan Sukabumi.

- b. Dari kegiatan kerjasama ASEAN-Japan, dihadirkan program ASEAN – Japan Transport Logistic Workshop yang dilaksanakan 15 Desember 2010 di Jakarta, dibiayai oleh Pemerintah Jepang (MLIT) yang diikuti oleh peserta dari Stakeholder yang terkait dengan bidang logistic di Indonesia dan Jepang.

Data Perjanjian, MoU, Arrangement, Delaration yang terkait dengan sub sector transportasi darat secara bilateral, regional maupun multilateral sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2010 :

Tabel II.5  
Kerjasama Bilateral, Regional dan Multilateral Perhubungan Darat

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
1	Agreement on the Recognition of Domestic Driving Licenses Issued by ASEAN Countries	Negara Anggota ASEAN	Kuala Lumpur, Malaysia 9 Juli 1985	-	Ratifikasi
2	Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Service Vehicle Issued by ASEAN Member Countries	Negara Anggota ASEAN	Singapura, 10 September 1998	-	Ratifikasi
3	ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (AFAFGIT)	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 16 Desember 1998	-	Ratifikasi
4	Protocol 3 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
5	Protocol 4 AFAFGIT, Types and Quantity of Road Vehicle	Negara Anggota ASEAN	Hanoi, Vietnam 15 September 1999	-	Ratifikasi
6	Protocol 9 AFAFGIT, Dangerous Goods	Negara Anggota ASEAN	Jakarta, Indonesia 20 September 2002	-	Ratifikasi
7	ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 7 November 2005	-	Proses Ratifikasi
8	ASEAN Tourism Agreement	Negara Anggota ASEAN	Phnompenh, Cambodia 4 November 2002	-	Ratifikasi
9	MoU Between The Government of The Member of Association of South –East Asian	Negara Anggota ASEAN dan China	Vientien, Lao PDR, 27 November 2004	-	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
	Nations and The Government of China on Transport Cooperation				
10	ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response	Negara Anggota ASEAN	Vientien, Lao PDR 26 Juli 2005	-	Ratifikasi
11	Intergovernmental Agreement on Asian Highway Network ( UN-ESCAP)	Negara Anggota ESCAP	Shanghai, China 4 Juli 2005	-	Proses Ratifikasi
12	Busan Declaration on Transport Development in Asia and the Pacific	Negara Anggota ESCAP	Busan, Korea, 11 November 2006	-	-
13	Protocol 1 AFAGIT, Designation of Transit Transport Roads and Facilities	Negara Anggota ASEAN	Bangkok, Thailand 8 February 2007	-	-
14	Memorandum of Understanding Between the Governments of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philippines on Cross Border Movement of Commercial Buses and Coaches	Negara Anggota BIMP-EAGA	Singapore, 2 November 2007	-	-
15	ASEAN Framework Agreement on Interstate Transit Transport	Negara Anggota ASEAN	2008	-	-
16	Memorandum of Understanding Between The Government of Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and Philipines on Transit and Inter-stateTransport of Goods	Negara Anggota BIMP-EAGA	Manado, Indonesia, 25 Juni 2009	-	-
17	Arrangement Between The Minister of Finance of The Government of Indonesia and The Minister of Economy, Industry and Employment of The Government of France Relating To The Bandung Integrated Transport Network Planning Study	Indonesia-Perancis	Jakarta, 15 Juli 2009	31 Desember 2011	
18	Implementation Arrangement (on Integrated Public Transportation Masterplan for Bandung Metropolitan Area)	Ditjen Perhubungan Darat dan SNCF Perancis	Jakarta, Nopember 2009	-	-

No	Agreement / MoU	Para Pihak	Ditandatangani	Masa Berlaku	Ket.
19	Moscow Declaration (on Global Road Safety)	UN	Moscow, Rep. Federasi Rusia 20 November 2009	-	-
20	Bangkok Declaration on Transport Development in Asia	Negara Anggota ESCAP	Bangkok, Thailand 18 Desember 2009	-	-
21	Memorandum Of Cooperation Between The Ministry of Transportasi of The Ministry of Land, Infrastructure and Tourism of Japan in The Transport Sector	Indonesia - Jepang	Bali, 3 Desember 2010		
22	Arrangement Between The Ministry Of Transportation of The Republic Of Indonesia and The Ministry of Infratructure and Transport Of Australia on The Indonesia Transport Safety Assistance Package	Indonesia – Australia	Jakarta, 15 Desember 2010		

Sumber : Bagian Hukum Ditjen Hubdat, 2010

#### D. KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Dalam pelaksanaan program kerja di bidang Kepegawaian dan Umum telah dilakukan langkah-langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui keikutsertaan pegawai pada diklat-diklat teknis.

Pengembangan SDM melalui diklat-diklat teknis guna meningkatkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan unit kerja dimana pegawai ditempatkan tersebut diatas, tidak hanya yang diselenggarakan oleh unit kerja dilingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi juga yang dilaksanakan oleh institusi lainnya baik lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah maupun swasta yang terkait dengan substansi perhubungan darat.

##### 1. Data Pegawai Ditjen Perhubungan Darat

Pegawai Ditjen Perhubungan Darat posisi tahun 2010 diklasifikasikan menurut unit kerja, golongan, pendidikan umum, jenis kelamin masing-masing sebanyak 628 pegawai, dimana yang sudah mengikuti diklat penjenjangan struktural sebanyak 126

pegawai dan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 94 pegawai. Untuk perinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.6  
Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Setditjen	339	153	140	137	140	140
2.	Direktorat LLAJ	109	105	99	98	105	129
3.	Direktorat LLASDP	132	94	85	78	78	95
4.	Direktorat BSTP	99	64	62	63	66	83
5.	Direktorat KTD	70	55	56	57	59	57
6.	UPT. BPLJSKB Bekasi	49	53	49	43	44	56
7.	UPT. Pelabuhan Penyeberangan	72	63	64	57	63	56
8.	DAMRI	32	30	18	15	14	11
9.	Dishub/Tugas Perbantuan Daerah (D-III ALL/LLASDP)	85	81	62	29	6	1
Jumlah		987	698	635	577	575	628

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Tabel II.7  
Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Golongan IV	66	52	48	53	49	50
2.	Golongan III	647	488	454	404	399	419
3.	Golongan II	274	157	132	119	126	158
4.	Golongan I	0	1	1	1	1	1
Jumlah		987	698	635	577	575	628

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Tabel II.8  
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Doktoral/S3	-	-	1	1	1	1
2.	Pasca Sarjana/S2	81	62	74	83	85	95
3.	Spesialis	3	3	3	3	4	4
4.	Sarjana/S1	196	171	176	154	175	197

No.	Pendidikan Terakhir	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5.	Diploma IV	33	25	44	33	21	28
6.	Diploma III/Sarjana Muda	201	146	73	66	70	105
7.	Diploma I/II	17	12	11	8	8	17
8.	SMU	428	258	237	214	196	175
9.	SLTP	15	14	9	9	9	4
10.	SD	13	7	7	6	6	2
Jumlah		987	698	635	577	575	628

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Tabel II.9  
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Perempuan	195	153	131	125	122	156
2.	Pria	792	545	504	452	453	472
Jumlah		987	698	635	577	575	628

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Tabel II.10  
Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Diklat Penjurangan Struktural	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Lemhanas	3	2	2	1	1	-
2.	Sepati/Dikpim I	3	3	1	2	2	1
3.	Sespa/Spamen/Dikpim II	11	12	15	17	19	16
4.	Sepadya/Spama/Dikpim III	79	82	49	48	52	49
5.	Sepala/Adum/Dikpim IV	75	81	47	62	65	60
Jumlah		171	180	114	130	139	126

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Tabel II.11  
Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Eselonering	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Eselon I	1	1	1	1	1	1
2.	Eselon II	5	5	5	5	5	5

3.	Eselon III	24	24	24	24	24	24
4.	Eselon IV	60	60	60	60	60	60
5.	Eselon V	4	4	4	4	4	4
Jumlah		94	94	94	94	94	94

Sumber : Bagian Kepegawaian Ditjen Hubdat, 2010

Dari data diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir perubahan komposisi formasi pegawai relatif tidak banyak perubahan, terutama dari segi jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan mulai berimbangny jumlah mutasi pegawai (pensiun, pindah unit kerja, termasuk tugas perbantuan daerah) dengan pengadaan pegawai baru di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

## 2. Posisi Pelaksanaan Tugas

### a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi

#### 1) Realisasi Kepangkatan PNS

Dalam periode April sampai dengan Oktober 2010 terdapat formasi kenaikan pangkat (KP) sebanyak 135 pegawai, dengan rincian :

- a). Kenaikan Pangkat Reguler : 105 pegawai
- b). Kenaikan Pangkat Pilihan : 19 pegawai
- c). Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah : 11 pegawai

#### 2) Pensiun Pegawai

Dalam tahun anggaran 2010, jumlah pensiun pegawai sebanyak 31 orang, dengan rincian :

- a). Golongan IV : 9 pegawai
- b). Golongan III : 19 pegawai
- c). Golongan II : 3 pegawai

Sedangkan pegawai yang meninggal dunia tidak ada pada tahun anggaran 2010.

#### 3) Pemberian Tanda Penghargaan

Dalam upaya pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun anggaran 2010, telah diberikan tanda penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada 46 pegawai dengan rincian :

- a). Satyalancana Wira Karya : - pegawai

- b). Satyalancana Karya Satya 30 tahun : 29 pegawai
- c). Satyalancana Karya Satya 20 tahun : 9 pegawai
- d). Satyalancana Karya Satya 10 tahun : - pegawai

Tanda penghargaan dimaksud merupakan wujud penghargaan Pemerintah atas pengabdian PNS dalam melaksanakan tugasnya.

#### 4) Diklat Teknis Fungsional

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2010 dilakukan penyiapan daftar pegawai yang harus mengikuti diklat teknis fungsional dan realisasinya telah dikirim 370 pegawai untuk mengikuti diklat teknis fungsional yang diselenggarakan oleh unit pelaksana diklat baik dilingkungan Badan Diklat Perhubungan maupun instansi/kementerian lainnya, dengan rincian :

- a). Diklat Kepemimpinan : 9 pegawai
- b). Diklat Luar Negeri : 2 pegawai
- c). Diklat Dalam Negeri : 359 pegawai

Selain hal tersebut diatas, sepanjang tahun 2010 juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam pembinaan kepegawaian dan tata kelola organisasi yang baik, yang meliputi :

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.
- 2) Penataan nomenklatur jabatan teknis dan penyempurnaan uraian jabatan/pekerjaan Ditjen Hubdat.
- 3) Monitoring UPT dan Eks UPT Ditjen Hubdat
- 4) Penyelenggaraan pengadaan CPNS.
- 5) Penyertaan Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional dan Short Courses baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun diluar Kementerian Perhubungan.
- 6) Pembekalan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- 7) Penyelenggaraan pembekalan pensiun bagi pegawai yang akan memasuki masa purnabhakti.
- 8) Penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur perhubungan bidang lalu lintas.
- 9) Peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 10) Peningkatan mental dan spiritual pegawai dengan metode ESQ In House Training.
- 11) Peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- 12) Sosialisasi Administrasi Kepegawaian.
- 13) Memproses Pengangkatan Jabatan fungsional, Mutasi, Promosi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai.
- 14) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif Pegawai Ditjen Perhubungan Darat.

b. Bidang Ketatausahaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2010 di bidang ketatausahaan meliputi :

- 1) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU),
- 2) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai,
- 3) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai,
- 4) Penyempurnaan dan up dating data kepegawaian,
- 5) Penataan dan pemeliharaan arsip,
- 6) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA),
- 7) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat,
- 8) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan,
- 9) Melakukan kunjungan/studi banding kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia,
- 10) Melakukan kunjungan/studi banding kearsipan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Semarang,
- 11) Sosialisasi ketatausahaan di UPT Pelabuhan penyeberangan Kariangau,
- 12) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
- 13) Sosialisasi ketatausahaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.

c. Bidang Rumah Tangga

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2010 di bidang kerumah tanggaan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal, meliputi :

- 1) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi ; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester.
- 2) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga.
- 3) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai.
- 4) Pengadaan obat-obatan dan peralatan medis pada poliklinik.
- 5) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, mesin penghitung uang, meja rapat, LCD proyektor, AC split, alat penghancur kertas, komputer, alat komunikasi, handycam, alat perekam suara, kamera saku, camera digital, mesin ketik elektronik, printer, meja dan kursi staf, kursi sofa dan kursi kerja pimpinan dan alat penyimpanan arsip.
- 6) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system.
- 7) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4.
- 8) Perbaikan barang inventaris kantor.
- 9) Pengaturan pemakaian ruang rapat.
- 10) Pemeliharaan dan perawatan gedung seperti ruang rapat Gedung Karsa Lt. 3, ruang poliklinik, ruang pantry, ruang Dit. LLAJ, Dit.KTD, Dit.BSTP, pemasangan karpet dan folding door Dit.BSTP.
- 11) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6.
- 12) Pelayanan urusan dalam lainnya.

B A B III  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2010

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan berorientasi pada tugas-tugas pokok dibidang pemerintahan yang meliputi pekerjaan non fisik (baik pekerjaan rutin maupun yang bersifat peraturan perundang-undangan/kebijakan), baik yang didanai oleh DIPA. Program kerja pada bidang pemerintahan disusun sesuai dengan bagian dan sub direktorat masing-masing yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

a. Bagian Perencanaan

Bagian perencanaan berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005 memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan, penelaahan dan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, penyusunan sistem informasi serta pemaduan sistem transportasi darat serta penyusunan anggaran dan Laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) penyiapan bahan pemaduan jaringan transportasi darat;
- 3) penyiapan bahan pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5) penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Program kegiatan pada Bagian Perencanaan dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

### 1) Sub Bagian Rencana dan Program

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Ditjen Hubdat serta pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang transportasi darat, antara lain :

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- b) Pembinaan Program dan Rencana Kerja Perhubungan Darat.
- c) Penyusunan standar, petunjuk/kebijakan teknis, pedoman dan kajian teknis di bidang Perhubungan Darat.
- d) Penyusunan RKA-KL, DIPA, PO dan LK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.
- e) Penyusunan Revisi RPJM dan RPJP.
- f) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (RAN-PK).
- g) Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Darat.
- h) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2010.

### 2) Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja, meliputi :

- a) Integritas perencanaan, pelaksanaan rencana dan evaluasi.
- b) Memantau, mengevaluasi, menyusun evaluasi pelaksanaan kinerja.
- c) Pemantauan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri.
- d) Penyusunan LAKIP Ditjen Perhubungan Darat.

### 3) Sub Bagian Sistem Informasi dan Pelaporan

Pada Sub bagian ini dijadwalkan kegiatan yang bertitik tolak pada penyiapan bahan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang transportasi darat serta penyusunan Ditjen Hubdat, meliputi :

- a) Pengembangan dan konsolidasi Sistem Informasi melalui pengembangan dan pembangunan sistem.
- b) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Darat.
- c) Penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka.

- d) Penyusunan Pengembangan Profil Perhubungan Darat.
- e) Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan LAN dan Website.
- f) Penyiapan bahan Draft RPP Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- g) Pemutakhiran data dan informasi Transportasi Darat.

Disamping kegiatan yang telah dijadwalkan pada masing-masing sub bagian, terdapat juga kegiatan yang melibatkan ketiga sub bagian tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010.

#### b. Bagian Keuangan

Berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005, Bagian Keuangan memiliki tugas pokok yaitu Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 2) pelaksanaan perbendaharaan anggaran direktorat jenderal dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara (BMKN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) pelaksanaan verifikasi anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2010, bagian keuangan telah menjadwalkan beberapa substansi kegiatan yang sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain :

##### 1) Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran

Pada Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Sub Sektor Perhubungan Darat, yang dimulai dari penyiapan bahan penyusunan anggaran bersama Bagian Perencanaan, penyiapan bahan penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan/ Indeks Harga (HSPK) bersama Biro Keuangan, monitoring dan pembinaan Laporan Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran, Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon I (UAPPA-E1), yang secara rinci meliputi :

- a) Monitoring dan melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Anggaran pada Satker/UPT serta PNPB di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat;
- b) Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 dan melaksanakan Rekonsiliasi/ Konsolidasi Laporan Keuangan dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Perhubungan setiap triwulan, semester dan tahunan;
- c) Melaksanakan Proses Revisi DIPA dan POK yang ada di lingkungan Sub Sektor Perhubungan Darat.

## 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan BMN

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Urusan Tata Keuangan Ditjen Hubdat dan Administrasi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Sub Sektor Perhubungan Darat, yang meliputi :

- a) Melakukan pencatatan pembukuan meliputi semua penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin serta menyusun laporan bulanan Keuangan Rutin Ditjen Hubdat.
- b) Melaksanakan administrasi pengelolaan barang BMN dilingkungan Ditjen Hubdat.
- c) Memproses penghapusan barang-barang Inventaris dilingkungan kantor pusat Ditjen Hubdat.
- d) Menyiapkan administrasi Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- e) Memproses penyertaan modal Negara ke BUMN di lingkungan Ditjen Hubdat.

## 3) Sub Bagian Verifikasi Anggaran

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada Realisasi pelaksanaan Anggaran; Usulan calon pengelola Anggaran (KPA dan Bendahara); dan juga Monitoring tindak lanjut LHP, TP/TGR yang dilakukan oleh Instansi Pengawas Keuangan Negara, yang secara rinci meliputi :

- a) Memonitor, mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta kesiapan pekerjaan. Menyusun Laporan Berkala dan teguran terhadap keterlambatan pelaporan pelaksanaan anggaran.
- b) Meneliti usulan Calon pengelola anggaran ( KPA dan bendahara).
- c) Penyusunan usulan beserta kelengkapan ke tingkat Kementerian.

- d) Memonitor tindak lanjut LHP Tim pemeriksa, Memonitor dan evaluasi LHP,TP dan TGR dilingkungan Ditjen Hubdat dan membuat teguran terhadap keterlambatan tindak lanjut LHP,TP dan TGR.

### c. Bagian Hukum

Berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang transportasi darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- 2) pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- 3) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta urusan kerjasama luar negeri di bidang transportasi darat.

Pada Bagian Hukum, pelaksanaan kegiatan Tahun 2010 tidak terlepas dari program kerja tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, belum terlaksana maupun sedang dalam proses penyelesaian serta kegiatan yang berkelanjutan dan terjadwal setiap tahun. Program kerja pada Bagian Hukum dirinci sesuai dengan pembagian Sub bagian yang ada, antara lain yaitu :

#### 1) Sub Bag. Peraturan Perundang-undangan

Untuk kegiatan 2010 telah dijadwalkan 17 kegiatan dalam rangka Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Dirjen sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

yang antara lain banyak menitik beratkan pada perlunya suatu pengaturan baru ataupun perlunya pembaharuan pengaturan, yang meliputi :

- a) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Revisi Peraturan Pemerintah bidang LLAJ sebagai tindak lanjut dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- c) Penyusunan dan Penelaahan penyiapan bahan Rancangan Peraturan Dirjen bidang LLAJ, LLASDP, KTD, dan BSTP;
- d) Penyusunan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Direktorat Jendral Perhubungan Darat;
- e) Verifikasi Perda dan Raperda di Bidang Perhubungan Darat;
- f) Pembuatan buku peraturan pelaksanaannya.

## 2) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan penyiapan dan pengandaan dokumentasi hukum untuk keperluan informasi dan referensi antara lain :

- a) Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum atas perkara-perkara yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transportasi darat termasuk mengikuti persidangan di Peradilan (7 Perkara yang ditangani Tahun 2010);
- b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi terhadap system Dokumentasi Hukum;
- c) Penyebarluasan produk hukum Ditjen Hubdat kepada masyarakat dan instansi Pemerintah baik melalui distribusi secara langsung maupun melalui penyuluhan;
- d) Melakukan penyiapan bahan penyuluhan peraturan perundangan yang terkait dengan bidang transportasi darat;
- e) Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang transportasi darat.

## 3) Sub Bag. Humas dan KSLN

Kegiatan yang dijadwalkan bertitik tolak pada hubungan dengan masyarakat secara langsung (internal dan eksternal), hubungan dengan masyarakat

melalui media, hubungan antar lembaga dan kerjasama luar negeri antara lain:

- a) Penyiapan bahan, perencanaan dan pelaksanaan komunikasi dan evaluasi dalam bentuk pertemuan (formal/informal), Penerangan, Penyuluhan, Konferensi Pers, Jumpa pers, Liputan Pers, Analisis maupun pelurusan berita/tulisan dan pembinaan hubungan baik dengan wartawan/media, serta melaksanakan kliping / guntingan berita sebagai bahan informasi dan pertimbangan pimpinan Eselon I dan Eselon II;
- b) Menyiapkan bahan, mengkoordinir dan mengikuti pameran yang berkaitan dengan bidang transportasi telah diikuti pameran sebanyak 3 kegiatan;
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga / Institusi baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka kegiatan antar lembaga, termasuk mengikuti rapat dengar pendapat di DPR;
- d) Melaksanakan dokumentasi audio dan visual tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilingkungan Ditjen Perhubungan Darat maupun yang terkait;
- e) Memberikan informasi kebijakan dan informasi lain dilingkungan Ditjen Hubdat dengan menerbitkan info Hubdat setiap 3 bulan sekali yang disebarkan kepada Stakeholder baik dilingkungan Kementerian Perhubungan maupun di luar Kemenhub serta Dinas Perhubungan propinsi dan Dinas perhubungan Kab/Kota;
- f) Penyiapan dan analisis bahan untuk rapat konsultasi, rapat koordinasi, serta rapat persiapan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan pertemuan KSLN baik di dalam maupun di luar negeri;
- g) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan delegasi untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rangka kegiatan KSLN, termasuk proses administrasinya baik di dalam maupun di luar negeri;
- h) Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pertemuan dan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama luar negeri, termasuk agreements / perjanjian-perjanjian dan MOU yang bersifat regional, bilateral atau internasional.

#### d. Bagian Kepegawaian Dan Umum

Berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata

laksana serta tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
- 2) pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 3) pengelolaan urusan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada Bagian Kepegawaian dan Umum, untuk tahun 2010 telah dijadwalkan beberapa kegiatan yang secara garis besar meliputi penataan, pemeliharaan dan pengembangan serta pelayanan administratif kepegawaian, sarana dan prasarana kerja serta sumber daya manusia. Kegiatan tersebut dapat dirinci sesuai dengan pembagian sub bagian yang ada, antara lain :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Selain menyiapkan tenaga-tenaga sesuai dengan kebutuhan, penyempurnaan organisasi, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai, juga kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dengan rincian :

- a) Melakukan monitoring mengenai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
- b) Melakukan monitoring UPT dan Eks UPT Ditjen Hubdat;
- c) Menyiapkan dan mengirimkan peserta Diklat Struktural, Fungsional maupun Diklat Teknis Dalam dan Luar Negeri serta program beasiswa S2 transportasi;
- d) Memproses Pengangkatan Jabatan fungsional, Mutasi, Promosi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penghargaan, Pengangkatan PNS, dan Pensiun Pegawai;
- e) Melakukan Penataan nomenklatur jabatan teknis dan penyempurnaan uraian jabatan/pekerjaan Ditjen Hubdat;

- f) Penyusunan standar kompetensi jabatan aparatur perhubungan bidang lalu lintas;
- g) Memproses penerbitan Surat Keputusan Kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- h) Menyusun formasi Tahun Anggaran 2010 dan menyempurnakan daftar susunan kebutuhan pegawai (DSP);
- i) Menyiapkan proses pengadaan CPNS Ditjen Perhubungan Darat formasi tahun 2010;
- j) Melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kinerja SDM Hubdat bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- k) Melakukan kegiatan peningkatan disiplin dan jiwa korsa pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- l) Menyiapkan bahan usulan, fasilitasi dan koordinasi rencana pembentukan UPT Ditjen Perhubungan Darat di daerah, termasuk yang belum sanggup untuk dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah;
- m) Memfasilitasi pengurusan Kartu Taspen, Kartu Istri (KARIS) dan Kartu Suami (KARSU);
- n) Melakukan pembinaan mental dan spiritual pegawai melalui ESQ In-House Training Reguler;
- o) Melakukan pembekalan kepada para pegawai yang akan memasuki masa purna bhakti (pensiun);
- p) Melakukan pembekalan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi bagi para pegawai;
- q) Melakukan sosialisasi administrasi kepegawaian.

## 2) Sub Bagian Tata Usaha

Untuk Sub Bagian Tata Usaha dengan harapan terwujudnya pelayanan dan akurasi data kepegawaian yang optimal maka kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010, antara lain :

- a) Pencatatan surat masuk dan surat keluar baik secara manual maupun dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Tata Persuratan (SITU);
- b) Penyiapan dan penyusunan daftar gaji pegawai;
- c) Penyusunan daftar uang makan dan uang lembur pegawai;
- d) Penyempurnaan dan updating data kepegawaian;
- e) Penataan dan pemeliharaan arsip;

- f) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip (DPA);
- g) Penggandaan, pencetakan, pengiriman/ekspedisi surat-surat dinas di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Darat;
- h) Memproses Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS yang diwajibkan sesuai peraturan perpajakan;
- i) Melakukan kunjungan/studi banding kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia;
- j) Melakukan kunjungan/studi banding kearsipan di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Semarang;
- k) Sosialisasi ketatausahaan di UPT Pelabuhan Penyeberangan Kariangau;
- l) Sosialisasi ketatausahaan di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- m) Sosialisasi ketatausahaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi.

### 3) Sub Bagian Rumah Tangga

Kegiatan yang dilaksanakan bertitik tolak pada terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi, demikian pula dengan optimalisasi penyediaan kebutuhan medis bagi pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, antara lain:

- a) Penataan administrasi barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, meliputi; pendataan barang inventaris kantor, pendistribusian barang-barang inventaris kantor, alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan membuat laporan barang milik negara tiap semester;
- b) Pengadaan Keperluan Operasional Kantor seperti alat tulis kantor, computer supplies dan barang-barang keperluan rumah tangga;
- c) Pengadaan pakaian dinas harian sesuai jumlah pegawai;
- d) Pengadaan obat-obatan dan peralatan medis pada poliklinik;
- e) Pengadaan barang inventaris kantor seperti ; notebook, mesin penghitung uang, meja rapat, LCD projector, AC split, alat penghancur kertas, komputer, alat komunikasi, handycam, alat perekam suara, kamera saku, camera digital, mesin ketik elektronik, printer, meja dan kursi staf, kursi sofa dan kursi kerja pimpinan dan alat penyimpan arsip;
- f) Pengadaan software aplikasi perkantoran dan operating system;

- g) Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan roda 4;
- h) Perbaikan barang inventaris kantor;
- i) Pengaturan pemakaian ruang rapat;
- j) Pemeliharaan dan perawatan gedung seperti ruang rapat Gedung Karsa Lt. 3, ruang poliklinik, ruang pantry, ruang Dit. LLAJ, Dit. KTD, Dit. BSTP, pemasangan karpet dan folding door Dit. BSTP;
- k) Operasional dan pemeliharaan kendaraan operasional Roda 4 dan Roda 6;
- l) Pelayanan urusan dalam lainnya.

## 2. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005 adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) Penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- c) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- d) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan, penguji kendaraan bermotor serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) Penyiapan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

h) Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan

Sub Direktorat Jaringan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan jalan, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan jaringan transportasi jalan, penyusunan jaringan transportasi jalan primer, penetapan kelas jalan di jaringan jalan primer, penyusunan jaringan trayek antar kota antar propinsi, jaringan trayek lintas batas negara dan jaringan lintas di jaringan jalan primer, penetapan lokasi terminal tipe A dan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Jaringan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum dan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penentuan lokasi terminal, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan Jalan Propinsi, Kota dan Kabupaten, jaringan prasarana dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan untuk penumpang dan barang, penentuan lokasi terminal penumpang tipe B dan tipe C, penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang, sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dan Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana induk dan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, jaringan trayek antar propinsi, lintas batas negara, angkutan perintis, jaringan lintas angkutan barang di jalan nasional, lokasi terminal penumpang tipe A, lokasi terminal penumpang tipe utama dan penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan;

- d) Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistim informasi dan komunikasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian kualifikasi teknis petugas terminal; dan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi jalan.

1) Seksi Jaringan Prasarana Dan Pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Jaringan Prasarana dan Pelayanan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Studi Perencanaan Teknis Standart Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Terminal Penumpang.
- b) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis Terminal Angkutan Barang.



Gambar III.1  
Rapat Pembahasan Dokumen



Gambar III.2  
Dokumen Laporan Studi

- c) Memberikan bimbingan arahan teknis pada Perencanaan Teknis dan Standarisasi Tipikal Terminal Tipe A Asal Tujuan dan Tipe A Transit.



Gambar III.3  
Rapat Pembahasan Dokumen



Gambar III.4  
Dokumen Laporan Studi

- d) Pembangunan Terminal Penumpang Di Kabupaten Pacitan Tahap I (beserta supervisinya).

- e) Pembangunan Terminal Penumpang Tana Toraja Tahap III (beserta supervisinya).
- f) Pembangunan Terminal Penumpang Wonosari Tahap IV (beserta supervisinya).
- g) Pembangunan Terminal Penumpang Di Wonogiri Tahap I (beserta supervisinya).
- h) Pembangunan Terminal Penumpang Di Kab. Barru Sulsel Tahap I (beserta supervisinya).
- i) Rehabilitasi Terminal Rajabasa Di Bandar Lampung (beserta supervisinya).
- j) Rehabilitasi Pembangunan Terminal Solo Jateng Tahap II (beserta supervisinya).
- k) Rehabilitasi Pembangunan Terminal Surabaya Tahap II (beserta supervisinya).
- l) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Kab. Barru Provinsi Sulsel dan Kota Palopo Di Sulteng.
- m) Penetapan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe A Wonogiri, Kabupaten Sorolangun dan Kota Bandar Lampung.
- n) Monitoring Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A.
- o) Pengoperasian Terminal Penumpang ALBN Motain Kab. Bellu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2) Seksi Pengembangan Transportasi Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pengembangan Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) SIM Database Terminal Terminal Tipe A Tahap II.
- b) Sewa Jaringan CCTV Di 21 Lokasi(Terminal Merak, Pintu Tol Merak, Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Patrol, Losarang, Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Losari JT Tanjung (Brebes), Padalarang, Cileunyi, Nagrek, JT Gentong, Sadang, Kadipten, Sumpiuh, Ciamis, Comal, Karanganyar, JT. Kulwaru).
- c) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi (VMS,CCTV,SMART CARD Terminal).
- d) Pemeliharaan Jembatan Timbang Percontohan.
- e) Sewa Backhaul Internet Operasional RTTMC, VMS, CCTV, SMART CART.
- f) Pembekalan Teknis Kepala Terminal (peserta 67 orang).

- g) Survei Inventarisasi Jaringan dan Prasarana Provinsi Jawa Barat.
- h) RTTMC.
- i) Pengadaan Electronic Card Terminal.
- j) Pengadaan dan Pemasangan VMS Mobile/Dinamis.
- k) Pengadaan dan Pemasangan Elektronik Smart Camera Di Kota Medan dan Sekitarnya.
- l) Penyusunan Penentuan kinerja (PK) Tahun 2011.
- m) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010.
- n) Penyusun Perhubungan Darat Dalam Angka (PDDA) Tahun 2010.
- o) Penyusun Laporan Tahunan (LAPTAH ) Tahun 2010.
- p) Monitoring CCTV Angkutan Lebaran Tahun 2010, Angkutan Natal Tahun 2010 dan Angkutan Tahun Baru 2011.



Gambar III.5  
Konferensi Pers Kemenhub  
Angkutan Lebaran 2010



Gambar III.6  
LCD Monitoring Lalu Lintas

- q) Penyusunan RKAKL bidang LLAJ tahun 2011
- r) Melaporkan hasil evaluasi Satker daerah Provinsi untuk triwulan III tahun 2010.

#### b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan

Sub Direktorat Sarana Angkutan Jalan berdasarkan KM no. 43 Tahun 2005 mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta pengujian kendaraan bermotor dan penyiapan pengesahan hasil uji tipe, sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor;
- b) Penyiapan bahan penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor; serta harmonisasi dan standarisasi regulasi;
- c) Penyiapan bahan pengesahan hasil uji tipe dan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor, akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor, serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pengujian tipe dan berkala kendaraan bermotor;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, teknologi peralatan uji kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, serta pengujian kendaraan bermotor; dan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan.

#### 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan pertemuan penguji kendaraan bermotor seluruh Indonesia tahun 2010;
- b) Penyelenggaraan Rencana Operasi dan Analisa Evaluasi Angkutan Lebaran tahun 2010;
- c) Pelaksanaan kegiatan pemilihan penguji kendaraan bermotor teladan tingkat nasional tahun 2010;

- d) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengujian kendaraan bermotor di Medan tahun 2010;
- e) Pelaksanaan kegiatan expert meeting tentang brakes di Hotel Sultan tahun 2010 (peserta 87 orang);



Gambar III.7  
Situasi Meeting



Gambar III.8  
Direktur LLAJ

- f) Pembangunan multipurpose test track untuk pengujian kebisingan kendaraan bermotor sesuai UN ECE R41 & UN ECE R51;
- g) Pencetakan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) dan sertifikat uji tipe (SUT)
- h) Pencetakan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi kompetensi pengujian kendaraan bermotor;
- i) Penerbitan sertifikat uji tipe (SUT) kendaraan bermotor;
- j) Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) kendaraan bermotor;
- k) Penilaian dalam rangka penyusunan sertifikat kompetensi pengujian kendaraan bermotor;
- l) Partisipasi dalam pertemuan ACCSQ-APWG (Asean Consultative Commite Standard and Quality Automotive Product Working Group) dan expert meeting dalam rangka persiapan menghadapi globalisasi dan harmonisasi di bidang otomotif;
- m) Menyiapkan konsep SK Dirjen Nomor : 1481/KP.801/DRJD/2010 tentang pembentukan tim **INDONESIAN AUTOMOTIVE STANDARD INTERNATIONALIZATION GROUP (IASIG)**;
- n) Menyiapkan konsep Peraturan Dirjen Nomor : 402/42/12/DRJD/2010 tentang bantuan teknis pengadaan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- o) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetakan buku uji;
- p) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang rekomendasi distribusi buku uji;
- q) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang pencetak stiker uji;

- r) Menyiapkan konsep SK Dirjen tentang perubahan wilayah distribusi buku uji;
- s) Penyusunan draft peraturan Dirjen tentang petunjuk pelaksanaan kartu uji dan stiker uji;
- t) Melakukan witness uji emisi kendaraan bermotor di Thailand dan Jepang.

## 2) Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Teknologi Kendaraan Bermotor melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pencetakan sertifikat Kompetensi dan pembuatan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor serta memberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor bagi penguji yang telah memenuhi persyaratan. (pindah ke PKB);
- b) Finalisasi konsep RPD (Rancangan Peraturan Dirjen) tentang Dimensi Kendaraan Bermotor;
- c) Memberikan sertifikat registrasi uji tipe untuk setiap unit KB yang telah memperoleh pengesahan uji tipe:
  - (1) Pencetakan sertifikat registrasi uji tipe oleh Ditjen Hubdat.
  - (2) Registrasi bagi produk kendaraan bermotor yang tipenya telah memperoleh Sertifikat Uji Tipe.
  - (3) Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- d) Pelaksanaan monitoring pembuatan karoseri barang bak muatan terbuka dari kayu;
- e) Monitoring dan sosialisasi ke industri karoseri;
- f) Pelaksanaan Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
- g) Pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
- h) Rekomendasi alat uji kendaraan bermotor, buku uji, tanda uji dan tanda samping;
- i) Monitoring Buku uji dan Tanda Samping di dishub kab/kota;
- j) Pengajuan usulan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk sarana angkutan jalan dengan teknologi ramah lingkungan kepada kementerian keuangan;
- k) Pengesahan uji tipe converter kit BBG;
- l) Pengajuan usulan proyeksi kebutuhan energi untuk sektor transportasi darat hingga tahun 2050 untuk dituangkan dalam Kebijakan Energi

Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional kepada Dewan Energi Nasional;

- m) Penetapan spesifikasi sarana BRT bersama-sama Dit.BSTP;
- n) Pembahasan solusi permasalahan BBG transportasi bersama-sama BAPENAS DAN Kementerian ESDM;
- o) Pelaksanaan Uji Tipe CBU Bukan Baru ke 5 kota tujuan impor (Surabaya, Medan, Semarang, Makassar, Jakarta);
- p) Penilaian fisik kendaraan dalam rangka penghapusan kendaraan dinas milik instansi pemerintah;
- q) Penerbitan rekomendasi perusahaan perbaikan dan perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
- r) Rekapitulasi permohonan bantuan alat uji untuk Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- s) Rekapitulasi data peralatan uji di Kabupaten/Kota;
- t) Proses penyusunan Data Base perusahaan – perusahaan karoseri; dan
- u) Rekapitulasi Pegujian Kendaraan Bermotor bagi kendaraan wajib uji.

#### c. Sub Direktorat Lalu Lintas Jalan

Subdirektorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perlengkapan jalan dan penimbangan kendaraan bermotor, serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyiapan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan di jalan nasional dan pengoperasian alat penimbangan;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan, perlengkapan jalan, dan analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
- c) Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyusunan sistem informasi manajemen rekayasa lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan dan pemberian kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- e) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional;
- f) Penyiapan bahan penyusunan analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta analisa dampak lalu lintas di jalan nasional di luar kawasan perkotaan;
- g) Penyiapan bahan perumusan pemberian kualifikasi teknis petugas alat penimbangan; dan
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

#### 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bandung (Jawa Barat).
- b) Penyusunan draf Rambu Petunjuk, Perintah dan Larangan pada Jalan Tol Tahap I pada Jalan Tol Jakarta – Merak.
- c) Penyusunan DED manajemen Lalin di Jalan Nasional Pantura di Pulau Jawa pada Segmen Bekasi - Cikampek Tahap III .
- d) Penyusunan DED manajemen Lalin di Jalan Nasional Pantura di Pulau Jawa pada Segmen Cikampek - Cirebon tahap I .
- e) Penyusunan DED Manajemen Lalin di Jalan Nasional Pansela di Pulau Jawa pada Segmen Lampung - Sumsel tahap I .

- f) Pembangunan Sistem Informasi Lalu Lintas Di Jalan Nasional (Tahap III).
- g) Penyusunan DED Manajemen Lalin di Jalur Trans di Pulau Kalimantan Tahap II.
- h) Penyusunan DED Manajemen Lalin di Jalur Trans di Pulau Sulawesi Tahap II.
- i) Manajemen Rekayasa Ruas Segmen Cikampek-Cirebon – Tahap III.
- j) Manajemen Rekayasa Ruas Segmen Cileunyi-Tasikmalaya – Tahap III .
- k) Manajemen Rekayasa Ruas Jl. Slamet Riyadi Surakarta .
- l) Pemeliharaan database perlengkapan jalan, jembatan timbang dan sistem informasi manajemen lalulintas .
- m) Bimbingan teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- n) Penyusunan draft penetapan petunjuk, peringatan, perintah dan atau larangan pada jalan nasional.

## 2) Seksi Perlengkapan Jalan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Perlengkapan Jalan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Semiloka Perlengkapan Jalan di Ambon (Maluku).
- b) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan akreditasi jembatan timbang di P. Jawa .
- c) Pengadaan Alat Dynamic Portable Message Sign .
- d) Pengadaan alat kinerja lalulintas di jalan nasional tahap II .
- e) Pembangunan laboratorium fasilitas perlengkapan jalan tahap I.
- f) Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan No. Rute Jalan Di Jalan Nasional Tahap (Tiang F) Di Sumbagut - Tahap V.



Gambar III.9  
Penunjuk Jalan



Gambar III.10  
Pondasi Tiang

- g) Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan No. Rute Jalan Di Jalan Nasional Di Pulau Jawa dan Pulau Bali (Tiang Portal) - Tahap III.

- h) Rekonstruksi pemasangan RPPJ dan nomor rute di jalan nasional pantura P. Jawa.
- i) Pengadaan dan pemasangan LPJ solar cell di jalur pantura (Tahap III) .
- j) Pemeliharaan lampu penerangan jalan solar cell di jalur pantura.
- k) Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang Tahap III .



Gambar III.11  
Aplikasi Jembatan Timbang



Gambar III.12  
Monitor Output

- l) Rehabilitasi APILL di jalan Nasional di Pulau Jawa Berbasis solar cell - Tahap III.
- m) Sosialisasi penetapan operasional jembatan timbang
- n) Semiloka perlengkapan jalan

#### d. Sub Direktorat Angkutan Jalan

Subdirektorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan penumpang dan barang, pemberian izin angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta perhitungan tarif angkutan umum di jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang angkutan penumpang dan angkutan barang serta tarif angkutan penumpang dan/ atau barang di jalan;
- c) Penyiapan bahan perumusan pemberian izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara dan trayek antar kota antar propinsi, izin operasi angkutan pariwisata, taksi tertentu dan angkutan sewa, penetapan

tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, serta pengendalian angkutan barang tertentu;

- d) Penyiapan bahan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum dan pemberian subsidi angkutan umum;
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi di bidang angkutan jalan; dan
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

#### 1) Seksi Angkutan Penumpang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Angkutan Penumpang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Tahun 2010 di Pulau Jawa;
- b) Monitoring tarif angkutan AKAP Kelas Ekonomi;
- c) Pelaksanaan survey jarak trayek angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Bali dan NTB;
- d) Pelaksanaan pemilihan Perusahaan Angkutan dengan Pelayanan Terbaik pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2010 (1431 H);
- e) Semiloka peningkatan pelayanan angkutan jalan antar kota di Surabaya;
- f) Penyusunan Blue Print Angkutan Jalan;
- g) Survey load faktor angkutan umum penumpang;
- h) Monitoring dan evaluasi keperintisan angkutan jalan;
- i) Pelaksanaan Rakernis Angkutan perintis di Manado;
- j) Penyusunan perencanaan Teknis Standar Pelayanan Angkutan Penumpang Umum;  
Penyusunan Pedoman Teknis Kartu Pengawasan Izin Trayek dalam bentuk Kartu Elektronik.

#### 2) Seksi Angkutan Barang

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Angkutan Barang melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Audit pemenuhan persyaratan angkutan B3;

- b) Pelaksanaan Pelatihan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Angkutan Pariwisata Standar ISO;
- c) Monitoring Tarif Angkutan Barang;
- d) Pembangunan e – Licensing Perizinan Angkutan Pariwisata;
- e) Evaluasi kinerja perusahaan angkutan B3;
- f) Pembangunan database angkutan barang, B3 dan alat berat;
- g) Pelatihan pengemudi angkutan B3 (kerjasama dengan Dit. KTD);
- h) Penyiapan bahan draft RPP (Rancangan Perundang-Undangan) Kendaraan, Angkutan dan Prasarana;
- i) Pembangunan System Informasi Angkutan Pariwisata, Antar Jemput dan Taksi;
- j) Survey pengaruh biaya transportasi terhadap harga sembako.

#### e. Sub Direktorat Pengendalian Operasional

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan penegakan hukum dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standar,

norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- e) Penyiapan bahan perumusan pengusulan pengangkatan/ pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### 1) Seksi Monitoring Operasional

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Monitoring Operasional melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengawasan Operasional Angkutan Orang dan barang.



Gambar III.13  
Pemeriksaan Bus AKAP di terminal  
Terboyo Semarang Jawa tengah



Gambar III.14  
Pemeriksaan Truk di Ruas jalan

- b) Pengawasan Pelaksanaan Produksi Karoseri.



Gambar III.15  
Pemeriksaan karoseri truk



Gambar III.16  
Pemeriksaan karoseri Tangki

c) Pengembangan jaringan alat komunikasi.



Gambar III.17  
Peta Cakupan Repeater Dit. LLAJ



Gambar III.18  
Wilayah Cakupan Repeater dan  
Call Sign Panggilan

d) Kontingensi penanganan bencana alam.



Gambar III.19  
Penyerahan bantuan Menteri  
Perhubungan kepada warga  
korban Merapi



Gambar III.20  
Truk Pembawa Bantuan Merapi

e) Pemeliharaan dan Pengoperasian Kendaraan Operasional.

f) Pemeliharaan dan Pengoperasian alat Komunikasi.

g) Monitoring pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor.



Gambar III.21  
Penimbangan di Jembatan  
Timbang Balong Gandu,  
Jawa Barat



Gambar III.22  
Penimbangan di  
Jembatan Timbang  
Toyogo, Jawa Tengah

h) Penegakan hukum perijinan angkutan secara nasional.



Gambar III.23  
Tempat sidang di tempat



Gambar III.24  
Stiker kendaraan yang  
melanggar dalam Penegakan  
Hukum Secara Nasional

i) Pengawasan Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.



Gambar III.25  
Pengujian lampu kendaraan  
di kabupaten Sijunjung



Gambar III.26  
Pengujian rem kendaraan di  
Kabupaten Sijunjung

j) Pengawasan dan Pegendalian Operasional Angkutan penumpang di Bandara Sukarno Hatta.



Gambar III.27  
Angkutan Penumpang tanpa  
stiker di bandara Soekarno Hatta



Gambar III.28  
Angkutan Penumpang berstiker  
di bandara Soekarno Hatta

## 2) Seksi Bimbingan Teknis PPNS

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Bimbingan Teknis PPNS melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Rakernis PPNS bidang LLAJ
- b) Kegiatan Dalops (Penyuluhan Penegakan Hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).



- c) Pengadaan kartu PPNS.
- d) Pengadaan Kendaraan Khusus Penanganan Gangguan LLAJ akibat bencana Alam.



- e) Peningkatan Kualitas PPNS Pola 100 Jam.



f) Peningkatan Kualitas PPNS Pola 400 Jam.



Gambar III.35  
Pelepasan Diklat PPNS 400 Jam

Gambar III.36  
Penyematan Tanda peserta  
Diklat PPNS 400 Jam

g) Peningkat Ketrampilan (repressing) PPNS LLAJ.



Gambar III.37  
Sambutan pembuka  
Represina PPNS LLAJ

Gambar III.38  
Peserta Represing

### 3. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan berdasarkan KM No. 43 Tahun 2005 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

- b) penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi, sarana, pelabuhan, lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e) pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- g) pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai,

- danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam propinsi dan dalam kabupaten/kota;
- c) penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan
  - d) penyeberangan;
  - e) penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pepaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

#### 1) Seksi Anev Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Anev Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Evaluasi Kinerja Lintas Penyeberangan.
- b) Penyusunan data jaringan transportasi sungai danau.
- c) Mengelola kegiatan penyusunan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- d) Mengelola kegiatan penyusunan bahan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- e) Mengelola kegiatan analisa dan evaluasi jaringan transportasi SDP.
- f) Menyusun informasi jaringan transportasi SDP untuk bahan pembinaan.
- g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP Provinsi.
- h) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan studi-studi bidang perencanaan, pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP.
- i) Menyusunan Penetapan Kinerja 2010, LAKIP 2009.

## 2) Seksi Pengembangan Jaringan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pengembangan Jaringan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pengawasan pengembangan terhadap penetapan lintas penyeberangan antar propinsi maupun antar negara;
- b) Mengelola kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota, dan penetapan lintas penyeberangan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota;
- d) Mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara, analisis, evaluasi dan pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- e) Mengelola kegiatan penyusunan jaringan lintas penyeberangan antar propinsi dan antar negara dan pemaduan rencana kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f) Melaksanakan pengawasan perwujudan serta penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- g) Memberi bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan Transportasi SDP di beberapa provinsi;
- h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun laporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.

### b. Sub Direktorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan, pemeliharaan sarana angkutan

sungai, danau dan penyeberangan, serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun sarana sungai, danau dan penyeberangan serta perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan;
- c) penyiapan bahan penyusunan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta registrasi sarana angkutan sungai dan danau;
- d) pemberian kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai dan danau;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, mutu pelayanan, perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan serta pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau.

#### 1) Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan SDP melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pembangunan 1 (satu) unit kapal penyeberangan baru tahun 2010;
- b) Pembangunan 8 (delapan) unit kapal penyeberangan lanjutan;
- c) Pembangunan 4 (empat) unit bus air di propinsi NAD, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Papua;
- d) Penyusunan laporan studi desain prototype kapal penyeberangan penumpang type 150 GT, 200 GT dan 300 GT jenis double ended;
- e) Penyusunan laporan studi desain prototype kapal penyeberangan penumpang type 2000 GT dan 3000 GT;
- f) Penyusunan laporan studi desain kapal kerja multiguna untuk sungai dan danau;
- g) Penyusunan laporan studi penggunaan kapal sungai sesuai karakteristik daerah;

- h) Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja sarana penyeberangan di lintas penyeberangan komersil dan perintis dengan melaksanakan survey kinerja operasional sarana angkutan penyeberangan selama periode Januari 2009 – Desember 2009 di 8 (delapan) lintasan penyeberangan antara lain sebagai berikut :
- (1) Lintasan Penyeberangan Ulee Lheue – Lamteng;
  - (2) Lintasan Penyeberangan Jepara – Karimun Jawa;
  - (3) Lintasan Penyeberangan Kendari – langara;
  - (4) Lintasan Penyeberangan Bira – Labuan Bajo, Bira – Tondasi dan Bira – Pamatata;
  - (5) Lintasan Penyeberangan Sibolga – Teluk Dalam – Pulau Tello dan Sibolga – Gunung Sitoli;
  - (6) Lintasan Penyeberangan Jangkar – Kalianget;
  - (7) Lintasan Penyeberangan Tual – Larat, Larat – Saumlaki, Saumlaki – Tapa, Tual – Dobo, Dobo – Benjina;
  - (8) Lintasan Penyeberangan Biak – Numfor – Manokwari, Biak – Serui, Serui – Waren, Waren – Nabire.
- i) Pemantauan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembangunan sarana sungai danau dan penyeberangan;
- j) Peningkatan kemampuan SDM di bidang pembangunan kapal baru dan manajemen keselamatan sarana penyeberangan.

## 2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Bimbingan Perawatan Sarana melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dengan melaksanakan survey di 4 (empat) lokasi antara lain sebagai berikut :
  - (1) Pengumpulan Data Di Propinsi Jambi;
  - (2) Pengumpulan Data Di Propinsi Sumatera Barat;
  - (3) Pengumpulan Data Di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- b) Pemantauan hasil pelaksanaan docking kapal di lintas penyeberangan komersil dengan melaksanakan survey di 4 (empat) lintasan penyeberangan antara lain sebagai berikut :
  - (1) Pelaksanaan docking kapal di lintas Palembang – Muntok;

- (2) Pelaksanaan docking kapal di lintas Balikpapan (Kariangau) – Panajam, Balikpapan (Kariangau) – Taipa;
  - (3) Pelaksanaan docking kapal di lintas Bau Bau – Wara;
  - (4) Pelaksanaan docking kapal di lintas Kupang – Larantuka.
- c) Peningkatan kemampuan SDM di bidang perawatan dan mempertahankan klas kapal penyeberangan.

c. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) penyiapan bahan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- d) pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perbaikan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan dan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional, pemberian kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

## 1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Rancang Bangun Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) Menyusun bahan laporan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) Memberikan bimbingan teknis terkait dengan desain dermaga kepada satker daerah;
- d) Melakukan monitoring pembangunan pelabuhan penyeberangan yang didanai oleh APBN;
- e) Melakukan inventarisasi data pelabuhan SDP di Indonesia yang sudah terbangun;
- f) Melakukan pemantauan terhadap progres-progres kegiatan pembangunan dermaga di daerah yang didanai dari APBN;
- g) Memberikan pembekalan terhadap PNS D3 tahun 2010.
- h) Memberikan bimbingan teknis di lapangan pada waktu pelaksanaan pekerjaan.

## 2) Seksi Pengelolaan Pelabuhan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pengelolaan Pelabuhan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan rencana pembentukan OPLAP/OPP;
- b) Memantau kinerja pelabuhan SDP di Indonesia;
- c) Pemantauan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan yang diusahakan;
- d) Sosialisasi pedoman teknis yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan oleh Menteri maupun Dirjen Perhubungan Darat;
- e) Peningkatan SDM dengan pendidikan dan pelatihan sistem informasi berbasis spasial (GIS).

### d. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman,

kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan serta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen dan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan;

#### 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Manajemen Lalu Lintas melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau.
- b) Sosialisasi Pedoman Teknis di Bidang Manajemen LLASDP, lokasi di Prov.Sumatera Selatan, Prov.Sumatera Utara, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Timur, Prov.Kalimantan Barat, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Selatan, dan Prov. Nusa Tenggara Barat.
- c) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Sungai dan Danau, lokasi di Prov.Sumatera Utara, Prov. Sumatera Selatan, Prov.Riau, Prov.Jambi,

Prov.Kalimantan Selatan, Prov.Kalimantan Tengah, Prov.Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Barat, dan Prov.Bali.

- d) Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, lokasi di Prov.Sumatera Utara, Prov.Sumatera Selatan, Prov.Lampung, Prov.Banten, Prov.Jawa Timur, Prov.Bali, Prov.NTB, Prov.NTT, Prov.Sulawesi Selatan, dan Prov.Sulawesi Tenggara.
- e) Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Bidang LLASDP Pola 100 Jam, diadakan di Bogor, Jawa Barat, diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) peserta; dan
- f) Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Bidang LLASDP Pola 400 Jam, diadakan di Bogor, Jawa Barat, diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta.
- g) Peningkatan Kemampuan Teknis SDM Bidang LLASDP, diadakan di Kota Palembang, meliputi:
  - (1) Orientasi Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan, diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) peserta;
  - (2) Orientasi Sertifikasi Kelaikan Sarana Angkutan Sungai dan Danau, diikuti oleh 19 (sembilan belas) peserta; dan
  - (3) Orientasi Petugas Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau, diikuti oleh 17 (tujuh belas) peserta.

## 2) Seksi Alur dan Perambuan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Alur dan Perambuan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Pengaturan Alur Pelayaran Sungai.
- b) DED Pengerukan Air Sugihan Kiri Kab.Banyuasin, lokasi di Prov.Sumatera Selatan.
- c) Survey Pengerukan Alur Pelayaran Lintas Penyeberangan Kariangau-Penajam (Balikpapan), lokasi di Kota Balikpapan.
- d) Melaksanakan bimbingan teknis kepada UPT dan instansi di daerah mengenai studi desain pengerukan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), dan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.

#### e. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, perhitungan tariff angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c) penyiapan bahan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

##### 1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Bimbingan Usaha Angkutan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan kesiapan perangkat operasi sarana dan prasarana, pemantauan dan pengawasan angkutan penyeberangan pada angkutan lebaran tahun 2010.

- b) Penyusunan evaluasi kinerja pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas komersil.
- c) Pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah melakukan docking tahunan.
- d) Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal.

## 2) Seksi Tarif dan Keperintisan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Tarif dan Keperintisan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Monitoring penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis.
- b) Monitoring pelaksanaan docking kapal penyeberangan perintis.
- c) Pamantauan Tarif Angkutan Penyeberangan.
- d) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis (pemberian subsidi).
- e) Pembahasan formulasi perhitungan tarif jasa pelabuahn (PP No. 6 tahun 2009).

## 4. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan berdasarkan KM. No. 43 Tahun 2007 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- b) penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c) penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemaduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;
- f) pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

#### a. Sub Direktorat Jaringan Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Jaringan Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
- c) penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan;
- d) penyusunan rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

#### 1) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).
- b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah I.

- c) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah I.
- d) Penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan wilayah I.
- e) Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah I.
- f) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah I.
- g) Evaluasi Kinerja Jaringan Transportasi Jalan di Wilayah Perkotaan.

## 2) Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Jaringan Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis penyuluhan dan sosialisasi transportasi perkotaan.
- b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II
- c) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan wilayah II.
- d) Penyusunan sistem informasi manajemen (SIM) transportasi perkotaan wilayah II.
- e) Penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II.
- f) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel, dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi wilayah II.

## b. Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c) penyiapan rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi;
- d) pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

### 1) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Persepsi masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan pada masa penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431H).
- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, penerapan ATCS dan Pedestrian di wilayah I.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah I.
- d) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah I.
- e) Rumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah I.

## 2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Lalu Lintas Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II.
- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan, Penerapan ATCS dan Pesepeda di wilayah II.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di wilayah II.
- d) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan di wilayah II.
- e) Merumusan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah II.

### c. Sub Direktorat Angkutan Perkotaan

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan, penyusunan rencana jaringan trayek serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
- c) penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
- d) penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan

dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

#### 1) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- c) Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- d) Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

#### 2) Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Angkutan Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- b) Pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek.
- c) Penyusunan rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- d) Penentuan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek, pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan

penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

#### d. Sub Direktorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda, penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek, serta penentuan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam;
- b) trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
- c) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pemaduan moda serta penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan/atau barang;
- d) penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
- e) penentuan alokasi kebutuhan angkutan penumpang umum perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu wilayah administrasi propinsi;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayannya melebihi satu propinsi.

##### 1) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah I melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi Wilayah I;
- b) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi Wilayah I.

## 2) Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pemadu Moda Transportasi Perkotaan Wilayah II melaksanakan kegiatan :

- a) Konsolidasi Penanganan Transportasi Perkotaan;
- b) Penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi propinsi Wilayah I;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pemaduan moda dan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan / barang serta pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu propinsi Wilayah I.

## e. Sub Direktorat Dampak Transportasi Perkotaan

Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi serta melaksanakan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Dampak Transportasi Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan dan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
- c) penyiapan penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- d) pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan, penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan.

#### 1) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah I meliputi daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan Dampak transportasi perkotaan;
- c) Penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan Smart Driving serta Implementasinya;

h) Kegiatan Penyusunan Desain Prototipe Sarana Angkutan Umum di Perkotaan.

## 2) Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Dampak Transportasi Perkotaan Wilayah II meliputi daerah Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis di bidang Dampak transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- b) Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan Dampak transportasi perkotaan;
- c) Penyusunan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- d) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- e) Evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- f) Penyiapan bahan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g) Kegiatan Peningkatan Efisiensi dan kualitas Emisi Kendaraan Bermotor Melalui Metode Berkendaraan Smart Driving serta Implementasinya
- h) Kegiatan Penyusunan Desain Prototipe Sarana Angkutan Umum di Perkotaan.

## 5. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Direktorat Keselamatan Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi, audit keselamatan transportasi darat;

- b) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan, promosi dan kemitraan, akreditasi dan sertifikasi serta audit keselamatan transportasi darat;
- c) penyusunan kualifikasi dan pembinaan teknis sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi darat;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan transportasi darat;
- e) pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### a. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan analisis keselamatan serta pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang manajemen keselamatan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang manajemen keselamatan;
- c) penyiapan pelaksanaan pendataan dan analisis kecelakaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- d) penyiapan bahan pengembangan keselamatan dan sistem informasi manajemen (SIM) keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan program keselamatan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan.

#### 1) Seksi Analisa Data dan Kecelakaan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Analisa Data dan Kecelakaan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Program Kerja Keselamatan Transportasi Darat;
- b) Potret Direktorat Keselamatan Transportasi Darat;
- c) Pemantauan Keselamatan Melalui Media Cetak;
- d) Evaluasi Implementasi Lajur Sepeda Motor;
- e) Workshop Manajemen Keselamatan;
- f) Peningkatan Koordinasi Keselamatan;
- g) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan;

- h) Monitor Dan Evaluasi Keselamatan;
- i) Monitoring Angkutan Lebaran.

## 2) Seksi Pengembangan Keselamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Pengembangan Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pedoman Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Daerah;
- b) Kajian Teknis Penetapan Batas Kecepatan Maksimum dan Minimum;
- c) Kajian Teknis Penerapan Dampak Keselamatan Lalu Lintas (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan);
- d) Kajian Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan (Road Safety Inspection);
- e) Pengadaan Peralatan Inspeksi Keselamatan LLAJ.

### b. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan, serta pelaksanaan promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c) penyiapan pelaksanaan penyuluhan, publikasi dan deseminasi, serta kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan.

#### 1) Seksi Advokasi dan Desiminasi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Advokasi dan Desiminasi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pedoman Pemasangan Billboard Penyusunan Modul Pendidikan Keselamatan Untuk Tingkat TK dan SD;
- b) Pembuatan Desain Sosialisasi Keselamatan;
- c) Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak;
- d) Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan.

#### 2) Seksi Kemitraan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Kemitraan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Sosialisasi Keselamatan Melalui Radio;
- b) Pembuatan Film Animasi Keselamatan;
- c) Pengadaan Helm Anak;
- d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekan Keselamatan di Daerah.

#### c. Sub Direktorat Akreditasi dan Sertifikasi

Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi pengemudi dan awak kapal sungai dan danau.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Akreditasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau;
- b) pemberian bimbingan teknis di bidang akreditasi dan sertifikasi lembaga pendidikan pengemudi dan awak kapal sungai dan danau;
- c) penyiapan pemberian sertifikat pengemudi angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi dan sertifikasi.

## 1) Seksi Standarisasi Dan Akreditasi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Standarisasi Dan Akreditasi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Pengemudi Yang Berkeselamatan;
- b) Penyusunan Pedoman Teknis Sertifikasi Instruktur Lembaga Pendidikan Mengemudi dan Instruktur Lembaga Pendidikan Pengemudi Angkutan;
- c) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2010;
- d) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi;
- e) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan B3.

## 2) Seksi Sertifikasi Pengemudi

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Sertifikasi Pengemudi melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Penyusunan Pedoman Teknis Database Awak Kapal Sungai dan Danau;
- b) Penyusunan Konsep Pedoman Teknis Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Sungai dan Danau;
- c) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi T.A. 2010;
- d) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan Umum AKAP/AKDP;
- e) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi;
- f) Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Angkutan B3;
- g) Penyusunan Pedoman Teknis Sertifikasi Instruktur Lembaga Pendidikan Mengemudi dan Instruktur Lembaga Pendidikan Pengemudi Angkutan;
- h) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional Tahun 2010.

### d. Sub Direktorat Audit Keselamatan

Subdirektorat Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan dan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Audit Keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan
- b) dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan;
- c) pemberian bimbingan teknis di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan;
- d) penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan, dan investigasi kecelakaan.

#### 1) Seksi Audit Faktor Keselamatan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Audit Faktor Keselamatan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pelatihan Audit Keselamatan Jalan (4 Propinsi);
- b) Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP dan Jalan;
- c) Pelatihan Audit Keselamatan Alur Pelayaran ASDP (4 Propinsi);
- d) Survei Investigasi DED DRK di Sragen, Jawa Tengah;
- e) Survei Investigasi DED DRK Alur Pelayaran ASDP di Propinsi Kalimantan Selatan;
- f) Perbaikan LRK di Propinsi Bali dan NTB;
- g) Audit Jalan Nasional di Propinsi Jawa Barat;
- h) Kajian Pengembangan Audit Keselamatan.

#### 2) Seksi Investigasi Kecelakaan

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2010, Seksi Investigasi Kecelakaan melaksanakan kegiatan, sebagai berikut :

- a) Pelatihan Penelitian Kecelakaan ASDP (2 Propinsi);
- b) Monitoring Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di 3 Propinsi;
- c) Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan (4 Propinsi);
- d) Kajian Pengembangan Audit Keselamatan.

## B. BIDANG PEMBANGUNAN

Kinerja pembangunan adalah program kerja yang berorientasi pada pembangunan fisik, yang didanai oleh DIPA. Jumlah satker yang didanai dengan APBN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 satker dengan pagu dana sebesar Rp 1.838.442.619.000,- dengan rincian masing-masing program sebagai berikut :

Tabel III.1  
Proyek Sub Sektor Perhubungan Darat T.A. 2010

No.	Program	Jumlah Proyek	Pagu DIP (Rp.)
1.	Pengembangan LLAJ	40	675.573.105.000
2.	Pengembangan LLASDP	37	1.087.231.878.000
3.	Kantor Pusat dan UPT	5	105.637.636.000
Jumlah		82	1.838.442.619.000

Sumber : Setditjen Perhubungan Darat, 2010

Progres pelaksanaan APBN T.A 2010 untuk Sub Sektor Perhubungan Darat per 31 Desember 2010 adalah Realisasi Fisik sebesar 98.14 % dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.702.544.224.723,- (92.61 % dari total pagu anggaran). Rincian masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2  
Progres APBN TA. 2010 per 31 Desember 2010  
Sub Sektor Perhubungan Darat

No.	Program	Realisasi Keuangan Jumlah (Rp)	(%)	Realisasi Fisik Tertimbang(%)
1.	LLAJ	587.984.829.127	91.08	96.03
2.	LLASDP	1.022.867.626.243	94.08	99.28
3.	Kantor Pusat dan UPT	91.691.769.353	86.80	99.37
Total		1.702.544.224.723	92.61	98.14

Sumber : Setditjen Perhubungan Darat versi e-Monitoring, 2010

### 1. Pembangunan Bidang LLAJ dan Perkotaan

Program pembangunan di Bidang LLAJ, Perkotaan dan Keselamatan terdapat 13 kegiatan yang telah dilaksanakan. Program bidang LLAJ meliputi : Pengadaan Fasilitas Keselamatan LLAJ (Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan, Guadrail, Rambu Lalu Lintas, RPPJ, APIL Tenaga Surya, Traffic Light High-Flux, LED High-Flux, Warning Light, Alat PKB, Cermin Tikungan, Deliniator, dan Paku Marka), Pembangunan Terminal Penumpang, Rehabilitasi Terminal Penumpang, Pengadaan dan Peremajaan Alat Uji Tipe Kendaraan Bermotor di BLJSKB Bekasi, dll. Program bidang Perkotaan meliputi : Pengadaan Bus Perintis (Bus Besar AC BRT, Bus Sedang AC BRT, Bus Sedang Non AC), dan pemberian bantuan Converter Kit untuk angkutan umum.

Tabel III.3  
Program dan Realisasi Pembangunan LLAJ

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM	REALISASI	UNIT
1.	Pembangunan Fasilitas dan Keselamatan LLAJ			
	a. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	1.605.499	1.575.499	m <sup>1</sup>
	b. Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	59.770	59.770	m <sup>1</sup>
	c. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	9.914	9.914	Buah
	d. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	605	591	Buah
	e. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	7	7	Unit
	f. Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	149	149	Buah
	g. Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	20.630	20.630	Buah
	h. Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka	9.900	9.900	Buah
	i. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone	200	200	Buah
	j. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Hight-FLUX	14	14	Buah
	k. Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light T. Surya	46	46	Buah
	l. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	40	40	Buah
	m. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light T. Surya	18	18	Buah
2.	Pembangunan Jembatan Timbang (Riau)	1	1	Lokasi
3.	Pengadaan Alat PKB	11	11	Paket
4.	Pembangunan Terminal Penumpang	7	7	Lokasi
5.	Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas	26	25	Paket
6.	Fasilitas Keselamatan LLAJ	22	22	Paket
7.	Subsidi Operasi Bus Perintis	143	143	Lintas
8.	Pengadaan Bus Perintis	37	37	Unit

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2010

Tabel III.4  
Program dan Realisasi Pembangunan Bidang Perkotaan

No	Program/Kegiatan	Program	Realisasi
1	Pengadaan Bus Sedang Non AC	38	38
2	Pengadaan Bus Sedang AC BRT	10	10
3	Pengadaan Bus Besar AC BRT (2 Pintu)	25	25
4	Pengadaan Bus Besar AC BRT (1 Pintu)	18	18
5	Pengadaan Peralatan Gasifikasi (Converter Kit, Tabung, dll)	445	445

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat, 2010

Secara keseluruhan program LLAJ dan Perkotaan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan serta ada kegiatan yang mengalami perubahan.

- (1) Pengadaan dan pemasangan marka jalan dan RPPJ tidak sesuai target yang direncanakan.
- (2) Subsidi Operasi Bus Perintis Mengalami Perubahan Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1948/AJ.204/DRJD/2010 Tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan kedua Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4152/AJ.402/DRJD/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan

Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2010, yaitu semula trayek yang dilayani sebanyak 145 trayek di 22 propinsi menjadi 143 trayek di 22 propinsi. Perubahan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2010 adalah :

(a). Trayek Semula

No	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
1	Kalimantan Timur	Samarinda - Bongan	250
		Samarinda – Bentingan Besar	400
		Samarinda - Muara muntai	200
		Samarinda – Long Mesangat	240
		Samarinda – Muara Aloh	200
2	Sulawesi Tengah	Palu-Napu	90
		Tonusu-Gintu	70
		Palu-Matano	250
3	Jambi	Terminal Alam Barajo – Sungai Bahar (Tanjung Lebar)	110
		Bangko - Pamenang - Jelatan – TTKDA	92
		Jambi – Petaling	60
		Bangko – Tanah Garau	90
		Terminal Alam Barajo - Muara tebo - Kuamang Kuning	190
		Bangko – Air Jernih	40
		T. Alam Barajo S. Bahar – Johor (PT. Asiatic)	130
4	Sulawesi Tenggara	Kendari – Bnua	101
		Kendari – Lamonae	240
		Kendari – Sumber Sari	58
		Kendari – Mawasangka	215
		Kendari – Tondasi	170
		Kendari – Bungku	400

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2010

(b). Trayek Perubahan

No.	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
1	Kalimantan Timur	Samarinda - Bongan	250
		-	-
		Samarinda - Muara muntai	200
		-	-
		Samarinda - Muara Aloh	200
2	Sulawesi Tengah	Poso – Napu	90
		Tentena – Gintu	70
		Kolonedale – Matano	250
		Palu – Buol	556
3	Jambi	Terminal Alam Barajo – Sungai Bahar (Tanjung Lebar)	110

No.	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
		Bangko - Pamenang - Jelatan – TTKDA	92
		Jambi – Petaling	60
		Bangko – Tanah Garau	90
		-	-
		Bangko – Air Jernih	40
		-	-
4	Sulawesi Tenggara	Kendari – Bnua	101
		Kendari – Lamonae	240
		Kendari – Sumber Sari	-
		Kendari – Mawasangka	215
		Kendari – Tondasi	170
		Kendari – Bungku	400

Sumber : Dit. LLAJ. Ditjen Hubdat, 2010

## 2. Pengembangan Bidang LLASDP

Program pengembangan Bidang LLASDP terdiri dari 7 kegiatan yang meliputi : Pembangunan Dermaga Sungai, Dermaga Danau, Pelabuhan Penyeberangan, Kapal Penyeberangan, Rambu Laut/Suar, Pembangunan Bus Air, dan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis.

Tabel III.5  
Program dan Realisasi Pembangunan LLASDP

NO	PROGRAM	RENCANA	REALISASI
1	Pembangunan Dermaga Sungai		
	a. Baru	1	1
	b. Lanjutan	9	9
	c. Rehabilitasi	11	11
2	Pembangunan Dermaga Danau		
	a. Baru	-	-
	b. Lanjutan	-	-
	c. Rehabilitasi	4	4
3	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan		
	a. Baru	9	9
	b. Lanjutan	43	43
	c. Rehabilitasi	6	6
4	Pembangunan Kapal Penyeberangan		
	a. Baru	1	1
	b. Lanjutan	8	8
	c. Rehabilitasi	-	-
5	Pembangunan Bus Air	4	4
6	Rambu SBNP	5	5
7	Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis	99	99
	a. Dalam Provinsi	88	88
	b. Antar Provinsi	11	11

Sumber : Dit. LLASDP Ditjen Hubdat, 2010

Secara keseluruhan program pembangunan LLASDP dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

### C. BANTUAN LUAR NEGERI

Proyek Bantuan Luar Negeri (BLN) yang sedang berjalan (On – Going) pada tahun 2010. Kegiatan tersebut dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp. 5.000.000.000, dimana pada tahun 2010 kegiatan tersebut adalah :

#### Direktorat Keselamatan Transportasi Darat

Kegiatan TA. IBRD Road Safety Development, alokasi dana sebesar Rp. 4.045.072.000, -

## BAB IV OPERASIONAL PERHUBUNGAN DARAT

### A. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### 1. Umum

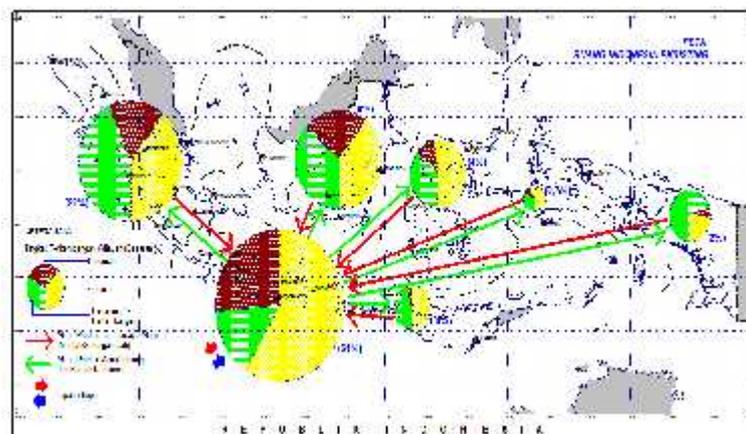
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luasan mencapai 9,8 juta km<sup>2</sup> (termasuk perairan) dan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 231,37 juta jiwa (tahun 2009).

Tabel IV.1  
Kepadatan Penduduk

Wilayah	Jumlah (Ribu jiwa)	Persentase	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )
Sumatera	49.615,4	21,1	103,2
Jawa-Bali	137.711,1	59,5	1.010,4
Kalimantan	13.065,8	5,6	24,0
Sulawesi	16.767,7	7,2	88,9
Nusa Tenggara	9.053,7	3,9	134,5
Maluku	2.314,5	1,0	29,3
Papua	2.841,4	1,2	6,0
<b>Nasional</b>	<b>231.369,6</b>	<b>100,0</b>	<b>121,1</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi 2005-2015. BPS

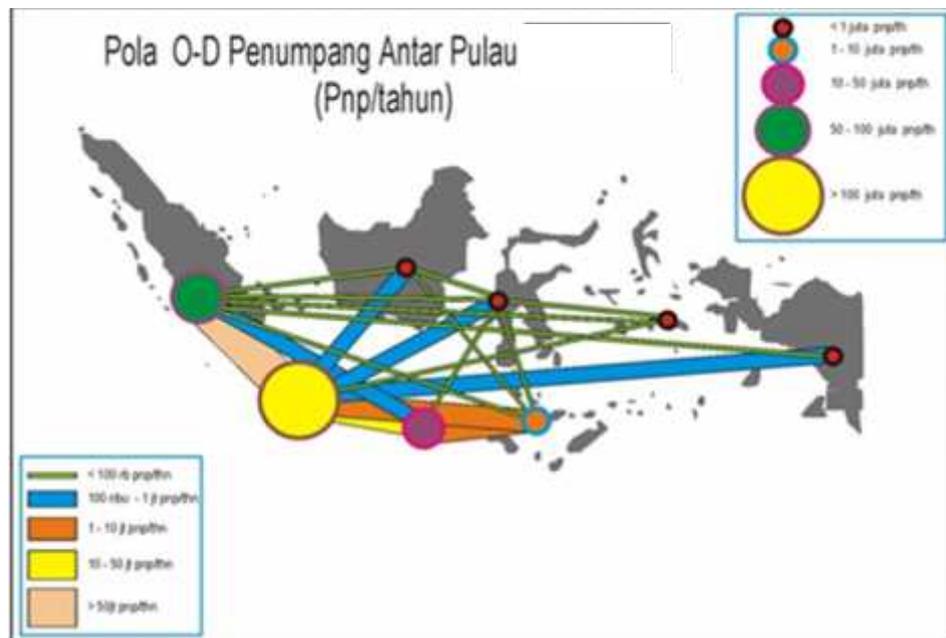
Dengan jumlah penduduk demikian besarnya, maka sangat wajar apabila perjalanan penumpang dan barang yang dibangkitkan sangat besar jumlahnya yang sangat berpengaruh pada pembangunan masing – masing daerah.



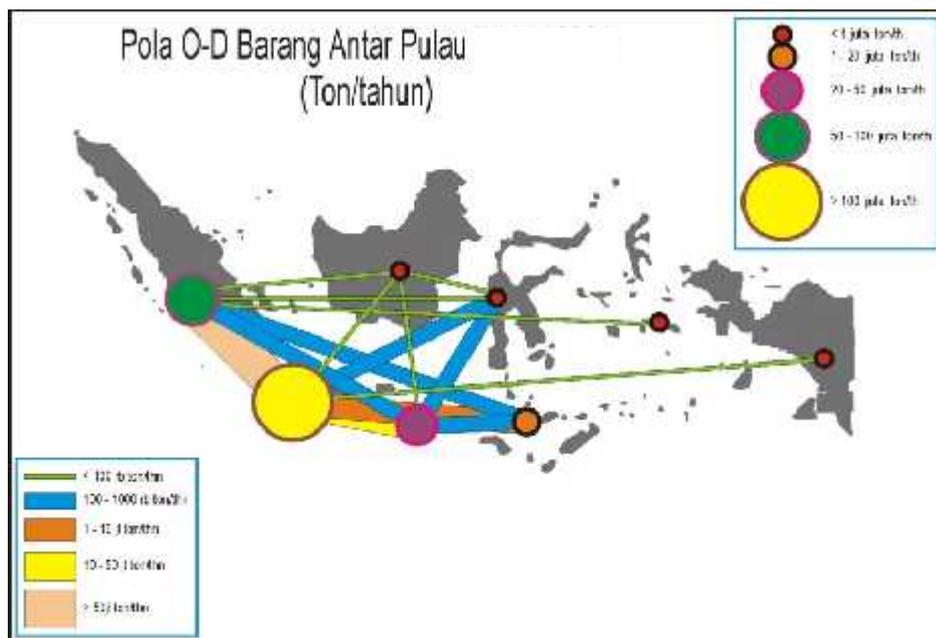
Gambar IV.1  
Tingkat Pembangunan Nasional

Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil Survei O-D Nasional (Kementrian Perhubungan), yang menunjukkan angka 3,8 milyar perjalanan penumpang per tahun untuk perjalanan antar kabupaten, yang meliputi matra darat, laut dan udara. Hal yang sama juga terjadi pada perjalanan barang yang menunjukkan angka 2,4 milyar ton per tahun untuk ketiga matra dan pada tataran antar kabupaten (belum termasuk perjalanan internal kabupaten/kota). Jumlah yang luar biasa besarnya tersebut untuk saat ini masih didominasi oleh transportasi darat dengan prosentase sebesar 99% untuk penumpang dan 97% untuk barang.

Dominasi volume perjalanan juga masih terjadi di Pulau Jawa dengan angka sebesar 2,8 milyar perjalanan atau 74% dari total perjalanan yang terjadi. Perjalanan barang antar kabupaten/kota 2,4 milyar ton/tahun. Jawa mendominasi sebesar 1,8 milyar atau 75%. Khusus untuk perjalanan penumpang di Pulau Jawa sebesar 1,2 milyar perjalanan per tahun (di luar perjalanan internal Propinsi). Apabila dilihat pada perjalanan antar gugus pulau secara total berjumlah 118 juta perjalanan/tahun diluar perjalanan internal pulau, atau hanya sebesar 3,14% dari keseluruhan total perjalanan penumpang transportasi darat (3,8 milyar perjalanan/tahun).



Gambar IV.2  
Pola Perjalan Penumpang Antar Pulau



Gambar IV.3  
Pola Perjalanan Barang Antar Pulau

Dengan melihat kondisi pergerakan lalu lintas jalan yang sangat dominan, fenomena aktual yang terjadi di masyarakat, permasalahan dan tantangan yang ada serta kondisi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diharapkan secara prospektif dapat mewujudkan suatu arah, visi, misi strategi kebijaksanaan yang lebih baik dan konsisten sehingga eksistensi Direktorat LLAJ benar-benar nyata mampu mendorong tercapainya sasaran pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan secara optimal yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi jalan pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Telah banyak upaya dan peranan yang dilaksanakan oleh Direktorat LLAJ dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah berjalan. Namun dengan merespon setiap perubahan, perkembangan dan tantangan yang ada perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan di berbagai aspek dengan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur Direktorat LLAJ pada semua lini yang lebih profesional dan berwibawa.

Dengan adanya perubahan dan perkembangan di berbagai segi seperti sosial ekonomi masyarakat, politik/pemerintahan, teknologi, globalisasi otonomi daerah akan membawa konsekwensi logis perlunya penyesuaian, perubahan, perbaikan dan penyempurnaan 'warna' organisasi Direktorat LLAJ agar dapat secara nyata lebih responsif/proaktif melaksanakan peranannya baik di dalam pembinaan, pengaturan

pengawasan dan advisory di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sehingga dengan demikian secara institusional Direktorat LLAJ dari waktu ke waktu dapat terus meningkatkan kinerjanya.

## 2. Perkembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### a. Jaringan Jalan

#### 1). Peranan Jalan

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Tabel IV.2

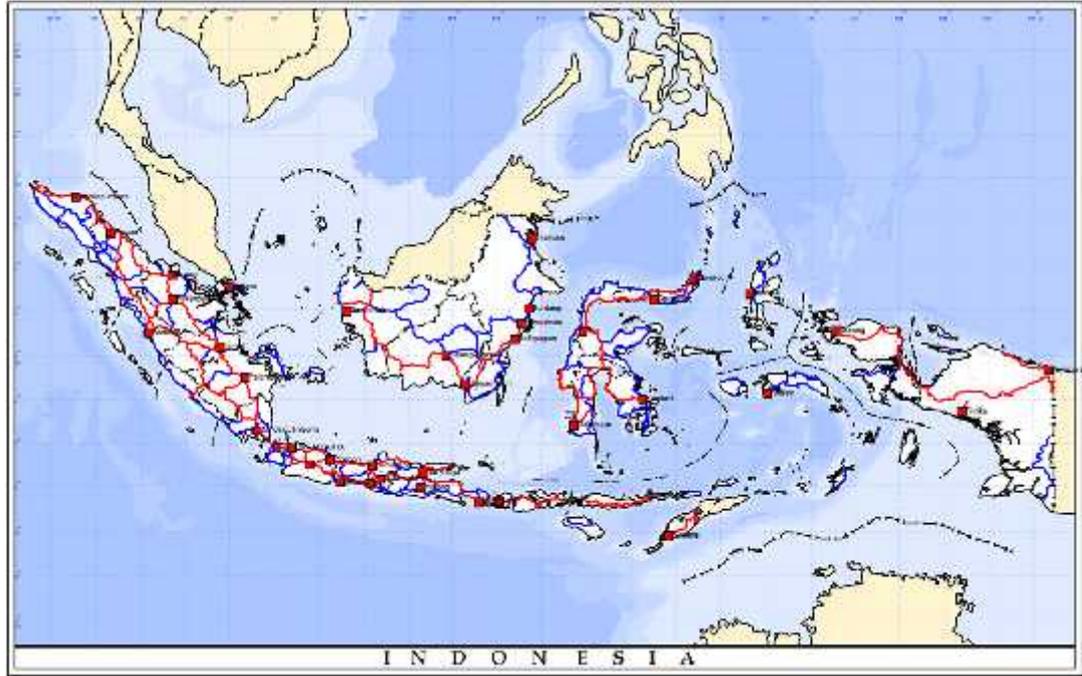
ASET JALAN & JBT NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK/LUAS WILAYAH

Pulau	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	PDRB per Tahun 2004	Jalan (Km)				Panjang Jalan (Km) (Total)	ASPEK AKSESIBILITAS	ASPEK MOBILITAS
				Tol	Nasional	Propinsi	Kabupaten		Indeks Aksesibilitas (Km/Km <sup>2</sup> )	Indeks Mobilitas (Km/1000 penduduk)
SUMATERA	48,468,345	446,732	48,894,967.60	43	10,589	16,398	99,739	126,769	0.28	2.62
JAWA	130,401,500	129,306.48	219,012,889.67	628	5,119	9,072	70,838	85,647	0.66	0.66
BALI	3,466,800	5,449.37	28,986,596.00	0	502	883	5,576	6,960	1.28	2.01
NUSA TENGGARA	8,736,700	65,847	35,532,285.00	0	1,875	4,703	18,031	24,609	0.37	2.82
KALIMANTAN	13,107,100	507,412	205,265,513.00	0	5,706	5,545	31,376	42,627	0.08	3.25
SULAWESI	16,662,032	193,847	92,010,735.00	18	7,092	7,428	41,404	55,941	0.29	3.36
MALUKU PAPUA	5,012,079	503,371	41,972,016.00	0	3,747	4,652	21,221	29,620	0.06	5.91
TOTAL	225,854,556	1,851,964	2,082,000,000	688	34,629	48,681	288,185	372,173	0.20	1.65

Sumber : Kem. Pekerjaan Umum

#### 2). Kelas Jalan

Ruas-ruas jalan di Pulau Jawa ditetapkan sebagai jalan kelas II, IIIA, IIIB, dan IIIC dengan muatan sumbu terberat jalan masing-masing adalah 10,0 ton untuk jalan kelas II dan 8 ton untuk jalan kelas IIIA, IIIB dan IIIC. Penetapan kelas jalan tersebut didasarkan atas pertimbangan ketentuan kelas jalan dan kemampuan jaringan prasarana jalan yang ada. Selain di Pulau Jawa, Penetapan Kelas Jalan di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Propinsi Bali, NTB, Maluku Utara, Papua.



Gambar IV.4  
Sistem Jaringan Jalan Nasional

3). Simpul Jaringan Transportasi Jalan Terminal Penumpang Tipe A

Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubdat No. SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 telah ditetapkan Simpul Jaringan Transportasi Jalan untuk Terminal penumpang Type A diseluruh Indonesia sebanyak 203 simpul.

b. Jaringan Trayek

1) Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Pariwisata

Sebagai titik tolak pelayanan angkutan umum antar kota antar Propinsi, Ditjen Hubdat dengan SK. No. 1200/AJ.205/DRJD/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di seluruh Indonesia. Posisi bus AKAP pada tahun 2009 sebanyak 19.811 unit bus dengan 846 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 20.802 unit bus dengan 866 perusahaan otobus. Sedangkan posisi bus pariwisata pada tahun 2009 sebanyak 11.923 unit bus dengan 852 perusahaan otobus, mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebanyak 11.933 unit bus dengan 959 perusahaan otobus

Tabel IV.3

## Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata Tahun 2010

No.	Propinsi	AKAP		Pariwisata	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	18	621	1	20
2	Sumatera Utara	41	1.185	22	165
3	Sumatera Barat	61	841	13	89
4	Riau	22	376	14	105
5	Jambi	35	501	4	26
6	Sumatera Selatan	31	559	8	52
7	Bengkulu	19	301	5	49
8	Lampung	26	565	19	163
9	Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	8	119
11	DKI Jakarta	68	3.670	106	4.339
12	Jawa Barat	116	3.789	159	1.653
13	Jawa Tengah	141	3.823	198	1.709
14	DI. Yogyakarta	28	509	42	509
15	Jawa Timur	64	1.863	167	1.035
16	Banten	47	1.013	40	670
17	Bali	12	165	131	1.083
18	NTB	10	119	4	46
19	NTT	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	3	28	13	29
21	Kalimantan Tengah	24	158	-	-
22	Kalimantan Selatan	22	155	-	-
23	Kalimantan Timur	5	74	1	2
24	Sulawesi Utara	8	50	1	2
25	Sulawesi Tengah	22	120	3	68
26	Sulawesi Selatan	32	267	-	-
27	Sulawesi Tenggara	1	8	-	-
28	Gorontalo	9	42	-	-
29	Sulawesi Barat	1	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-
Jumlah		866	20.802	959	11.933

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Jumlah Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami kenaikan, yang disebabkan diantaranya karena usaha pemerintah dalam melakukan pengalihan-pengalihan izin trayek dari perusahaan yang sudah tidak operasional kepada perusahaan lain, hal

tersebut dalam rangka banyaknya perusahaan autobus yang mengembangkan usaha angkutannya.

Sedangkan untuk angkutan pariwisata sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan hal ini dikarenakan permintaan yang terus meningkat dan jumlah pengajuan permohonan perizinan angkutan pariwisata juga bertambah.

## 2) Trayek Pengangkutan Alat Berat dan B3

Pada tahun 2010 jumlah perusahaan Pengangkutan Alat Berat yang telah disetujui sebanyak 232 perusahaan dengan jumlah kendaraan 1.005 unit kendaraan. Sedangkan untuk jumlah perusahaan angkutan B3 sebanyak 866 perusahaan dengan jumlah kendaraan sebanyak 4.299 unit kendaraan.

Tabel IV.4

Jumlah Pengangkutan Alat Berat dan B3 Tahun 2010

No.	Bulan	Alat Berat		B3	
		PO	BUS	PO	BUS
1	Januari	17	87	48	210
2	Februari	15	38	61	379
3	Maret	27	114	101	559
4	April	25	84	88	339
5	Mei	22	194	83	404
6	Juni	22	98	55	233
7	Juli	16	100	67	290
8	Agustus	21	63	113	730
9	September	12	36	46	189
10	Oktober	19	54	78	345
11	Nopember	19	56	77	378
12	Desember	17	81	49	243
Jumlah		232	1.005	866	4.299

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

## 3) Trayek Angkutan Jalan Perintis

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Sk.1948/AJ.204/DRJD/2010 Tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan kedua Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4152/AJ.402/DRJD/2009 Tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2010, yaitu semula trayek yang dilayani sebanyak 145 trayek di 22 Propinsi menjadi 143 trayek di 22 Propinsi. Perubahan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2010 adalah :

a). Trayek Semula

No.	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
1	Kalimantan Timur	Samarinda - Bongan	250
		Samarinda – Bentingan Besar	400
		Samarinda - Muara muntai	200
		Samarinda – Long Mesangat	240
		Samarinda – Muara Aloh	200
2	Sulawesi Tengah	Palu-Napu	90
		Tonusu-Gintu	70
		Palu-Matano	250
3	Jambi	Terminal Alam Barajo – Sungai Bahar (Tanjung Lebar)	110
		Bangko - Pamenang - Jelatan – TTKDA	92
		Jambi – Petaling	60
		Bangko – Tanah Garau	90
		Terminal Alam Barajo - Muara tebo - Kuamang Kuning	190
		Bangko – Air Jernih	40
		T. Alam Barajo S. Bahar – Johor (PT. Asiatic)	130
4	Sulawesi Tenggara	Kendari – Bnua	101
		Kendari – Lamona	240
		Kendari – Sumber Sari	58
		Kendari – Mawasangka	215
		Kendari – Tondasi	170
		Kendari – Bungku	400

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

b). Trayek Perubahan

No.	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
1	Kalimantan Timur	Samarinda - Bongan	250
		-	-
		Samarinda - Muara muntai	200
		-	-
		Samarinda - Muara Aloh	200
2	Sulawesi Tengah	Poso – Napu	90
		Tentena – Gintu	70
		Kolonedale – Matano	250
		Palu – Buol	556
3	Jambi	Terminal Alam Barajo – Sungai Bahar (Tanjung Lebar)	110
		Bangko - Pamenang - Jelatan – TTKDA	92
		Jambi – Petaling	60
		Bangko – Tanah Garau	90

No.	Propinsi	Trayek yang dilayani	Jarak (Km)
		-	-
		Bangko – Air Jernih	40
4	Sulawesi Tenggara	Kendari – Bnua	101
		Kendari – Lamonae	240
		Kendari – Sumber Sari	-
		Kendari – Mawasangka	215
		Kendari – Tondasi	170
		Kendari – Bungku	400

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Sedangkan untuk pengadaan jumlah bus perintis pada tahun 2009 sebanyak 78 unit bus, mengalami penurunan pada tahun 2010 sebanyak 37 unit bus atau mengalami penurunan sebesar 52,56%

#### 4) Trayek Lintas Batas Negara

Trayek lintas batas negara antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya beberapa telah ditetapkan dan dilayani dengan moda transportasi jalan dan beberapa masih dalam proses perundingan kesepakatan.

Lintas Batas Negara yang telah dilayani :

##### a). Pontianak-Kuching

Berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), sejak tanggal 2 Januari 1993 dioperasikan perusahaan dan jumlah kendaraan umum untuk trayek Pontianak-Kuching sebagai berikut:

Tabel IV.5

Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili Kuching  
untuk melayani trayek Kuching- Pontianak

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Sri Tebekang	3 eksekutif	3	32
2	Kirata	3 eksekutif	3	32
3	Saphire Pacific	3 eksekutif	3	32
4	Eva Transport	5 eksekutif	5	53
5	Sri Merah	3 eksekutif	3	66
6	Bintang Jaya Ekspres	3 eksekutif	3	32
Jumlah		20 eksekutif	20	247

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Tabel IV.6

Perusahaan kendaraan umum yang berdomisili di Pontianak  
untuk melayani trayek Pontianak-Kuching

No.	Nama Perusahaan	Mobil Bus	RIT	SEAT
1	Perum DAMRI Pontianak	7 eksekutif	7	35
2	PT. Andau Kapuas	3 eksekutif	3	36
3	PO Setia Jiwana Sakti	10 eksekutif	10	40
Jumlah		20 eksekutif	20	111

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

b). Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching

Uji coba Angkutan Lintas Batas Negara Pontianak-Bandar Sri Begawan Via Kuching dilakukan sejak tanggal 16 November 2008 dan Launcing pada tanggal 15 Januari 2009. Trayek tersebut dilayani sebanyak 16 (enam belas) unit bus ditambah 2 (dua) unit bus cadangan dengan data sebagai berikut :

- (1) Perusahaan ALBN dari Indonesia, terdapat 2 (dua) perusahaan yaitu Perum DAMRI (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan dan PO. Setia Jiwana Sakti (4 unit bus) + 1 unit kendaraan cadangan.
- (2) Perusahaan ALBN dari Bandar Seri Begawan, dengan perusahaan ADBH Sdn.Bdn (4 unit bus) dan Syakirah Murni Hajisaban TS (1 unit bus)
- (3) Perusahaan ALBN dari Kuching (Malaysia), terdapat 3 (tiga) perusahaan yaitu Syarikah Eva Ekspres (1 unit bus), Syarikah Bintang Jaya Ekspres (1 unit bus) dan Syarikah Biaramas Ekspres (1 unit bus).

c). Indonesia - Papua New Guinea (Jayapura-Vanimo) masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

Indonesia – Timor Leste masih dalam tahap pembahasan draft kesepakatan

5) Angkutan Tidak Dalam Trayek

Sesuai KM 84 Tahun 1999, disamping adanya angkutan dalam trayek terdapat pula angkutan tidak dalam trayek, meliputi: taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

6) Untuk angkutan taksi dan angkutan khusus pengaturan izin operasinya oleh Walikota untuk dalam kota dan oleh Gubernur untuk angkutan lebih dari satu

kota. Disamping mempunyai kewenangan untuk memberikan izin trayek bis AKAP, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Direktur LLAJ mempunyai kewenangan pula kewenangan untuk memberikan izin angkutan tidak dalam trayek meliputi: taxi bandara, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan khusus.

c. Terminal

Terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan.

- 1). Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal, dengan tetap memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2). Sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Simpul Terminal Tipe A dengan SK Dirjen No. 1361/AJ.106/DRJD/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Penetapan Simpul JTJ untuk terminal Penumpang Type A diseluruh Indonesia. Posisi terminal pada tahun 2009 sebanyak 545 terminal, mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebanyak 559 dengan perincian terminal yaitu tipe A sebanyak 116 terminal, tipe B sebanyak 247 terminal dan tipe C sebanyak 196 terminal.

Tabel IV.7  
Jumlah Terminal Tahun 2005 - 2010

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tipe A	120	108	108	109	115	116
Tipe B	174	187	187	185	244	247
Tipe C	134	136	136	137	186	196
TOTAL	428	431	431	431	545	559

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

### 3. Perkembangan Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### a. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pembinaan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Direktorat LLAJ. Dengan terbitnya PP No. 38 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2010 terdapat jumlah penguji sebanyak 1984 unit di 441 kabupaten/kota dengan jenis pengujian kendaraan bermotor sebanyak 492 jenis alat uji yang terdiri dari :

- 1). 347 unit uji mekanik
- 2). 285 unit uji non mekanik
- 3). 24 unit uji keliling

#### b. Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Sebagai Operasionalisasi Keputusan Menteri, pada tahun 2009 telah dikeluarkan Surat Keputusan Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor sebanyak 2.277 Surat Keputusan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel IV.8

Rekapitulasi Keputusan Dirjen Hubdat Tentang Pengesahan Dan Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Tahun 2010

No.	Keterangan	Jumlah
1	Tipe Sepeda Motor	107
2	Tipe Roda 3	11
3	Tipe Roda 4 atau Lebih	466
4	Tipe Landasan Kendaraan Bermotor	50
5	Rancang Bangun Kereta Tempelan	20
6	Rancang Bangun Kereta Gandengan	4
7	Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	1079
8	CBU Bukian Baru	540
T o t a l		2.277

Sumber : Dit. LLAJ, Ditjen Hubdat

#### c. Jembatan Timbang

Pada tahun anggaran 2009 telah dilakukan rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang di 4 (empat) lokasi yaitu Lampung, Sumedang, Cilacap, dan

Lamongan dan juga dibangun sistem informasi/konektivitas jaringan di 3 (tiga) lokasi jembatan timbang yaitu JT.Jabar, Jateng dan Jatim. Dan untuk tahun anggaran 2010 juga telah dilakukan rehabilitasi peralatan operasional jembatan timbang di 2 (dua) lokasi yaitu di Propinsi Sulawesi selatan (Macoppa) dan Sulawesi Tenggara (Kolaka). Selain itu juga pada tahun 2010 dilakukan monitoring dan penilaian terhadap kinerja jembatan timbang dan inventarisasi jembatan timbang yang berada diseluruh pulau Jawa yang hasilnya dapat dilihat pada website [www.jembatantimbang.web.id](http://www.jembatantimbang.web.id).

Tabel. IV.9

Jumlah Pelanggaran di Jembatan Timbang

Propinsi	Jumlah Ditimbang	Pelanggaran Terhadap JBI (KEND)				Tindakan		
		5 - 25 %	25 - 50 %	50 - 60 %	> 60 %	Pengembalian Kendaraan	Penurunan Muatan	Surat Tilang
BANTEN		46.259	46.515	1177		874		305
JATENG	3.003.008	295.007	342.606			27.571	5.805	33.242
DIY	33.751	3711	1508	81	340	484		572
<b>TOTAL</b>	<b>3.036.759</b>	<b>344.977</b>	<b>390.629</b>	<b>1.258</b>	340	<b>28.929</b>	5.805	<b>34.119</b>

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

#### 4. Penegakan Hukum Bidang LLAJ dan Penyidik Negeri Sipil Bidang LaLu Lintas dan Angkutan (PPNS LLAJ)

##### a. Pelanggaran Operasional

Jumlah pelanggaran operasional pada tahun 2010 sebanyak 364 kendaraan dengan 76 perusahaan otobus. Sedangkan jumlah pelanggaran perijinan, operasional dan persyaratan teknis laik jalan sebanyak 1287 pelanggaran. Untuk selengkapnya jumlah pelanggaran operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat pada table IV.10 dan IV.11

Tabel IV.10

Jumlah Pelanggaran Operasional Tahun 2010

No.	Jenis Pelanggaran	PO	Kend
1	Penyimpangan Trayek	10	50
2	Tanpa Izin Trayek/Operasi	21	100
3	Trayek Mati	14	115
4	Tanpa Buku Uji	4	40
5	Buku Uji Mati	12	14
6	Lain - lain	15	44
Jumlah		76	364

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Tabel IV.11  
Jumlah Pelanggaran Perizinan, Operasional dan Persyaratan Teknis Laik Jalan  
Tahun 2010

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Prosentase
A.	Pelanggaran Perizinan dan Operasional		
1	Dokumen perizinan palsu	6	0.46%
2	Tidak ada dokumen perizinan/Masa berlaku dokumen perizinan habis	497	38.31%
3	Nama PO tidak sesuai dengan dokumen perizinan	1	0.13%
4	Nomor kendaraan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	0	0.00%
5	Trayek yang dilayani tidak sesuai dengan dokumen perizinan	98	7.55%
6	Waktu pelayanan tidak sesuai dengan dokumen perizinan	13	1.00%
7	Belum melunasi asuransi kecelakaan Jasa Raharja	143	11.02%
8	Menggunakan izin insidentil	48	3.78%
9	Pelanggaran perizinan dan operasional lainnya	41	3.16%
B.	Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan		
1	Buku Uji Palsu	0	0.00%
2	Tidak ada buku uji/masa berlaku uji habis	176	13.56%
3	Jumlah tempat duduk tidak sesuai dengan buku uji	0	0.00%
4	Tidak ada sabuk keselamatan	20	1.54%
5	Tidak ada alat pemadam kebakaran	51	3.93%
6	Tidak ada pintu keluar darurat	47	3.62%
7	Tidak ada Petunjuk keluar darurat	53	4.08%
8	Tidak ada pemecah kaca	41	3.16%
9	Tidak ada petunjuk pemecah kaca	49	3.77%
10	Pelanggaran persyaratan Teknis dan Laik Jalan lainnya	13	1.00%
Total		1297	100.00%

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Data didapatkan dari Kegiatan Penegakan Hukum Perizinan Nasional pada Propinsi :

- Jawa Tengah
- Gorontalo
- Jambi
- Jawa Barat
- Jawa Timur
- Sulawesi Utara
- Sumatra Selatan
- Sumatra Utara
- Riau

Dan kegiatan Pengawasan Angkutan Orang dan Barang Subdit Pengendalian Operasional.

b. Pelanggaran Di Jembatan Timbang

Dengan data berasal dari wilayah Jawa Tengah Th. 2010 :

- a. Kendaraan diperiksa : 2.966.223 Unit
- b. Kendaraan yang tidak melanggar : 2.759.677 Unit
- c. Kendaraan Melanggar : 1.206.546 Unit (30,42%)
  - 1) Pelanggaran lebih muatan 5% s/d 25% dari JBI adalah 1.152.433 Unit (denda masuk Kas Daerah)
  - 2) Pelanggaran >25% dari JBI adalah 54.113 Unit diberikan surat tilang

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang LLAJ

Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2010 adalah 2.367 orang. Yang terdiri dari 57 orang PPNS yang ada di Ditjen Perhubungan Darat (pusat) dan 2.310 PPNS yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota (daerah). Untuk data PPNS daerah dapat dihimpun dari 33 Propinsi.

Tabel IV.12

Daftar PPNS Bidang LLAJ Tahun 2010

No	PROPINSI	Jumlah	No.	PROPINSI	Jumlah
1	Pusat	57	19	Kalimantan Tengah	47
2	Nangroe Aceh Darussalam	52	20	Kalimantan Selatan	17
3	Sumatera Utara	164	21	Kalimantan Barat	18
4	Kepulauan Riau	8	22	Sulawesi Selatan	53
5	Riau	78	23	Sulawesi Utara	29
6	Jambi	34	24	Sulawesi Tengah	41
7	Bengkulu	17	25	Sulawesi Barat	16
8	Bangka Belitung	21	26	Sulawesi Tenggara	11
9	Sumatera Barat	130	27	Gorontalo	19
10	Sumatera Selatan	132	28	Bali	12
11	Lampung	69	29	NTB	19
12	Banten	83	30	NTT	57
13	DKI Jakarta	117	31	Maluku	11
14	Jawa Barat	191	32	Maluku Utara	4
15	Jawa Tengah	255	33	Papua Barat	5
16	D.I Yogyakarta	110	34	Papua	41
17	Jawa Timur	434	TOTAL		2.367
18	Kalimantan Timur	15	Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat		

d. Penjatuhan Sanksi Administratif

Adapun untuk Jumlah Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif pada tahun 2010 (1431 H) sebanyak 32 unit bus dengan 22 perusahaan otobus. Untuk perincian dapat dilihat pada tabel IV.13

Tabel IV.13  
Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Tarif  
Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Jumlah Sanksi	
		PO	BUS
1	2006 (1427 H)	26	39
2	2007 (1428 H)	16	19
3	2008 (1429 H)	25	40
4	2009 (1430 H)	22	32
5	2010 (1431 H)	22	32

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

Tabel IV.14  
Rekap Penjatuhan Sanksi Angkutan Lebaran Tahun 2010  
Berdasarkan Domisili Perusahaan Angkutan AKAP

No.	Propinsi	Jumlah PO Penerima Sanksi
1	Sumatera Selatan	1
2	Lampung	2
3	Banten	2
4	DKI Jakarta	2
5	Jawa Barat	5
6	Jawa Tengah	7
7	D.I. Yogyakarta	0
8	Jawa Timur	3
9	Bali	0
10	Sulawesi Tengah	0
Total		22

Sumber : Dit.LLAJ. Ditjen Hubdat

## 5. Kegiatan-kegiatan Strategis

- a. Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident, terdiri dari kegiatan :
- 1) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ;
  - 2) Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 3) Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi /Tipe;
  - 4) Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  - 5) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- 6) Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan.
- b. Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan, terdiri dari kegiatan :
  - 1) Pembangunan Terminal Transportasi Jalan;
  - 2) Pembangunan Jembatan Timbang;
- c. Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :
  - 1) Rehabilitasi Simpul LLAJ;
  - 2) Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ;
  - 3) Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ;
  - 4) Kontingensi Bencana Alam;
  - 5) Alat Kinerja Angkutan Jalan.
- d. Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan, terdiri dari kegiatan :
  - 1) Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani;
  - 2) Pengadaan Bus Perintis;
  - 3) Paket Penunjang Operasional Keperintisan.

## 6. Permasalahan yang dihadapi

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah untuk mewujudkan wawasan nusantara. Namun dalam pelaksanaan untuk mencapai dan menciptakan visi dan misi transportasi jalan yang sesuai harapan masih sangat sulit dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi. Adapun permasalahan yang terjadi, adalah :

- a. Kendala Transportasi Wilayah Perbatasan hal ini antara lain disebabkan karena minim infrastruktur, tingginya ketidakpastian atau ketidak teraturan jadwal, Mahalnya biaya perjalanan terutama pada wilayah perbatasan, Rawan Kecelakaan, Tidak bersinerginya kebijakan dan Implementasi.



Gambar IV.5  
Petani Beras di Mamas, Sulsel dan Petani Kopi di Manggari, Flores

- b. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan perdesaan.
- c. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
  - 1) Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal karena keterbatasan fisik/peralatan, SDM dan sistem manajemen;



Gambar IV.6  
Pengawasan Jembatan Timbang

- 2) Terdapat pergeseran fungsi jembatan timbang yang cenderung untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) bukan sebagai alat pengawasan muatan lebih;
- 3) Di sepanjang 1.360 km jalan di Sumatera bagian utara, terdapat 30-40 persen kendaraan yang melanggar muatan lebih melampaui 100 persen, yang pada umumnya berasal dari perusahaan kayu/kayu lapis, pulp, semen, kelapa sawit dan batu bara; Terdapat 5.000 km jalan (di pulau Jawa dan Sumatera) yang rata-rata berkurang 50 persen umur rencananya;

- a) Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan ijin trayek angkutan umum (ijin trayek angkutan bus antarkota antarPropinsi), namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- b) Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.



- c) Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat :
  - (1) terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
  - (2) Kondisi sarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya;
  - (3) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
  - (4) Sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal;
  - (5) Penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan sistem terminal.
    - (a) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
    - (b) Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
      - i. Belum mantapnya tatanan transportasi nasional dan wilayah;

- ii. Belum tuntasnya Penyusunan Peraturan Pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan (PP sebagai peraturan pelaksana UU No. 22 Th 2009);
- iii. Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antarlembaga pemerintah di bidang LLAJ baik di pusat dan daerah;
- iv. Masalah pendidikan dan law enforcement peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan. Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- v. Belum optimalnya peran swasta dan BUMN dalam investasi/penyelenggaraan LLAJ. Sebagian besar pelayanan angkutan umum memang sudah menjadi domain swasta, peran BUMN belum diperjelas apakah hanya untuk penugasan pelayanan di lintas yang kurang komersial (angkutan perintis dan perbatasan untuk Perum Damri); sedangkan peran Perum PPD dalam sistem transportasi umum di Jakarta semakin kecil, karena semenjak desentralisasi, transportasi perkotaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- vi. Kebijakan tarif dan subsidi melalui berbagai pungutan dan "road pricing" yang belum tepat sasaran.
- vii. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- viii. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan polusi suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan

umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.

## 7. Upaya yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Road Map to Zero Overloading dengan melakukan :
  - 1). Penanganan muatan lebih melalui moderinasasi pengelolaan, rehabilitasi dan aplikasi teknologi informasi jembatan timbang;
  - 2). Menertibkan dimensi kendaraan bermuatan di jalan sesuai kebutuhan;
  - 3). Memberdayakan aparat penegak hukum yaitu PPNS baik di terminal, jembatan timbang maupun fasilitas pengawasan yang ada;
  - 4). Meningkatkan koordinasi dengan jasa penegak hukum lainnya.
- b) Penerapan sistem Quality Licensing (metode ini telah di ujicobakan dalam pemilihan operator angkutan yang memberikan pelayanan angkutan pepadu moda Bandara Soekarno-Hatta serta pemilihan operator Busway).
- c) Pembangunan transportasi jalan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost recovery), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
- d) Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial, budaya dan pertahanan, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- e) Pembangunan transportasi jalan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah.

- f) Pembangunan transportasi jalan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development).
- g) Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market failure).
- h) Pembangunan transportasi jalan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional.
- i) Pembangunan transportasi jalan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

## B. LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

### 1. Umum

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (archipelago) terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil, yang dipisahkan oleh selat – selat serta juga memiliki banyak sungai dan danau yang berpotensi untuk dilayari, tentunya Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakatnya.

Angkutan SDP memungkinkan terjadinya kegiatan interaksi sosial budaya antar daerah dan wilayah, mendukung kegiatan ekonomi (industri, perdagangan, pemasaran, pertanian, dsb), serta secara politis dapat mendukung sistem keamanan dan ketahanan nasional serta mendukung terwujudnya kesatuan ekonomi dan politik wilayah nasional Indonesia.

ASDP sebagai penyelenggara jasa angkutan umum mempunyai fungsi dan peran menyediakan jasa angkutan kendaraan (barang) dan penumpang, baik secara inter moda maupun intra moda transportasi. Khusus jasa angkutan penyeberangan, pada awalnya mempunyai fungsi menghubungkan jalur transportasi jalan raya ataupun kereta api yang terputus oleh adanya perairan danau, sungai, dan selat, sehingga dulu sering disebut jembatan penyeberangan. Tetapi di era sekarang fungsi

penyeberangan telah berubah menjadi moda transportasi perairan dengan jarak tidak terbatas, tetapi pada umumnya masih bersifat point to point services.

Angkutan Sungai dan Danau diperlukan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh moda angkutan lainnya. Disamping itu angkutan sungai dan danau juga dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang relatif besar.

Peranan angkutan sungai dan danau telah nyata dirasakan oleh masyarakat di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian. Namun potensi angkutan sungai dan danau yang sesungguhnya jauh lebih besar, belum dimanfaatkan pada saat ini. Oleh karena itu, kebijakan umum bidang angkutan sungai dan danau diarahkan untuk mengembangkan potensi angkutan sungai dan danau sebagai salah satu moda transportasi darat yang dapat menghubungkan pelosok daratan, dengan mewujudkan keselamatan, dan menciptakan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang tertib lalu lintas dan administrasi.

## 2. Perkembangan Prasarana LLASDP

### a. Perkembangan Jumlah Lintas Penyeberangan

Sejak pertama kali ditetapkannya lintas penyeberangan pada tahun 1989, melalui Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 64 Tahun 1989, sebanyak 44 lintas penyeberangan, sampai saat ini telah menjadi sebanyak 192 lintas penyeberangan, ditambah dengan 43 lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) setelah era otonomi daerah. Sehingga jumlah total lintas penyeberangan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 235 lintas penyeberangan. Sedangkan lintasan yang beroperasi pada tahun 2010 sebanyak 140 lintasan dan yang belum/tidak beroperasi sebanyak 90 lintasan. Dari sisi pengoperasiannya, sebanyak 40 lintas adalah berupa lintas penyeberangan dengan angkutan komersil dan sisanya sebanyak 99 lintasan berupa lintas penyeberangan angkutan perintis.

Tabel IV.15

## Kondisi Perkembangan Lintas Penyeberangan

No.	Status Operasional Lintas	Jumlah
1.	Jumlah lintas yang ditetapkan	
	a. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan	192
	b. Melalui Keputusan Pemerintah Daerah	43
2.	Status pengoperasian	
	a. Lintasan yang beroperasi	140
	b. Lintasan yang belum dan tidak beroperasi	90
3.	Jenis Pengoperasian angkutan	
	a. Lintas penyeberangan dengan angkutan komersil	40
	b. Lintas penyeberangan dengan angkutan perintis	99

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Tabel IV.16

Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh  
Menteri Perhubungan

No.	No. KM	Tahun	Jumlah Lintas
1	KM No. 64	1989	44
2	KM No. 25	1991	21
3	KM No. 49	1994	23
4	KM No. 33	1995	10
5	KM No. 1	1997	8
6	KM No. 13	1997	26
7	KM No. 30	1998	18
8	KM No. 43	1998	1
9	KM No. 82	1998	12
10	KM No. 66	2000	5
11	KM No. 1	2001	4
12	KM No. 58	2002	1
13	KM No. 16	2003	1
14	KM No. 71	2004	3
15	KM No. 76	2004	1
16	KM No. 38	2005	4
17	KM No. 48	2005	1
18	KM No. 69	2005	1
19	KM No. 44	2009	1
20	KP. No. 325	2009	1
21	KP. No. 436	2009	1
22	KM No. 160	2010	1
23	KM No. 213	2010	2
24	KP. No. 265	2010	1
25	KM No. 370	2010	1
Jumlah			192

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Tabel IV.17  
Lintas Penyeberangan yang ditetapkan oleh  
Gubernur/Bupati/Walikota

No.	Nama Lintas	Propinsi
1.	Singkil - P. Banyak	NAD
2.	Singkil – Sinabang	NAD
3.	Balohan – Ulheu Lheu	NAD
4.	Tebas Kuala - Tebas Seberang	Kalimantan Barat
5.	Parit Sarem – S. Nipah	Kalimantan Barat
6.	Pamatat – Patumbukan – Labuhan Bajo	Sulsel – NTT
7.	Bira – Sikeli	Sulawesi Selatan
8.	Sikeli – Tondasi	Sulawesi Selatan
9.	Wakai – Ampana	Sulawesi Tengah
10.	Bitung-Siau	Sulawesi Utara
11.	Dongkala – Bau Bau	Sulawesi Tenggara
12.	Bau Bau – Mawasangka	Sulawesi Tenggara
13.	Aimere – Waingapu	NTT
14.	Waingapu – Sabu	NTT
15.	Kalabahi – Lewoleba	NTT
16.	Saumlaki – Tepa	Maluku
17.	Dobo – Benjina	Maluku
18.	Tulehu – Pelauw	Maluku
19.	Umiputih – Waley	Maluku
20.	Tulehu – Saparua	Maluku
21.	Saparua - Nalahia	Maluku
22.	Nalahia - Amahai	Maluku
23.	Hunimua – Masohi	Maluku
24.	Namlea - Ambalau	Maluku
25.	Ambalau - Wamsisi	Maluku
26.	Wamsisi – Namrole	Maluku
27.	Namrole - Leksula	Maluku
28.	Ternate – Bacan	Maluku Utara
29.	Ternate - Batang Dua	Maluku Utara'
30.	Sorong – Seget	Irian Jaya Barat
31.	Seget – Seremuk	Irian Jaya Barat
32.	Seremuk – Konda	Irian Jaya Barat
33.	Konda – Teminabuan	Irian Jaya Barat
34.	Mogim – Kais	Irian Jaya Barat
35.	Kais – Inawatan	Irian Jaya Barat
36.	Inawatan – Kokoda	Irian Jaya Barat
37.	Bade - Mur – Kepi	Irian Jaya Barat
38.	Waren – Nabire	Papua
39.	Merauke – Atsy	Papua
40.	Atsy – Asgon	Papua
41.	Atsy – Senggo	Papua

No.	Nama Lintas	Propinsi
42.	Atsy – Agat	Papua
43.	Biak – Numfor	Papua

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Berdasarkan jenis pengoperasian, lintas penyeberangan yang sudah beroperasi dapat dibedakan dalam 2 lintas, yaitu : lintasan komersil dan perintis yang disubsidi pemerintah. Untuk jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi sebanyak 139 lintasan yang terdiri dari lintasan komersil sebanyak 40 lintas dan lintasan perintis sebanyak 99 lintas.

Tabel IV.18

Jenis Pengoperasian Angkutan Penyeberangan

No.	Jenis Pengoperasian	Jumlah
a.	Lintasan komersil	40
b.	Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah	99
Jumlah yang beroperasi		139

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

1). Lintasan Komersil

Pada tahun 2010, lintas komersil sebanyak 40 lintas penyeberangan dengan rincian status yaitu : Antar Propinsi (AP) sebanyak 11 lintas dan Dalam Propinsi (DP) sebanyak 29 lintas.

Tabel IV.19

Lintas Penyeberangan Komersil

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klasifikasi Lintas	SK Penetapan Lintas
1	Balohan (P.Sabang/DI Aceh) – Ulheulheu (DI Aceh)	17	DP	-
2	Labuhan Haji (D.I. Aceh)-Sinabang (P. Semeulue,D.I. Aceh)	80	DP	KM 82 Thn 1998
3	Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1	DP	KM 64 Thn 1989
4	Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86	DP	KM 64 Thn 1989
5	Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8	DP	KM 25 Thn 1991
6	T. Pungkur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10	DP	KM 64 Thn 1989
7	Palembang (Sumsel) – Muntok (P. Bangka, Babel)	90	AP	KM 43 Thn 1998
8	Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15	AP	KM 64 Thn 1989
9	Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2.5	DP	KM 64 Thn 1989
10	Jangkar (Jatim) – Kalianget (P. Madura, Jatim)	44	DP	KM 64 Thn 1989
11	Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6	DP	KM 64 Thn 1989
12	Gresik (Jatim) – Bawean (P. Bawean, Jatim)	80	DP	KM 25 Thn 1991
13	Kalianget (P. Madura, Jatim) - P. Kangean (Jatim)	96	DP	KM 49 Thn 1994
14	Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80	DP	KM 64 Thn 1989
15	Pontianak Kota (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0.8	DP	KM 49 Thn 1994

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Jarak Lintas (mil)	Klasifikasi Lintas	SK Penetapan Lintas
16	Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6	DP	KM 49 Thn 1994
17	Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6	DP	KM 64 Thn 1989
18	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184	AP	KM 49 Thn 1994
19	Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Maluku)	148	AP	KM 25 Thn 1991
20	Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95	AP	KM 25 Thn 1991
21	Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	16	DP	KM 64 Thn 1989
22	Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85	AP	KM 64 Thn 1989
23	Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52	AP	KM 13 Thn 1997
24	Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	-	AP	KM 71 Thn 2004
25	Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	16	DP	KM 64 Thn 1989
26	Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2	DP	KM 64 Thn 1989
27	Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38	AP	KM 64 Thn 1989
28	Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12	DP	KM 64 Thn 1989
29	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75	AP	KM 64 Thn 1989
30	Kupang (P. Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40	DP	KM 64 Thn 1989
31	Kupang (P. Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	-	DP	KM 64 Thn 1989
32	Kupang (P. Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120	DP	KM 64 Thn 1989
33	Kupang (P. Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137	DP	KM 64 Thn 1989
34	Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150	DP	KM 82 Thn 1998
35	Bastiong (P. Ternate, Maluku)-Sidangole (P. Halmahera, Maluku)	12	DP	KM 64 Thn 1989
36	Bastiong (P. Ternate, Maluku) - Rum (Tidore, Maluku)	16	DP	KM 82 Thn 1998
37	Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0.5	DP	KM 64 Thn 1989
38	Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13	DP	KM 64 Thn 1989
39	Tual (P. Kei Kecil, Maluku) – Elat (P. Kei Besar, Maluku)	26	DP	KM 25 Thn 1991
40	Garongkong (Sulsel) – Paciran (Jatim)	-	AP	KP. 436 Thn 2009

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat ,

## 2). Lintasan perintis yang disubsidi pemerintah

Lintas penyeberangan perintis pada tahun 2010 sejumlah 100 lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan yang disubsidi pada tahun 2010 ini lebih banyak dibandingkan tahun 2009 sebanyak 86 lintas. Lintas penyeberangan perintis ini merupakan lintas Antar Propinsi (AP) dan Dalam Propinsi (DP). Pada tahun 2010 terdapat 11 lintas penyeberangan perintis antar Propinsi dan 89 lintas dalam Propinsi.

Tabel IV.20  
Lintas Penyeberangan Bersubsidi

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klasifikasi Lintas	Keterangan
1	Singkil - P. Banyak	DP	Subsidi Pusat
2	Singkil - Sinabang	DP	Subsidi Pusat
3	Singkil - Gunung Sitoli	AP	Subsidi Pusat
4	Ulee Lheu - Lamteng	DP	Subsidi Daerah
5	Sibolga - Teluk Dalam	DP	Subsidi Pusat
6	Teluk Dalam - P. Telo	DP	Subsidi Pusat
7	Padang - Sikakap	DP	Subsidi Pusat
8	Padang - Siberut	DP	Subsidi Pusat
9	Karimun - Mengkapan	AP	Subsidi Pusat
10	Bengkulu - Enggano	DP	Subsidi Pusat
11	Sadai - Tanjung Ru	DP	Subsidi Pusat
12	Jejara - Karimun Jawa	DP	Subsidi Pusat
13	Tj. Harapan - Teluk Kalong	DP	Subsidi Pusat
14	Parit Sarem - Sungai Nipah	DP	Subsidi Pusat
15	Bitung - Melonguane	DP	Subsidi Pusat
16	Bitung - Pananaru	DP	Subsidi Pusat
17	Pananaru - Marore	DP	Subsidi Pusat
18	Bitung - Siau	DP	Subsidi Pusat
19	Bitung - Lembeh	DP	Subsidi Pusat
20	Luwuk - Salakan	DP	Subsidi Pusat
21	Salakan - Banggai	DP	Subsidi Pusat
22	Kendari - Lenggara	DP	Subsidi Pusat
23	Bau Bau - Dongkala	DP	Subsidi Pusat
24	Dongkala - Mawasangka	DP	Subsidi Pusat
25	Ende - Waingapu	DP	Subsidi Pusat
26	Waingapu - Sabu	DP	Subsidi Pusat
27	Waingapu - Aimere	DP	Subsidi Pusat
28	Larantuka - Waiwerang	DP	Subsidi Pusat
29	Waiwerang - Lewoleba	DP	Subsidi Pusat
30	Lewoleba - Baranusa	DP	Subsidi Pusat
31	Baranusa - Kalabahi	DP	Subsidi Pusat
32	Kalabahi - Teluk Gurita	DP	Subsidi Pusat
33	Kupang - Lewoleba	DP	Subsidi Pusat
34	Kupang - Ende	DP	Subsidi Pusat
35	Tolehu - Kailolo	DP	Subsidi Pusat
36	Kailolo - Umiputih	DP	Subsidi Pusat
37	Umiputih - Wailey	DP	Subsidi Pusat
38	Tolehu - Umiputih	DP	Subsidi Pusat
39	Umiputih - Nalahia	DP	Subsidi Pusat
40	Nalahia - Amahai	DP	Subsidi Pusat

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klasifikasi Lintas	Keterangan
41	Namlea - Sanana	AP	Subsidi Pusat
42	Sanana - Mangole	DP	Subsidi Pusat
43	Mangole - Bobong	DP	Subsidi Pusat
44	Galala - Ambalauw	DP	Subsidi Pusat
45	Ambalauw - Wamsisi	DP	Subsidi Pusat
46	Wamsisi - Namrole	DP	Subsidi Pusat
47	Namrole - Leksula	DP	Subsidi Daerah
48	Tual - Larat	DP	Subsidi Pusat
49	Tual - Tayandu	DP	Subsidi Pusat
50	Tayandu - Kur	DP	Subsidi Pusat
51	Tual - Dobo	DP	Subsidi Pusat
52	Dobo - Benjina	DP	Subsidi Pusat
53	Dobo - Tabarfane	DP	Subsidi Pusat
54	Tabarfane - Jerol	DP	Subsidi Pusat
55	Saumlaki - Adaut	DP	Subsidi Pusat
56	Adaut - Seira	DP	Subsidi Pusat
57	Seira - Wunlah	DP	Subsidi Pusat
58	Wunlah - Larat	DP	Subsidi Pusat
59	Saumlaki - Tepa	DP	Subsidi Pusat
60	Tobelo - Daruba	DP	Subsidi Pusat
61	Tobelo - Subaim	DP	Subsidi Pusat
62	Bastiong - Babang	DP	Subsidi Pusat
63	Bastiong - Batang 2	DP	Subsidi Pusat
64	Goto - Sofifi	DP	Subsidi Pusat
65	Sorong - Saonek	DP	Subsidi Pusat
66	Saonek - Waisai	DP	Subsidi Pusat
67	Waisai - Kabarai	DP	Subsidi Pusat
68	Sorong - Linmalas	DP	Subsidi Pusat
69	Linmalas - Waigama	DP	Subsidi Pusat
70	Sorong - Folley	DP	Subsidi Pusat
71	Folley - Harapan Jaya	DP	Subsidi Pusat
72	Sorong - Seget	DP	Subsidi Pusat
73	Seget - Seremuk	DP	Subsidi Pusat
74	Seremuk - Konda	DP	Subsidi Pusat
75	Konda - Teminabuan	DP	Subsidi Pusat
76	Teminabuan - Mugim	DP	Subsidi Pusat
77	Mugim - Kais	DP	Subsidi Pusat
78	Kais - Inanwatan	DP	Subsidi Pusat
79	Inanwatan - Kokoda	DP	Subsidi Pusat
80	Biak - Serui	DP	Subsidi Pusat
81	Serui - Waren	DP	Subsidi Pusat

No.	Nama Lintasan (Lokasi)	Klasifikasi Lintas	Keterangan
82	Waren - Nabire	DP	Subsidi Pusat
83	Merauke - Tanah Merah	DP	Subsidi Pusat
84	Bade - Kapi	DP	Subsidi Pusat
85	Balikpapan - Taipa	AP	Subsidi Pusat
86	Toli - Toli - Tarakan	AP	Subsidi Pusat
87	Bira - Pattumbukan	DP	Subsidi Pusat
88	Pattumbukkan - Jampea	DP	Subsidi Pusat
89	Jampea - Labuhan Bajo	AP	Subsidi Pusat
90	Gorontalo - Wakai	AP	Subsidi Pusat
91	Wakai - Ampana	AP	Subsidi Pusat
92	Biak - Numfor	DP	Subsidi Pusat
93	Numfor - Manokwari	AP	Subsidi Pusat
94	Biak - Manokwari	AP	Subsidi Pusat
95	Batu Licin - Garongkong	AP	Subsidi Pusat
96	Boniton - Banggai	DP	Subsidi Pusat
97	Banggai - Taliabu	AP	Subsidi Pusat
98	Taliabu - Sanana	DP	Subsidi Pusat
99	Melonguane - Mangarang	DP	Subsidi Pusat

Keterangan : AP : Antar Propinsi, DP : Dalam Propinsi, DK : Dalam Kab/Kota  
Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat 2010

#### b. Pelabuhan Penyeberangan

Sampai tahun 2010, jumlah pelabuhan penyeberangan yang telah beroperasi sebanyak 141 pelabuhan. Pelabuhan tersebut diselenggarakan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebanyak 34 pelabuhan, Dinas Perhubungan sebanyak 104 pelabuhan, UPT Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 3 pelabuhan. Dan sisanya sebanyak 32 pelabuhan belum ditetapkan karena masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

Tabel IV.21

#### Perkembangan Pelabuhan Penyeberangan

No.	Penyelenggara	Jumlah
1.	PT. ASDP Persero	34
2.	Dinas Perhubungan	104
3.	UPT Ditjen Perhubungan Darat	3
4.	Dalam Proses Pembangunan	32
Jumlah		173

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Tabel IV.22

Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan oleh PT. ASDP

No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani	No.	Pelabuhan	Lintas yang dilayani
1.	Bakauheni	Merak-Bakauheni	18.	Batu Licin	Batulicin-Tj. Serdang
2.	Merak	Idem	19.	Tj. Serdang	Idem
3.	Ujung	Ujung-Kamal	20.	Penajam	Penajam-Kariangau
4.	Kamal	Idem	21.	Bitung	Bitung-Ternate
5.	Ketapang	Ketapang-Gilimanuk	22.	Pagimana	Pagimana-Gorontalo
6.	Gilimanuk	Idem	23.	Mamuju	Mamuju-Balikpapan
7.	Padangbai	Padangbai-Lembar	24.	Bajoe	BajoE-Kolaka
8.	Lembar	Idem	25.	Kolaka	Idem
9.	Khayangan	Kahayangan-Pototano	26.	Bastiong	Bastiong-Sidangole
10.	Pototano	Idem	27.	Sidangole	Idem
11.	Sape	Sape – Labuhan Bajo	28.	Bastiong	Bastiong-Rum
12.	Labuhan Bajo	Idem	29.	Pokka	Pokka-Galala
13.	Larantuka	Larantuka-Kalabahi	30.	Galala	Idem
14.	Rote	Kupang-Rote	31.	Hunimua	Hunimua-Waipirit
15.	Bolok	Kupang-Rote Dsn	32.	Waipirit	Idem
16.	Telaga Pungkur	Telaga Pungkur–Tj. Uban	33.	Namlea	Namlea-Galala
17.	Tj. Uban	Idem	34.	Muntok	Palembang-Muntok

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

## c. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan transportasi sungai dan danau meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan pelayanan angkutan barang. Kedua jaringan tersebut dapat dilakukan dalam trayek tetap, trayek tidak tetap dan tidak dalam trayek.

Tabel IV.23

Jumlah Alur Pelayaran Sungai dan Danau

No.	Propinsi	Sungai			Danau	
		Jml	Pjg (km)	Navigable	Jml	Luas (km2)
1	NAD	10	1.749	660	1	490
2	Sumatera Utara	20	1.796	1.269	1	1.250
3	Sumatera Barat	-	-	-	4	391
4	Riau	21	2.747	2.082	-	-
5	Jambi	19	3.858	2.578	1	50
6	Sumatera Selatan	35	4.856	3.771	1	122
7	Lampung	8	695	530	-	-
8	Jawa Barat	1	122	22	3	205
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	600
10	Jawa Timur	1	500	39	-	-
11	Bali	-	-	-	2	190
12	Kalimantan Barat	11	1.227	760	-	-

13	Kalimantan Selatan	15	1.737	1.223	1	40
14	Kalimantan Timur	17	4.089	2.786	3	390
15	Kalimantan Tengah	21	3.108	2.285	-	-
16	Sulawesi Selatan	9	548	222	4	120
17	Sulawesi Tengah	-	-	-	1	34
18	Sulawesi Tenggara	2	175	87	-	-
19	Sulawesi Utara	-	-	-	2	33
20	Irian Jaya	24	734	4.940	3	372
	Jumlah	214	34.342	23.255	27	3.737

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

d. Dermaga Sungai dan Danau.

Jumlah dermaga sungai dan danau lebih kurang 82 buah, yang terdiri dari beberapa jenis; seperti dermaga kayu, dermaga beton, dermaga ponton dan kombinasi dari kayu dan ponton, kombinasi beton dan ponton. Disamping itu masih banyak terdapat dermaga kecil sebagai tempat singgah.

### 3. Perkembangan Sarana LLASDP

a. Perkembangan Jumlah Kapal Penyeberangan

Sampai dengan tahun 2010 terdapat 221 unit kapal SDP yang beroperasi dengan jenis kapal yaitu Ro-Ro, LCT, dan kapal cepat penumpang.

Tabel IV.24

Jumlah Kapal SDP yang beroperasi

No.	Jenis Kapal	Jumlah
1.	Kapal Ro-Ro	210
2.	Kapal LCT	8
3.	Kapal cepat penumpang	3
4.	Kapal penumpang/bus air	-
Jumlah		221

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Sedangkan untuk jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi berdasarkan kepemilikan sebanyak 221 unit, pemilik/operatornya adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kerja Sama Operasi (KSO), swasta dan Pemda.

Tabel IV.25  
Jumlah Kapal Penyeberangan yang beroperasi  
berdasarkan kepemilikan

No.	Pemilik/operator	Jumlah
1.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	95
2.	Kerja Sama Operasi (KSO)	-
3.	Swasta	121
4.	Pemda	5
Jumlah		221

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Subsidi kapal perintis pada tahun 2010 sebesar Rp. 101.550.000.000,- dengan jumlah lintas penyeberangan sebanyak 100 lintas dan total frekuensi penyeberangan 19.523 trip.

Tabel IV.26  
Subsidi Kapal Perintis Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah Lintas Penyeberangan Perintis	Total Frekuensi Penyeberangan	Nilai Subsidi (Juta Rupiah)
2005	64	23.022	46.334
2006	62	14.160	73.208
2007	72	26.491	85.799
2008	72	24.869	85.303
2009	82	28.779	139.874
2010	100	19.523	101.550

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Tabel IV.27  
Jenis dan Karakteristik Kapal Sungai

No.	Jenis	Isi Kotor (m <sup>3</sup> )	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (km/j)
			Brg(ton)	Penump.			
1	Speed Boat	1-5	-	<14	0,35-0,60	<200	<40
2	Long Boat	5-10	-	<60	0,40-0,60	<85	20-30
3	Bis Air	<200	<10	<200	0,80-1,50	75-100	12-15
4	Klotok	<15	<5	-	0,50-0,65	5-15	7-12
5	Truk Air	15-200	20-70	-	1,00-1,60	22-33	7-8
6	Barge Steel Hull	50-190	50-150	-	1,00-1,60	-	-
7	Barge (tiung)	20-50	15-35	-	1,00-1,60	-	-
8	Tug Boat	20-50	-	-	0,80-1,40	<100	30-60

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

Tabel IV.28

## Jenis dan Karakteristik Kapal Penyeberangan

No.	Kapal RO-RO	Kapasitas Angkut		Draft (m)	Tenaga (hp)	Kec. (knot)
		Kndrn	Penump.			
1	75 GT	4	50	1,9	350	10
2	200 GT	5	50	1,9	700	10
3	300 GT	15	80	2,0	1200	7
4	500 GT	19	202	2,15	1600	11
5	600 GT	21	214	2,15	1650	10
6	1500 GT	32	390	2,8	3200	15

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

## 4. Perkembangan Kinerja Angkutan Penyeberangan

## a. Produksi Angkutan Penyeberangan

Tabel IV.29

## Produksi Angkutan Penyeberangan Tahun 2005 – 2010

Tahun	Penumpang (orang)	Kend R-4 (unit)	Kend R-2 (unit)	Barang (ton)
2005	26.501.889	6.272.819	4.719.152	25.187.160
2006	27.829.666	5.738.196	5.037.859	25.422.005
2007	40.557.832	5.720.396	6.154.104	31.936.937
2008	46.926.166	6.850.114	7.374.333	41.079.174
2009	54.585.603	6.224.249	6.799.229	41.802.355
2010	36.525.720	8.040.808	4.910.551	210.889

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

## b. Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas

Tabel IV.30

## Produksi Angkutan Penyeberangan Komersil Seluruh Lintas Tahun 2010

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
1	Merak - Bakauheni	54,339	16,384,345	519,417	2,912,205	0
	Merak - Bakauheni (Kapal Cepat)	1,636	116,292	0	0	0
2	Ujung - Kamal	37,089	3,916,748	1,634,344	1,898,419	2,282
3	Ketapang - Gilimanuk	126,019	11,188,940	1,007,940	1,710,023	0
4	Padangbai - Lembar	14,064	1,432,606	209,027	221,811	0
5	Kayangan - Pototano	21,231	48,660	190,467	378,297	0
6	Balikpapan - Penajam	28,426	121,324	229,616	421,355	0
7	Balikpapan - Mamuju	0	0	0	0	0
8	Bajo'e - Kolaka	2,544	473,101	27,093	44,671	0

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
9	Palembang - Muntok	2,065	86,474	11,850	26,294	0
10	Jangkar - Kalianget	0	0	0	0	0
11	Bira - Pamatata	1,312	24,551	29,834	20,046	0
12	Siwa - Lasusua	433	18,249	2,203	4,521	0
13	Poka - Galala	6,249	85,536	57,745	10,339	0
14	Hunimua - Waipirit	5,778	236,430	128,794	29,736	0
15	Galala - Namlea	311	17,518	2,798	687	0
16	Kupang - Larantuka	109	19,292	1,955	917	0
17	Kupang - Rote	362	42,038	15,261	3,355	0
18	Kupang - Sabu	158	33,283	4,631	367	0
19	Kupang - Aimere	85	19,211	1,986	425	0
20	Kupang - Kalabahi	190	59,291	4,684	465	0
21	Kupang - Waingapu	189	8,509	793	279	0
22	Sibolga - Gunung Sitoli (P. Nias)	653	169,647	7,781	8,695	0
23	Balohan - Ulheu lheu	1,057	293,608	78,214	23,564	42,123
24	Kota - Siantan	0	0	0	0	0
25	Rasau Jaya - Teluk Batang	0	0	0	0	0
26	Batu Licin - Tanjung Serdang	18,441	92,760	266,349	151,130	0
27	Bau Bau - Wara	5,519	419,543	162,126	46,526	70,962
28	Torobulu - Tampo	2,111	215,084	64,641	21,069	33,650
29	Pagimana - Gorontalo	344	86,618	5,634	2,775	0
30	Sape - Labuhan Bajo	801	49,824	3,913	8,987	5,608
31	Bitung - Ternate (Bastiong)	2,494	248,383	66,464	25,950	4,450
32	Bastiong - Sidangole	370	19,844	4,649	2,922	267
33	Bastiong - Rum (P. Tidore)	1,336	76,393	31,386	12,573	0
Jumlah I **		335,715	36,004,102	4,771,595	7,988,403	159,342

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat \*\* : Tidak termasuk produksi kapal cepat

### c. Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis Seluruh Lintas

Tabel IV.31

#### Produksi Angkutan Penyeberangan Perintis Seluruh Lintas Tahun 2010

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
Lintas Perintis Antar Propinsi						
1	Balikpapan - Taipa	181	7,555	480	1,620	0
2	Tarakan - Toli Toli	76	5,752	158	28	0
3	Singkil - Gn. Sitoli	18	271	16	18	0
4	Pattumbukan - Labuhan Bajo	84	291	29	5	0
5	Gorontalo - Wakai	170	16,648	612	92	0
6	Numfor - Manokwari	88	11,463	173	10	0
7	Biak - Manokwari	258	28,111	785	102	0
8	Bira - Labuhan Bajo	82	4,155	647	147	0

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
9	Jampea – Labuhan Bajo	84	889	54	0	0
Lintas Perintis Dalam Propinsi						
1	Ulee Lheu - Lamteng	263	997	292	358	495
2	Singkil - P. Banyak	98	8,015	1,178	269	0
3	Singkil - Sinabang	180	13,813	1,366	2,548	11,454
4	Sibolga - Teluk Dalam	168	12,296	432	2,619	0
5	Teluk Dalam - P. Telo	84	4,589	280	86	0
6	Padang - Siberut	46	3,899	300	19	0
7	Padang - Sikakap	104	9,747	517	99	0
8	Karimun – Mengkapan	190	10,494	650	1,105	0
9	Bengkulu - P. Enggano	154	6,999	1,582	244	250
10	Sadai - Tanjung Ru	141	1,283	125	679	0
11	Jepara - Karimunjawa	263	56,850	7,143	1,325	1,206
12	Batulicin - Garongkong	80	6,794	568	267	0
13	Parit Sarem - S. Nipah	4,708	0	15,986	998	0
14	Tanjung Harapan - Teluk Kalong	8,096	17,106	57,158	30,326	25,543
15	Bira - Patumbukan	83	4	1	0	0
16	Bira - Jampea	83	1,451	276	28	0
17	Patumbukan - Jampea	84	3,452	2,158	101	0
18	Luwuk - Salakan	422	18,178	7,812	2,354	0
19	Salakan - Banggai	16	179	30	29	0
20	Kendari – Lenggara (P. Wowoni)	668	22,883	3,677	151	79
21	Bau Bau - Dongkala	288	16,367	2,094	73	7
22	Dongkala - Mawasangka	288	9,475	1,927	281	121
23	Boniton - Banggai	137	8,980	6,622	339	0
24	Banggai - Taliabu	128	1,760	108	3	0
25	Taliabu - Sanana	124	1,328	25	0	0
26	Bitung - Melonguane	90	9,377	370	354	0
27	Bitung - Siau	170	4,925	200	135	3,270
28	Bitung - Pananaro	96	3,193	192	536	0
29	Pananaro - Marore	44	2	0	0	0
30	Wakai - Ampana	170	12,719	961	157	0
31	Waingapu - Aimere	43	2,981	294	127	0
32	Waingapu - Sabu	46	2,056	120	36	0
33	Ende - Waingapu	2	47	3	3	0
34	Kupang - Ende	44	6,691	728	58	0
35	Kupang - Lewoleba	5	514	44	7	0
36	Larantuka - Lewoleba	66	170	21	141	0
37	Larantuka - Waiwerang	52	52	0	0	0
38	Waiwerang - Lewoleba	52	102	0	0	0
39	Kalabahi - Teluk Gurita	82	2,808	273	52	0
40	Kalabahi - Baranusa	80	1,412	159	53	0
41	Ternate - Babang (Bacan)	124	185	131	189	105
42	Ternate - Batang Dua	79	1,463	114	10	7
43	Dowora (goto) - Sofifi	260	9,570	2,094	442	354
44	Tobelo - Daruba	135	13,066	2,386	324	305
45	Tobelo - Subaim	209	15,224	1,871	475	885
46	Tolehu - Pelauw	238	9,050	3,639	657	1,263
47	Pelauw - Umeputih	238	3,543	1,332	339	680

No.	Lintasan	TRIP	MUATAN			
			PNP	R4	R2	BRG
48	Umeputih - Wailey	238	6,265	2,346	92	73
49	Tolehu - Saparua	94	4,682	1,384	658	1,335
50	Saparua - Nalahia	92	2,231	460	115	247
51	Nalahia - Amahai	92	2,449	328	16	30
52	Galala - Ambalau	121	7,981	676	164	25
53	Ambalau - Wamsisi	121	9,135	674	163	25
54	Wamsisi - Namrole	121	9,215	507	144	25
55	Namrole - Leksula	121	4,961	96	10	3
56	Sanana - Mangole	36	42	0	0	0
57	Mangole - Bobong	36	24	0	0	0
58	Tual - Dobo	132	15,958	314	49	0
59	Tual - Larat	56	3,509	35	5	0
60	Tual - Tayandu	66	7,764	189	0	275
61	Tayandu - Kur	66	3,291	112	0	277
62	Dobo - Benjina	68	916	0	4	0
63	Benjina - Tabarfane	54	492	0	0	0
64	Dobo - Jerol	2	4	0	0	0
65	Sorong - Linmalas	40	1,916	0	0	0
66	Linmalas - Waigama	40	1,649	0	0	0
67	Sorong - Folley	40	2,553	0	0	0
68	Folley - Harapan Jaya	40	2,299	0	0	0
69	Seget - Seremuk	30	480	0	4	0
70	Sorong - Seget	30	578	0	4	0
71	Sorong - Saonek	70	1,422	79	81	259
72	Saonek - Waisai	70	1,273	79	81	0
73	Waisai - Kabarai	70	923	0	0	0
74	Teminabuan - Mugim	30	463	0	0	0
75	Mugim - Kais	30	528	0	0	0
76	Kais - Inawatan	30	482	0	0	0
77	Inawatan - Kokoda	30	482	0	0	0
78	Teminabuan - Konda	30	464	0	4	0
79	Konda - Seremuk	30	483	0	4	0
80	Biak - Serui	52	2,490	40	27	0
81	Biak - Numfor	102	8,436	61	12	0
82	Serui - Waren	78	3,365	110	15	0
83	Waren - Nabire	26	2,701	68	15	0
84	Merauke - Kimam - Bade - Getentiri - Tanah Merah	258	16,992	279	69	0
85	Bade - Kepi	56	1,402	12	0	1
Jumlah II		23,007	541,797	138,048	52,154	48,599

Sumber : Dit. LLASDP. Ditjen Hubdat

#### 4. Kegiatan-kegiatan Strategis

Kegiatan - kegiatan Strategis yang dilaksanakan pada tahun 2010 di bidang LLASDP antara lain :

- a. Penyiapan Cetak Biru Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai

b. Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang RO-RO baik yang disatker pusat dan daerah :

1) Satker Pusat

a) Pembangunan Kapal Penyeberangan 75 GT :

- KMP. Rangkayo Hitam Lintas Kota Kandis-Teluk Buan

b) Pembangunan Kapal Penyeberangan 200 GT :

- KMP. SEMAH Lintas Parit Sarem-Sungai Nipah

- KMP. SUMUT II Lintas Tigaras-Simando

c) Pembangunan Kapal 300 GT:

- KMP. Tanjung Madlahar Lintas Tapa-Ilwaki-Letti

- KMP. Teluk Ambon Lintas Ambon-Unpatti

- KMP. Berkat Porodisa Lintas Melonguang-Kabaruan-Salebabu

d) Pembangunan Kapal 500 GT:

- KMP. Tanjung Api Lintas Ampan Wakai/P.Togean-Marissa;

- KMP. Arar Lintas Patani-Sorong;

- KMP. Manumbing Raya Lintas Manggar-Ketapang

- KMP. Bahtera Mas Lintas Kamaru-Wanci

- KMP. Mastrei Lintas Kabuena-Nabire

- KMP. Manta Lintas Ancam-Tarakan

e) Pembangunan Kapal 1500 GT:

- KMP. Kalibodri Lintas Kendal-Kumai

c. Penetapan alur-pelayaran sungai dan danau berdasarkan klasifikasi kelas.

Sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam hal:

1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;

2) Pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau; dan

3) Penetapan biaya pemanfaatan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah.

d. Pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.

Memuat alur-pelayaran sungai dan danau yang terdiri dari:

a. Alur-pelayaran;

- b. Sistem rute;
  - c. Tata cara berlalu lintas; dan
  - d. Daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
  - e. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dan badan usaha dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- Penyiapan SDM PPNS bidang LLASDP, inspektur sungai dan danau, dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.

#### 5. Permasalahan yang dihadapi

- a) Alokasi anggaran untuk penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP yang kurang mencukupi sehingga kegiatan/ proyek yang seyogyanya bisa diselesaikan hanya dalam beberapa tahap menjadi berlarut – larut.
- b) Hambatan birokratis khususnya untuk pekerjaan yang sifatnya multi years menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan menjadi kurang efektif dan efisien.
- c) Kurangnya dukungan SDM yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.
- d) Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana angkutan SDP, khususnya dalam hal penyediaan lahan dan pembebasan tanah, menyebabkan beberapa kegiatan yang seyogyanya sudah siap dilaksanakan menjadi tertunda.
- e) Belum adanya peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- f) Belum adanya pedoman dalam pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- g) Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- h) Pemerintah Daerah Perlu menyiapkan kualifikasi SDM yang memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dapat mengikuti diklat dan mendapat manfaat secara efektif.

## 6. Upaya yang dilakukan

- a) Mengupayakan penyediaan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan cara meningkatkan koordinasi baik dengan unit kerja terkait (Setjen Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan RI) maupun dengan Lembaga Legislatif (DPR) di pusat dan di daerah.
- b) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang proaktif dengan Kementerian Keuangan khususnya dalam hal proses pengurusan persetujuan kegiatan yang dilaksanakan secara multi years oleh Menteri Keuangan.
- c) Membangun koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Perhubungan di daerah dalam rangka penyiapan SDM yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan yang akan ditugaskan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan di daerah.
- d) Meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dalam penyiapan lahan untuk kegiatan pembangunan prasarana transportasi SDP di daerah.
- e) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam perumusan peraturan pelaksana tentang penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
- f) Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur pembuatan peta alur-pelayaran sungai dan danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- g) Merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
- h) Pemerintah menyelenggarakan orientasi di bidang teknis operasional LLASDP, menginformasikan kegiatan tersebut kepada seluruh Dinas Perhubungan Propinsi, Kabupaten dan Kota.

## C. DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

### 1. Umum

Transportasi merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan baik pada tataran nasional, wilayah Propinsi/regional maupun pada kawasan perkotaan. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa dan tingkat mobilitas yang tinggi, maka sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah

pedesaan, sejalan dengan itu juga menimbulkan permasalahan transportasi. Pertumbuhan kebutuhan transportasi sering tidak sejalan dengan penyediaan prasarana yang akan memperbesar masalah seperti dapat kita lihat dari kecepatan perjalanan di daerah perkotaan semakin lama semakin turun.

Pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan di wilayah perkotaan antara tahun 1980-2000 diperkirakan dapat mencapai 3%-5%, angka tersebut jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata nasional per tahun yang dibawah 2%. Keadaan ini harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mempunyai dampak langsung terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.

Ditinjau dari besarnya jumlah penduduk kota-kota di Indonesia, maka terdapat 9 (sembilan) kota yang masuk kriteria kota raya dan 5 (lima) kota besar yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang. Dari kesembilan kota raya tersebut yang memiliki penduduk lebih dari 1 (satu) juta orang penduduk yaitu : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Tangerang, dan Ujung Pandang dan Bogor.

Dari sekian banyak kota besar tersebut ternyata transportasi melalui jalan merupakan moda transportasi yang paling dominan dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota besar di Indonesia adalah kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu lintas, serta pencemaran udara. Penanganan masalah transportasi perkotaan yang kurang hati-hati dan kurang terpadu, tidak akan dapat memecahkan masalah tersebut secara tepat dan baik. Hal ini justru cenderung menimbulkan permasalahan baru yang dapat menambah kompleks serta rumitnya permasalahan transportasi yang telah ada.

Akumulasi dari kondisi yang ada terhadap sektor transportasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, mengakibatkan kemacetan pada hampir semua ruas jalan dalam kota. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Dit. BSTP pada tahun 2010, terhadap kinerja ruas jalan nasional di kawasan Jabodetabek dapat digambarkan bahwa rata-rata kecepatan kendaraan berkisar antara 22 km/jam - 29 km/jam dengan rasio antara jumlah kendaraan terhadap kapasitas jalan berkisar antara 0,62-0,69 dengan tingkat pelayanan rata-rata adalah C dan E pada jam puncak pagi dan

sore. Kondisi ini berada jauh di bawah standar pelayanan jalan yang diinginkan untuk jalan nasional yang seharusnya Tingkat Pelayanan A atau B.

Tabel IV.32

Kinerja Ruas Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

	V/C		KECEPATAN	
	PAGI	SORE	PAGI	SORE
MAX	0.97	0.95	46.7	52.7
MIN	0.35	0.46	6.4	4.7
RERATA	0.69	0.62	28.5	22.7

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Tabel IV.33

Tingkat Pelayanan Jalan Nasional di Kawasan Jabodetabek

Tingkat Pelayanan	PAGI	SORE
A	0%	0%
B	16%	5%
C	32%	18%
D	18%	15%
E	24%	33%
F	11%	28%

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Dari aspek penyediaan angkutan umum, kondisi angkutan umum yang ada secara kualitas cenderung menurun. Hal ini diperparah oleh semakin maraknya ojek sepeda motor sebagai pilihan yang mudah dan cepat bagi pengguna jalan yang berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum dan pada akhirnya mempengaruhi produktifitas angkutan umum yang ada.

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan umum, Dit. BSTP secara bertahap melakukan bimbingan dan bantuan teknis dalam penyelenggaraan angkutan umum, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Pada tahun 2010 Ditjen Perhubungan Darat telah menandatangani kesepakatan bersama (MOU) untuk penyelenggaraan angkutan umum di Kota Gorontalo, Padang dan Palembang sebagai kelanjutan kota-kota lain yang terlebih dahulu menandatangani MOU seperti Kota Batam, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Pekanbaru, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Malang Raya, Kota

Surabaya, Kota Manado, Kota Balikpapan dan Kota Makassar.

Dalam upaya pembinaan angkutan umum tidak dalam trayek di kawasan perkotaan (taksi), secara bertahap Dit. BSTP melakukan inventarisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal untuk angkutan taksi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap keberadaan angkutan pemuat moda yang berada pada bandara-bandara internasional yang ada saat ini.

Tabel IV.34  
Data Pelayanan Taksi Di Kawasan Perkotaan

No	Propinsi	Jumlah Perusahaan	Jumlah Armada Beroperasi
1	Aceh	3	54
2	Sumatera Utara	10	751
3	Sumatera Barat	14	729
4	Sumatera Selatan	3	114
5	Riau	7	472
6	Kepulauan Riau	26	2.938
7	Jambi	2	30
8	Bengkulu	0	0
9	Lampung	2	15
10	Bangka Belitung	1	14
11	DKI Jakarta	45	23.778
12	Jawa Barat	61	9.720
13	Banten	35	7.197
14	Jawa Tengah	15	1.448
15	Di. Yogyakarta	17	768
16	Jawa Timur	43	4.886
17	Bali	9	1.180
18	Nusa Tenggara Barat	4	401
19	Nusa Tenggara Timur	1	50
20	Kalimantan Barat	7	65
21	Kalimantan Tengah	3	43
22	Kalimantan Selatan	3	199
23	Kalimantan Timur	7	443
24	Sulawesi Utara	5	210
25	Sulawesi Tengah	2	55
26	Sulawesi Selatan	13	1.434
27	Sulawesi Tenggara	3	219
28	Sulawesi Barat	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Maluku	1	49
31	Maluku Utara	N/A	50
32	Papua Barat	N/A	23
33	Papua Timur	0	0
JUMLAH		342	57.335

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Tabel IV.35

REKAPITULASI DATA ANGKUTAN PEMADU MODA, ANGKUTAN JALAN DENGAN ANGKUTAN UDARA  
PER 31 DESEMBER 2010

No	Lokasi / Propinsi	Trayek		Waktu Operasi		Jarak	Waktu Tempuh	Jumlah Bus	Tarif (Rupiah)	Operator
		No	Asal - Tujuan (PP)	Awal	Akhir					
1	Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, NAD	1	Bandara Sultan Iskandar Muda - Mesjid Raya	08.00	13.00	17 Km	45 Menit	3	10.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	
2	Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, DKI Jakarta	1	Bandara Soekarno Hatta - Blok M	04.00	23.00	38 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		2	Bandara Soekarno Hatta - Gambir	04.00	23.00	37 Km	45 Menit	20	20.000	Damri
		3	Bandara Soekarno Hatta –Rawamangun	03.00	23.00	46 Km	60 Menit	15	20.000	Damri
		4	Bandara Soekarno Hatta -Pasar Minggu	04.00	23.00	40 Km	75 Menit	14	20.000	Damri
		5	Bandara Soekarno Hatta –Cikarang	04.00	20.00	80 Km	120 Menit	6	20.000	Damri
		6	Bandara Soekarno Hatta –Bogor	02.00	22.00	87 Km	120 Menit	17	30.000	Damri
		7	Bandara Soekarno Hatta –Bekasi	02.00	23.00	57 Km	90 Menit	22	20.000	Damri
		8	Bandara Soekarno Hatta – Priok	04.00	23.00	43 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		9	Bandara Soekarno Hatta – Lebak Bulus	04.00	23.00	40 Km	85 Menit	8	20.000	Damri
		10	Bandara Soekarno Hatta - Kp. Rambutan	04.00	23.00	60 Km	90 Menit	16	20.000	Damri
		11	Bandara Soekarno Hatta - Serang	05.00	18.00	43 Km	90 Menit	3	28.000	Damri
		12	Bandara Soekarno Hatta –Kemayoran	05.00	23.00	37 Km	45 Menit	4	20.000	Damri
		13	Bandara Soekarno Hatta -Bandung Supermall	02.00	24.00	197 Km	180 Menit	40	75.000	Prima Jasa
								<b>Jumlah</b>	<b>184</b>	
3	Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur	1	Bandara Juanda - Terminal Purabaya	05.00	21.00	12 Km	40 Menit	8	15.000	Damri
		2	Purabaya - Tanjung Perak	05.00	21.00	18 Km	60 Menit	9	4.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	

4	Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat	1	Bandara Int. Minangkabau- Lap. Imam Bonjol	06.00	21.00	28 Km	60 Menit	3	18.000	Damri
		2	Bandara Int. Minangkabau- Simpang lubuk begalung	07.00	22.00	33 Km	45 Menit	4	18.000	Tranex
								<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	
5	Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau	1	Bandara Hang Nadim - Jodoh	07.00	21.00	29 Km	45 Menit	2	15.000	Damri
		2	Bandara Hang Nadim – Batu Aji (Pasar Fanindo)	07.00	21.00	32 Km	45 Menit	2	15.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	
6	Bandara Sultan Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan	1	Bandara Sultan Hasanudin- Lap.Karebosi	08.00	21.30	23 Km	90 Menit	3	15.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	
7	Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, DIY	1	Bandara Adi Sucipto - Kebumen	03.00	21.00	110 Km	180 Menit	4	55.000	Damri
		2	Bandara Adi Sucipto - Magelang	04.00	21.00	55 Km	90 Menit	6	35.000	Damri
								<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	

Sumber : Dit. BSTP, Ditjen Hubdat

Selain permasalahan lalu lintas dan angkutan, permasalahan lingkungan juga menjadi fokus kegiatan Dit. BSTP. Program gasifikasi angkutan umum secara terencana dan berkelanjutan terus dilakukan dalam rangkai mendukung program langit biru dan transportasi ramah lingkungan.

Memperhatikan kondisi yang ada di lapangan, pembinaan transportasi perkotaan terus dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis dibidang penyusunan rencana induk pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan di perkotaan (master plan transportasi/grand design transportasi), penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan program gasifikasi, pengembangan bus rapid transit, bantuan bus sekolah/pelajar/mahasiswa, penataan fasilitas pemadu moda dan program-program lain yang bersifat isedentil.

## 2. Perkembangan Prasarana Angkutan Perkotaan

Prasarana angkutan umum yang dikembangkan saat ini belum menunjukkan hal yang signifikan. Dari DKI Jakarta, Batam, Bogor, Bandung, Pekanbaru, Manado, Yogyakarta, Surakarta dan Palembang; hanya DKI Jakarta saja yang telah mempunyai jalur khusus untuk bus (busway) sedangkan yang lainnya masih menggunakan jalur bersama (mixuser) .

Untuk mengantisipasi hal ini, mengacu pada Undang-Undang No: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilengkapi dengan rencana pengembangan jaringan angkutan umum. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan kota-kota besar dan metropolitan untuk menyediakan angkutan umum massal.

Untuk data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan perkotaan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel IV.36 dan IV.37

Tabel IV.36  
DATA PRASARANA TAHUN 2010

No	Kota	Jumlah	Luas Kota	Luas Jalan	Road Ratio	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Panjang Jalan	Jumlah Rambu	Jumlah LPJ	Jml
		Penduduk	(km2)	(km2)	(%)	(km2)	Yang dilengkapi Trotoar (km)	Yang dilengkapi Marka (km)	Yang Terpasang	yang Terpasang	SRP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOTA METROPOLITAN											
1	SURABAYA	2,987,456	32,637	15,187	0.23	3,546	2,124	2,837	17,730	37,233	35
2	BANDUNG	2,296,848	21,035	11,660	0.21	2,453	1,471	1,962	12,265	25,756	38
3	MEDAN	2,067,288	27,054	16,185	0.18	2,981	1,352	2,385	14,905	31,300	30
4	PALEMBANG	1,607,673	40,564	17,987	0.13	747.9	83.63	15.85	1332	10504	24
5	MAKASAR	1,253,656	29,275	16,655	0.11	1,765	865	1,412	8,825	18,532	37
6	SEMARANG	1,419,478	35,286	18,309	0.21	3,769	1,341	3,015	18,845	39,574	38
7	BOGOR	1,945,000	18,605	10,725	0.13	1,356	632	1,085	6.780	14,238	14
KOTA BESAR											
8	PADANG	764,800	28,935	11,557	0,09	1,086	533	869	5,430	11,403	11
9	PEKANBARU	666,902	23,262	12,466	0,19	2,342	1,621	1,874	11,710	24,591	23
10	SAMARINDA	650,000	15,635	7,654	0,7	535,5	35.086	70.00	1043	1815	21
11	TASIKMALAYA	589,597	17,158	8,656	0,11	985	234	788	4,925	10,342	10
12	SURAKARTA	565,415	44.014	11,567	0.4	675.8	124.41	41	849	16,169	13
13	BALIKPAPAN	601,392	15,030	7,132	0,6	257	27,78	153,775	650	4.854	15
14	YOGYAKARTA	419,164	13,250	6,874	0,16	1,098	412	878	5,490	11,529	11
15	SIDOARJO	211.881	14,506	13,567	0,11	1,453	422	1,162	7,265	15,256	15
16	BUKIT TINGGI	485,324	12,524	6,134	0,16	980	522	784	4,900	10,290	10
KOTA SEDANG											
17	CIMAHI	463,448	7,210	3,178	0,25	780	210	624	3,900	8,190	8

18	JAMBI	300,000	6,089	2,978	0,22	653	125	522	3,265	6,856	7
19	SENGKANG	143,223	1,039	1,601	0,08	124	61	99	620	1,302	1
20	SUKABUMI	206,288	18,278	9,408	0,01	603	369	482	3,015	6,331	8
21	BANYUWANGI	274.542	7,250	3,981	0,09	378	121	302	1,890	3,969	6
22	PANGKAJENE	271.709	7,125	2,684	0,09	237	117	190	1,185	2,488	7
23	DUMAI	263.199	685	5,375	0,03	136	51	109	680	1,428	10
24	BANGLI	254.053	1,654	1,587	0,06	98	44	78	490	1,029	11
25	MADIUN	249.643	6,170	1,753	0,12	212	102	170	1,060	2,226	6
26	T. AGUNG	239.201	7,160	1,175	0,14	159	62	127	759	1,669	7
27	TANJUNG BALAI	236.943	6,460	1,241	0,07	89	69	71	445	934	8
28	BADUNG	221.055	8,109	1,559	0,15	230	124	184	1,150	2,415	9
29	LUMAJANG	206.288	10,021	2,574	0,14	359	153	287	1,759	3,769	18
30	PAREPARE	121.161	9.910	2488.8	0,22	311.1	199.6	212.465	237	1612	9
31	CIAMIS	186.623	8,765	2,312	0,20	459	223	367	2,295	4,819	11
32	WATAMPONE	183,251	11,235	1,534	0,21	320	164	256	1,600	3,360	6
33	MOJOKERTO	181.999	6,693	1,356	0,20	270	121	216	1,350	2,835	7
KOTA KECIL											
34	SNG.MINASA	79,643	9,316	1,125	0,12	130	64	104	650	1,365	13
35	SRAGEN	98,461	7,475	1,213	0,21	260	127	208	1,300	2,730	15
36	SINGARAJA	84,613	9,885	1,435	0,12	178	134	142	890	1,869	8
37	STABAT	76,315	10,096	1,512	0,08	117	52	93	585	1,228	9
38	PARIAMAN	64,587	6,336	1,344	0,06	81	35	64	405	850	7
39	AMLAPURA	76,312	7,448	1,234	0,13	158	78	126	790	1,659	6
40	KY.AGUNG	46,579	12,145	946	0,06	54	26	43	270	567	5
41	MAGETAN	54,612	7,434	1,157	0,11	129	63	103	645	1,354	12
42	TABANAN	76,431	6,124	1,778	0,13	233	154	186	1,165	2,446	22
43	SEMARAPURA	84,615	7,546	1,434	0,23	328	211	262	715	3,444	11
44	GNG KIDUL	64,315	6,968	1,453	0,10	143	134	114	475	1,501	9
45	POLEWALI	46,312	8,916	1,586	0,06	95	59	76	660	997	10
46	M. BUNGO	84,516	9,189	2,453	0,05	132	63	105	425	1,386	19
47	AMUNTAI	64,312	13,673	1,232	0,07	85	41	68	1,055	892	12
48	LUBUK PAKAM	64,315	12,901	1,397	0,15	211	106	168	956	2,215	13
49	PD.PANJANG	52,018	8,398	1,536	0,1776	60.4	34	14	491	1,953	14
50	PINRANG	51,324	5,942	2,132	0,04	76	39	60	380	798	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	MUARA ENIM	63,142	14,613	4,768	0,02	85	41	68	425	892	10
52	PELAIHARI	54,312	10,072	3,434	0,02	66	37	52	330	693	9
53	KEPANJEN	91,324	12,625	4,987	0,05	241	125	192	1,205	2,530	19
54	TANJUNG	61,542	9,323	1,546	0,06	89	42	71	445	934	8
55	GIANYAR	85,134	8,987	3354	0,09	287	143	229	653	3,013	8
56	BATU SANGKAR	76,132	7,473	1467	0,07	109	62	87	341	1,144	10

Sumber : Dit. BSTP (WTN 2009)

Keterangan : LPJ : Lampu Penerangan Jalan  
SRP : Satuan Ruang Parkir

Tabel IV.37  
 Fasilitas Pendukung LLAJ dan Persimpangan dengan APILL

No	Kota	Jumlah Halte	Jumlah Fasilitas Penyebrangan	Jumlah Simpang	Jumlah APILL
1	2	3	4	5	6
KOTA METROPOLITAN					
1	SURABAYA	53	192	133	124
2	BANDUNG	35	165	352	182
3	MEDAN	36	312	239	43
4	PALEMBANG	34	46	57	42
5	MAKASSAR	70	324	80	46
6	SEMARANG	57	77	94	105
KOTA BESAR					
7	BOGOR	15	56	271	37
8	PADANG	65	127	269	38
9	PEKANBARU	15	138	212	27
10	SAMARINDA	24	154	316	33
11	TASIKMALAYA	13	85	304	25
12	SURAKARTA	42	71	134	68
13	BALIKPAPAN	19	121	344	24
KOTA SEDANG					
14	CIMAHI	15	49	411	17
15	JAMBI	28	148	63	26
16	YOGYAKARTA	3	195	280	76
17	SENGKANG	3	9	50	22
18	SUKABUMI	8	185	167	84
19	BANYUWANGI	8	80	113	9
20	PANGKAJENE	3	6	203	14
21	BINJAI	11	56	55	35
22	DUMAI	37	32	13	6
23	BANGLI	3	31	22	2
24	MADIUN	10	183	74	42
25	TULUNG AGUNG	11	74	70	23
26	TANJUNG BALAI	7	13	26	4
27	BADUNG	13	112	53	16
28	LUMAJANG	9	29	20	11
29	SIDOARJO	7	39	25	15
30	PAREPARE	7	47	93	14
31	CIAMIS	6	20	59	10
32	WATAMPONE	5	7	49	7
33	MOJOKERTO	2	20	21	18
34	BUKIT TINGGI	21	85	99	15
35	SUNGGUMINASA	3	15	97	7
36	SRAGEN	12	20	32	23
37	SINGARAJA	10	49	21	21

1	2	3	4	5	6
38	STABAT	10	16	63	3
39	PARIAMAN	1	75	58	8
40	AMLAPURA	12	80	98	4
41	KAYU AGUNG	4	9	78	4
42	MAGETAN	2	43	64	5
43	TABANAN	16	66	70	9
44	SAMARAPURA	5	54	108	7
45	GUNUNG KIDUL	20	54	71	11
46	POLEWALI	16	25	113	113
47	MUARA BUNGO	3	14	175	113
48	AMUNTAI	0	14	68	1
49	LUBUK PAKAM	7	44	41	15
50	PADANGPANJANG	11	41	19	62
51	PINRANG	1	4	55	2
52	MUARA ENIM	0	13	71	3
53	PELAIHARI	1	33	15	1
54	KEPANJEN	6	22	35	10
55	TANJUNG	7	20	37	8
56	GIANYAR	2	26	62	8

Sumber : Dit. BSTP ( WTN 2010)

Tabel IV.38  
DATA LALU LINTAS TAHUN 2010

No	Kota	V/C Ratio Rata - Rata	Kecepatan Rata-rata (km/jam)
1	2	3	4
KOTA METROPOLITAN			
1	SURABAYA	0.83	21
2	BANDUNG	0.85	14.3
3	MEDAN	0.76	23.4
4	PALEMBANG	0.61	28.54
5	MAKASSAR	0.73	24.06
6	SEMARANG	0.72	27
7	BOGOR	0.86	15.32
KOTA BESAR			
7	PADANG	0.63	30.9
8	PEKANBARU	0.64	31.13
9	SAMARINDA	0,64	20,8
10	TASIKMALAYA	0.61	30
11	SURAKARTA	0.68	18.25
12	BALIKPAPAN	0.67	47,43
13	CIMAHI	0.75	25.5
14	JAMBI	0.68	31

1	2	3	4
15	YOGYAKARTA	0.86	31.34
16	SENGKANG	0.53	63.2
17	SUKABUMI	0.66	23
18	BANYUWANGI	0.54	60
19	PANGKAJENE	0.6	73
20	BINJAI	0.69	40
21	DUMAI	0.6	50
22	BANGLI	0.76	45
23	MADIUN	0.53	27.48
24	TULUNG AGUNG	0.55	54.54
25	TANJUNG BALAI	0.24	41.09
26	BADUNG	0.85	30.18
27	LUMAJANG	0.49	37.8
28	SIDOARJO	0.67	50
29	PAREPARE	0.62	20
30	CIAMIS	0.45	40
31	WATAMPONE	0.67	55
32	MOJOKERTO	0.53	60
33	BUKIT TINGGI	0.63	37.07
KOTA KECIL			
34	SUNGGUMINASA	0.61	35
35	SRAGEN	0.53	45
36	SINGARAJA	0.63	25
37	STABAT	0.76	40
38	PARIAMAN	0.19	33.33
39	AMLAPURA	0.63	62
40	KAYU AGUNG	0.68	30
41	MAGETAN	0.59	35
42	TABANAN	0.62	40
43	SAMARAPURA	0.62	41
44	GUNUNG KIDUL	0.65	45
45	POLEWALI	0.85	36.67
46	MUARA BUNGO	0.42	30
47	AMUNTAI	0.27	49
48	LUBUK PAKAM	0.34	30.2
49	PADANGPANJANG	0.43	25.62
50	PINRANG	0.41	63.2
51	MUARA ENIM	0.52	28.7
52	PELAIHARI	0.38	45
53	KEPANJEN	0.49	40
54	TANJUNG	0.49	41.5
55	GIANYAR	0.67	37.22

Sumber Dit. BSTP ( WTN 2010)

### 3. Perkembangan Sarana Angkutan Perkotaan

Pada tahun 2010 jumlah angkutan umum perkotaan hanya pada angkutan kota dan taksi. Untuk angkutan kota, jumlah yang paling tinggi yaitu pada mobil penumpang umum (MPU) sebesar 203.828 unit untuk mobil penumpang umum tersebut mengalami penurunan di dibandingkan tahun 2009 karena kelayakan kendaraan tersebut sedangkan untuk taksi hanya sebesar 58.512 unit mengalami peningkatan dari tahun 2009.

Tabel IV.39  
Jumlah Angkutan Umum

No.	Pelayanan	Jenis Kendaraan				Total
		BB	BS	BK	MPU	
1	Angkutan Kota	26.402	37.868	89.224	203.828	357.322
2	Taksi	-	-	-	58.512	58.512
Total		26.402	37.868	89.224	262.340	415.834

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat 2010

Kondisi saat ini menunjukkan jumlah angkutan umum di Indonesia semakin menurun akibat penurunan tersebut dikarenakan kendaraan yang sudah semakin tua atau umur kendaraan yang sudah tidak layak, dan pelayanannya dirasakan masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan karena penataan dan perencanaan angkutan umum dipertkotaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan pertumbuhan prasarana yang ada.

Dalam peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan dan untuk mengatasi permasalahan diatas telah diterapkan kebijakan dengan orientasi pada pengembangan angkutan umum dengan strategi :

- a. Mengembangkan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang cepat, tepat, aman, nyaman, murah (CTANM) dan berkelanjutan.
- b. Menjamin kepastian dan keberlangsungan untuk pelayanan angkutan umum perkotaan dimasa yang akan datang.

Program yang dilakukan oleh Dit. BSTP yang berkaitan dengan pengembangan sarana angkutan perkotaan antara lain :

- a. Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT)

- 1) Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) pada Kota-kota Besar dan Kota Metropolitan, sebagaimana SK Dirjen Nomor. SK.4042/UM 303/DJPD/2010 tanggal 4 November 2010.
- 2) Bantuan Pengembangan BRT di Kota Surakarta sebanyak 15 unit Bus ukuran sedang AC.
- 3) Bantuan Pengembangan BRT di Kota Gorontalo sebanyak 10 unit Bus ukuran sedang AC.



- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Perkotaan Pengadaan 22 Unit Bus Ukuran Besar (EURO II Engine), sebagaimana SK Dirjen Nomor. 4041/UM 303/DJPD/2010 tanggal 4 November 2010.
  - 1) Bantuan Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota untuk Perum PPD sebanyak 15 unit Bus Ukuran Besar sebagai pendukung (Feeder) Trans Jakarta.
  - 2) Bantuan Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota di Kota Palembang sebanyak 5 unit Bus Ukuran Besar.
- c. Pengadaan 70 Bus Ukuran Sedang Non AC yang diberikan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten/Perguruan Tinggi, sebagaimana SK Dirjen Nomor. SK.4053/UM.303/DRJD/2010 tanggal 23 November 2010.

Tabel IV.40

Jumlah Pengadaan Bus Ukuran Sedang Non AC untuk  
Pemerintah Kota/Kabupaten/Perguruan Tinggi

No.	PENERIMA	LOKASI	PERUNTUKAN
1	NAD		
	Kab. Pidie Jaya	2	Sekolah
	Kota Lhokseumawe	2	Sekolah
	Kota Sabang	2	Sekolah
2	SUMUT		
	Kab. Langkat	2	Sekolah
	Kab. Pakpak Bharat	2	Umum
	Kab. Nias Selatan	2	Umum
	Kab. Tapanuli Tengah	1	Umum
	Kab. Padang Lawas Utara	2	Sekolah
3	SUMBAR		
	Kab. Lima Puluh Kota	1	Sekolah
4	SUMSEL		
	IAIN Raden Fatah Palembang	1	Kampus
5	BENGKULU		
	Kab. Muko-Muko	2	Sekolah
	Kab. Bengkulu Selatan	2	Sekolah
6	DKI JAKARTA		
	UMJ	1	Kampus
7	JAWA TENGAH		
	Universitas Sebelas Maret	1	Kampus
8	BALI		
	Kab. Klungkung	2	Umum
	Kab. Jembrana	2	Umum
	Balai Diklat Bali	1	Kampus
9	NTT		
	Kab. Sumba Barat Daya	2	Umum
	Kota Kupang	1	Sekolah
10	NTB		
	Kab. Lombok Utara	2	Umum
	Kota Bima	2	Umum
11	KALSEL		
	Kab. Tabalong	1	Umum
12	KALBAR		
	Kab. Kapuas Hulu	2	Sekolah
14	KALTIM		
	Kota Bontang	2	Sekolah
15	SULAWESI UTARA		
	Kota Mobagu	2	Umum
	Kab. Minahasa Tenggara	2	Sekolah

No.	PENERIMA	LOKASI	PERUNTUKAN
	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2	Sekolah
16	SULAWESI SELATAN		
	Kab. Jeneponto	2	Sekolah
	Kab. Maros	2	Umum
	Kab. Bulukumba	2	Sekolah
17	SULAWESI TENGAH		
	Kab. Donggala	2	Sekolah
18	SULAWESI TENGGARA		
	Kab. Konawe Utara	2	Sekolah
19	SULAWESI BARAT		
	Kab. Mamasa	2	Umum
20	MALUKU		
	Kota Tual	2	Umum
24	MALUKU UTARA		
	Kab. Pulau Morotai	2	Sekolah
25	PAPUA		
	Kota Jayapura	2	Sekolah
	Kota Sorong	2	Umum
	Kab. Sorong	2	Umum
	RSUD Dok II Jayapura	2	Umum
TOTAL		70	

Sumber : Dit. BSTP. Ditjen Hubdat 2010

#### 4. Kinerja Angkutan Perkotaan

Unjuk kerja pelayanan angkutan perkotaan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- a. Ketepatan waktu pelayanan
- b. Kepastian akan pelayanan
- c. Tarif yang ditetapkan terjangkau oleh pengguna jasa angkutan umum;
- d. Tingkat keamanan dan kenyamanan dalam angkutan terjaga;

Saat ini sedang disusun draft Peretauran Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan.

#### 5. Program Gasifikasi Kendaraan Umum Perkotaan

Transportasi merupakan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terbesar di Indonesia, dimana pada tahun 2008 mencapai 31.16 juta kl atau 51 % (sumber Kementerian ESDM) dari total Konsumsi BBM. Ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM ini telah menimbulkan kekhawatiran karena jumlah cadangan dan produksi minyak

bumi Indonesia terbatas dan pembakaran BBM menimbulkan pencemaran yang berat di kota besar.

Pada bulan juli 1986 sebenarnya pemerintah sudah menetapkan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor, hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dan pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran BBM. Salah satu upaya menggalkan pemakaian BBG adalah dengan memanfaatkan angkutan umum yang menggunakan BBG, maka daripada itu Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan mengadaakan program Gasifikasi pada Angkutan Umum sebagai mana berikut :

Gasifikasi Pada Angkutan Umum	
Tahun 2007	DKI Jakarta (1775 unit Konverter kit)
Tahun 2008	DKI Jakarta (820 unit konverter Kit)
Tahun 2009	Bogor (1001 unit Konverter Kit) Palembang (666 unit Konverter Kit)
Tahun 2010	Surabaya (445 unit Konverter Kit)



Gambar IV.9  
Program Gasifikasi Angkutan Perkotaan

## 6. Kegiatan-kegiatan Strategis

### a. Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT)

Kegiatan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan angkutan umum wilayah perkotaan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama/MOU yang masing-masing instansi telah menyepakati kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan

- kegiatan ini. Pada tahun 2010 Program BRT dilaksanakan di Kota Palembang, Kota Surakarta dan Kota Gorontalo serta penyediaan feeder Trans Jakarta
- b. Program bantuan Angkutan sekolah/pelajar dan mahasiswa
  - c. Program bantuan konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas, berupa Converter kit untuk angkutan umum perkotaan di Bogor dan Palembang
  - d. Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Sragen
  - e. Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki (dalam penyusunan desain) di Kota Bukittinggi dan Palembang.



#### 7. Permasalahan yang dihadapi

- a. Masih kurangnya pedoman/panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- b. Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
- c. Kurangjelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;
- d. Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi.
- e. Kemacetan lalu lintas;
- f. Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- g. Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.

#### 8. Upaya yang dilakukan

Dari hambatan-hambatan di atas maka untuk menanggulangnya dilakukan berbagai upaya yaitu :

- a. Penyelenggaraan kegiatan konsolidasi kepada Pemerintah Daerah tingkat Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna mengetahui perkembangan serta permasalahan transportasi yang terjadi pada masing-masing

Kota/Kabupaten lebih mendalam dan mensosialisasikan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam pengembangan transportasi yang lebih baik,

- b. Bimbingan teknis dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah baik pada bidang penyusunan master plan, lalu lintas, angkutan maupun lingkungan;
- c. Pembinaan transportasi perkotaan melalui Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota;
- d. Penyusunan Grand Desain Perkotaan, dengan beberapa kota sebagai Kota Percontohan.
- e. Penyempurnaan peraturan penundangan-undangan dibidang transportasi perkotaan.

#### D. DIREKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

##### 1. Umum

Permasalahan yang dihadapi di dalam transportasi jalan di Indonesia ada dua hal, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan biasanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Sedangkan keselamatan terjadi hampir merata di semua wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari data laporan kecelakaan yang bersumber dari Kepolisian. Pada tahun 2009 rata-rata kecelakaan untuk tiap Propinsi sebesar 2.031 kejadian dengan deviasi sebesar 480. Kejadian paling besar terjadi di Propinsi Jawa Timur 12.245 kejadian pada tahun 2009 (data bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia). Total kejadian pada tahun 2009 tingkat nasional sebesar 62.960 kejadian dengan tingkat kerugian materi akibat kecelakaan mencapai 136 milyar rupiah.

Fenomena tingginya tingkat kecelakaan bukan hanya terjadi di Indonesia. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh TRL, bahwa untuk Negara-negara dengan jumlah populasi kendaraan bermotor yang tinggi kerugian material mencapai 2% dari PNB. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UGM dan UI perkiraan kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2002 sekurang-kurangnya sebesar 30.82 triliun rupiah (atau sekitar 3.5 milyar US Dollar) atau sekitar 2.17% dari GDP. Ini merupakan sebuah angka yang besar dan ini terjadi setiap tahun bahkan angkanya makin meningkat.

Badan dunia, PBB, sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi hampir di semua Negara berkembang. Sehingga PBB mengeluarkan resolusi dengan Nomor A/64/L.44/Rev.1\* tanggal 24 Februari 2010. Yang dikenal dengan Decade of Action for Road Safety. Pemerintah Indonesia harus tanggap dengan kondisi ini, sehingga pada bulan Mei 2011 akan dicanangkan Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang di dalamnya akan menetapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (2011 s/d 2020).

## 2. Data Kecelakaan Transportasi Jalan

### a. Jumlah Kendaraan Bermotor

Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 9.8%. Tingkat pertumbuhan ini didominasi oleh Sepeda Motor yaitu sebesar 65.809.310 kendaraan atau dengan pertumbuhan 10.7%.

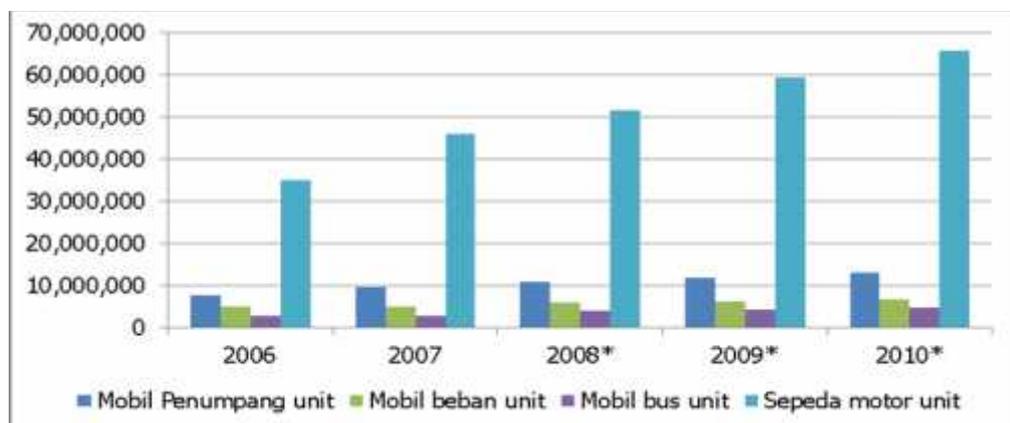
Tabel IV.41

Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2006 – 2010

No	Jenis	Satuan	Rata2					Pertumb.
			2006	2007	2008*	2009*	2010*	
1	Mobil Penumpang	unit	7,678,891	9,501,241	10,779,687	11,828,529	12,991,356	9.8
2	Mobil beban	unit	4,896,065	5,013,544	6,025,023	6,225,588	6,676,539	7.2
3	Mobil bus	unit	2,737,610	2,854,990	3,870,741	4,225,677	4,646,065	9.9
4	Sepeda motor	unit	35,102,492	45,948,747	51,697,879	59,447,626	65,809,310	10.7
Jumlah		unit	50,415,058	63,318,522	72,373,330	81,727,420	90,123,269	10.3

Sumber : POLRI, Tahun 2006-2010

data prediksi (\*)



b. Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan mengalami penurunan pada tahun 2010, jika dirata-rata tingkat pertumbuhannya 16.94% tiap tahun. Selama lima tahun jumlah kendaraan yang terlibat mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 212.011 unit atau rata-rata pertumbuhan 3.65%.

Tabel IV.42

Jumlah Kecelakaan dan Korban Kendaraan Bermotor  
Berdasar Tingkat Kecelakaan Tahun 2006-2010

No	Jenis	Satuan	Tahun					Rata2
			2006	2007	2008	2009*	2010*	Pertumb.
1	Kecelakaan	Kecelakaan	87,020	48,508	59,164	57,726	47,945	-16.94
2	Kendaraan yang terlibat	Unit	70,308	84,090	130,062*	204,534*	212,011*	3.65
3	Meninggal Dunia	orang	15,762	16,548	20,118	18,205	19,910	9.36
	Luka Berat	orang	33,282	20,180	23,440	21,289	15,103	-29.01
	Luka Ringan	orang	52,310	45,860	55,772	58,304	57,943	-0.7
	Total Korban Laka	orang	101,354	82,588	99,330	97,798	92,956	-4.95
4	Kerugian (Milyar )	MilyarRp	81.85	103.29	123.01	158.66	180.28	13.6

Sumber : POLRI, Tahun 2006-2010

Data prediksi (\*), Tahun 2008 - 2010

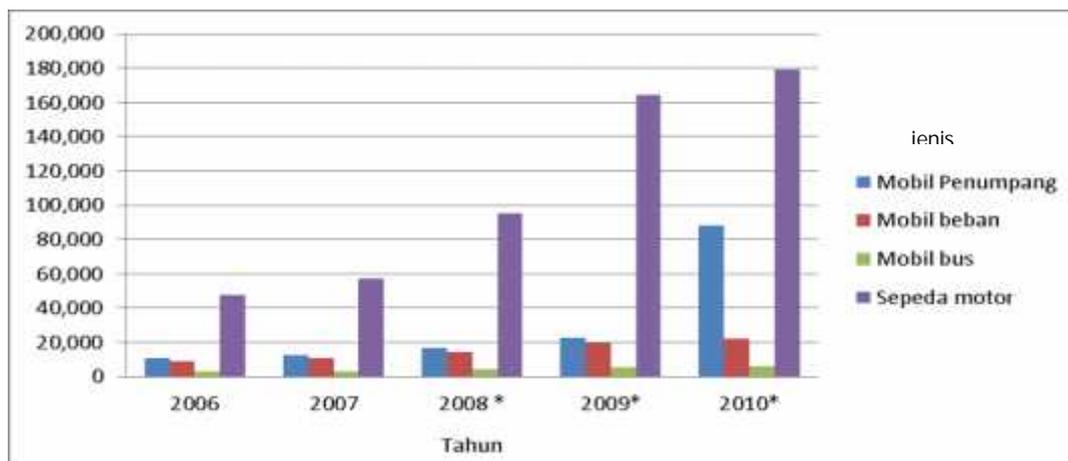
Tabel IV.43

Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor berdasar Jenis Kendaraan  
Tahun 2006-2010

No	Jenis	Satuan	Tahun					Rata2
			2006	2007	2008 *	2009*	2010*	Pertumb.
1	Mobil Penumpang	unit	10,604	12,726	16,552	22,894	88,377	286.02
2	Mobil beban	unit	9,168	11,006	14,328	19,695	22,256	13.0
3	Mobil bus	unit	2,945	3,278	3,973	5,288	5,935	12.2
4	Sepeda motor	unit	47,591	57,080	95,209	164,431	179,538	9.2
	Jumlah	unit	70,308	84,090	130,062	212,308	296,106	39.47

Sumber : POLRI, Tahun 2006-2007

Data prediksi (\*), Tahun 2008 - 2010

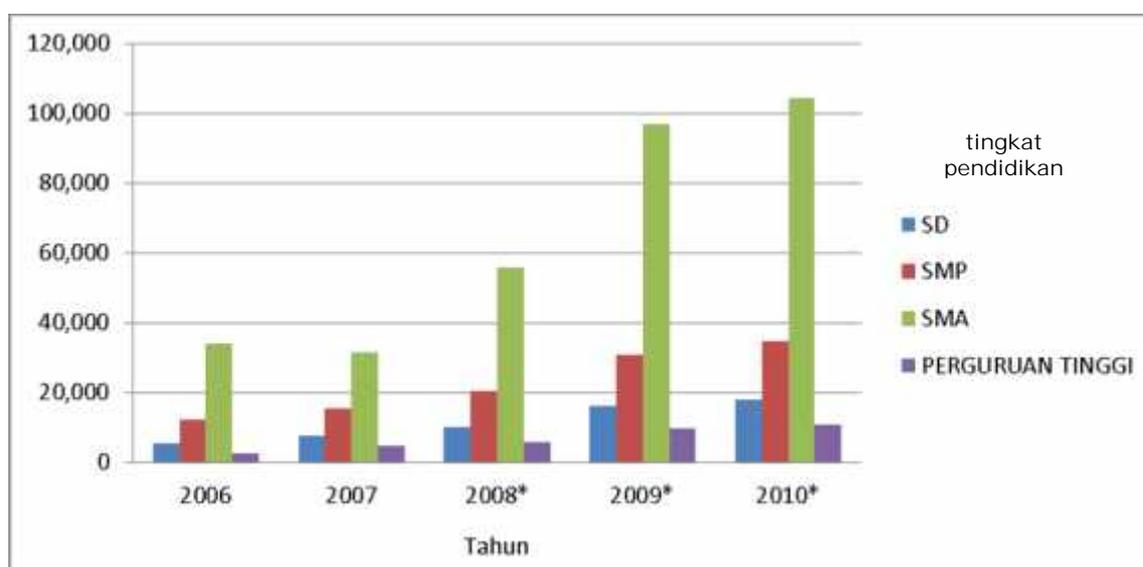


Tabel IV.44

Korban Kecelakaan berdasar Tingkat Pendidikan Korban  
Tahun 2006-2010

No	PENDIDIKAN	Satuan	Tahun					Rata2
			2006	2007	2008*	2009*	2010*	Pertumb.
1	SD	Org	5,464	7,689	9,911	16,227	18,009	10.98
2	SMP	Org	12,071	15,362	20,330	30,844	34,534	11.96
3	SMA	Org	33,897	31,488	55,754	96,716	104,407	7.95
4	PERGURUAN TINGGI	Org	2,648	4,765	5,603	9,573	10,736	12.14
JUMLAH		Org	54,080	59,304	91,598	153,360	167,686	9.34

Sumber : POLRI, Tahun 2006-2007  
Data prediksi (\*), Tahun 2008 - 2010



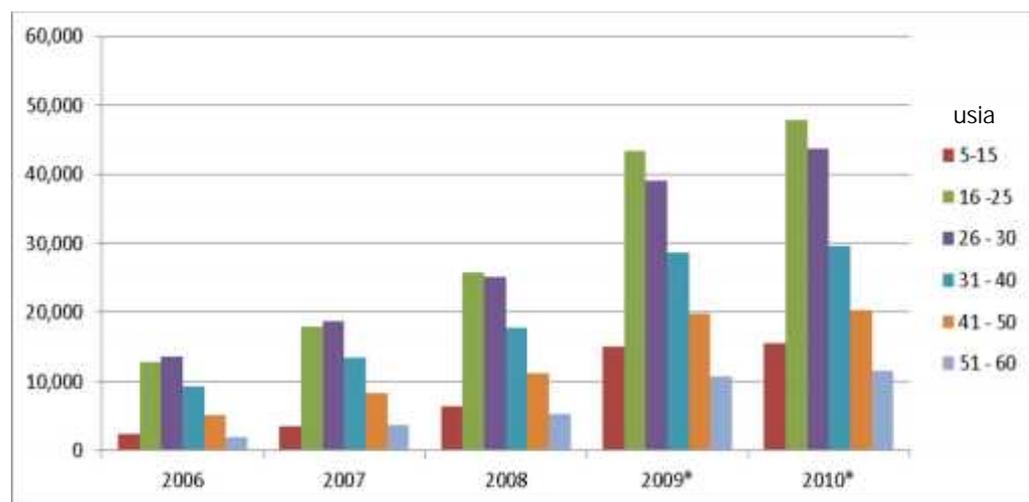
Korban kecelakaan jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah berpendidikan SMA atau sederajat. Pada tahun 2010 sebesar 104.407 orang atau sekitar 62.26% dari total korban yang ada. Keadaan seperti ini

memerlukan suatu langkah dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan.

Tabel IV.45  
Korban Kecelakaan berdasar Usia Korban  
Tahun 2006-2010

No	USIA	Satuan	TAHUN					Rata2 Pertumb.
			2006	2007	2008	2009*	2010*	
1	5 -15	orang	2,311	3,492	6,437	15,002	15,485	3.2
2	16 -25	orang	12,813	17,963	25,681	43,361	47,843	10.3
3	26 - 30	orang	13,607	18,776	25,064	38,998	43,633	11.8
4	31 - 40	orang	9,196	13,380	17,712	28,622	29,531	3.17
5	41 - 50	orang	5,164	8,260	11,115	19,779	20,262	2.44
6	51 - 60	orang	1,957	3,645	5,318	10,689	11,432	6.95
Jumlah		orang	45,048	65,516	91,327	156,451	168,186	7.50

Sumber : POLRI, Tahun 2005-2007  
Data prediksi (\*), Tahun 2009 dan 2010



Jika ditinjau dari usia korban, maka pada tahun 2010 jumlah kecelakaan terbesar di usia 16-25 tahun sebesar 47.843 orang atau rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 10.3%.

### 3. Kegiatan Keselamatan Transportasi Jalan

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.344 Tahun 2007 tentang Penetapan Kabupaten Sragen sebagai Kota Percontohan Keselamatan Transportasi Jalan dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian dan Pemerintah Kabupaten Sragen No. HK. 201/1/20/DRJD/2008 dan No. 551/16/02/2008 tanggal 22 Desember

2008, terdapat program-program yang terkait dengan Manajemen Keselamatan, Peningkatan Sistem Keselamatan di Jalan, Peningkatan Keselamatan untuk Pengguna Jalan, Peningkatan Keselamatan untuk Sarana dan Prasarana, Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan Medis, Peningkatan penanganan Pasca Kecelakaan. Dari program tersebut di atas sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan/dipasang antara lain :

- 1) Pengadaan Peralatan UPK;
- 2) Pembangunan Sistem Informasi Keselamatan;
- 3) Penyediaan Fasilitas Zona Selamat Sekolah dan Sosialisasi;
- 4) Penyuluhan Informasi Keselamatan;
- 5) Pengadaan Peralatan Sosialisasi;
- 6) Implementasi Lajur Khusus Sepeda Motor;
- 7) Peningkatan Kualitas Mental dan Pengemudi Angkutan Umum Tahun 2010.

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan

Dalam rangka peningkatan kinerja keselamatan transportasi jalan, dilakukan monitoring kinerja transportasi jalan di 9 Propinsi (Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah) yang bertujuan untuk mengetahui sampai mana kinerja keselamatan transportasi jalan di tiap-tiap Propinsi.

c. Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak

Bertujuan untuk mensosialisasikan program keselamatan transportasi. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat dan para Stakeholder.



Gambar IV.11  
Beberapa Bentuk Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Cetak  
Tahun 2010

- d. Sosialisasi dan Evaluasi Keselamatan Masa Angkutan Lebaran.  
Bertujuan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat khususnya yang sedang melakukan perjalanan mudik selama masa angkutan lebaran. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang sedang mudik lebaran. Pada tahun 2010 telah dilakukan sosialisasi pada 8 Propinsi dan 1 Kota (Sumatera Selatan, Lampung, DKI. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Bali dan Kota Surakarta.
- e. ADB Road Safety Awareness Campaign on Road Rehabilitation in Kalimantan.  
Kegiatan ini dilaksanakan di 3 Propinsi dan 1 kota yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kota Balikpapan. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Pegawai Kecamatan dan Dinas Pekerjaan Umum.
- f. Workshop Manajemen Keselamatan.  
Bertujuan untuk mensosialisasikan program keselamatan transportasi. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah para Stakeholder yang terkait di daerah. Pada tahun 2010 telah dilakukan sosialisasi pada 3 Propinsi yaitu DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Tengah.  
Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.



Gambar IV.12  
Workshop Manajemen Keselamatan Tahun 2010 di  
Propinsi Bali

- g. Peningkatan Kapasitas Analisis Data Kecelakaan Anggota Unit Pengkajian Keselamatan (UPK). Kegiatan ini telah dilakukan di Propinsi Jawa Timur dan Kota Surakarta.



Gambar IV.13  
Peningkatan Kapasitas Analisis Data Kecelakaan Anggota  
Unit Pengkajian Keselamatan (UPK)

- h. Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Jalan  
Telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Jalan di 4 Propinsi, yaitu Propinsi Bengkulu, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta dan Bangka Belitung.
- i. Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Alur Pelayaran ASDP  
Telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Audit Keselamatan Alur Pelayaran ASDP di 4 Propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau dan Kalimantan Timur.
- j. Peningkatan Kapasitas Penelitian Kecelakaan ASDP  
Telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Penelitian Kecelakaan ASDP di 2 Propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Selatan dan Jambi.
- k. Monitoring Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  
Telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di 3 Propinsi, yaitu Propinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Jambi.
- l. Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan  
Telah dilaksanakan Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan di 2 Propinsi, yaitu Propinsi Lampung dan Jawa Timur.
- m. Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan Jalan  
Telah dilaksanakan Inspeksi Keselamatan Prasarana dan Sarana Angkutan Penyeberangan di 2 Propinsi, yaitu Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
- n. Pemberdayaan Audit Keselamatan  
Telah dilaksanakan Pemberdayaan Audit Keselamatan di 5 Propinsi, yaitu Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten.
- o. Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP  
Telah dilaksanakan Pemberdayaan Audit Keselamatan ASDP di 3 Propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Jambi.

- p. Kegiatan Audit Keselamatan
- (a) Audit Jalan Nasional Propinsi Jawa Barat;
  - (b) Survey Investigasi Design Detail Engineering Design (DED) Daerah Rawan Kecelakaan di Sragen, Jawa Tengah;
  - (c) Survey Investigasi Design Detail Engineering Design (DED) Daerah Rawan Kecelakaan Alur Pelayaran ASDP di Kalimantan Selatan.
- q. Pelatihan Pengemudi AKAP/AKDP, Taksi Bandara, Angdes/Angkot dan B3  
Kegiatan ini dilaksanakan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jakarta Selatan yang diikuti oleh pengemudi AKAP/AKDP, Taksi Bandara dan B3 yang merupakan perwakilan dari perusahaan-perusahaan otomotif, antara lain :
- 1) Pelatihan pengemudi AKAP/AKDP dilakukan 1 angkatan, diikuti oleh 40 peserta dari 18 perusahaan otobus.
  - 2) Pelatihan pengemudi Taksi dilakukan 1 angkatan, diikuti oleh 37 peserta dari 9 perusahaan otobus.
  - 3) Pelatihan pengemudi B3 dilakukan 1 angkatan, diikuti oleh 40 peserta.



Gambar IV.14  
Pelatihan Pengemudi B3 Tahun 2010

- r. Pelatihan Pengemudi Angdes/Angkot dilakukan 2 angkatan, diikuti 30 peserta pada tiap-tiap angkatan.
- s. Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01-05 Agustus 2010 di Kegiatan ini dilaksanakan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jakarta

Selatan dan penyerahan hadiah kepada pemenang dilakukan pada tanggal 17 September 2010, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pengemudi angkutan umum sehingga dapat turut meningkatkan keselamatan transportasi jalan, diikuti oleh 56 pengemudi dari 29 Propinsi.

t. Pengadaan Helm Anak

Pengadaan helm untuk anak sebanyak 1000 buah yang di bagikan ke beberapa Propinsi.

u. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekan Keselamatan di Daerah

Monitoring dan Evaluasi dilakukan di 7 Propinsi yaitu antara lain Jawa Barat, Lampung, Nangroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

v. Sosialisasi Keselamatan melalui Radio

Sosialisasi berupa talkshow, sandiwara radio di beberapa stasiun radio antara lain RRI Pro 3, Bens Radio Network.

w. Sosialisasi melalui Media Cetak

Sosialisasi keselamatan di Koran, majalah dan tabloid. (Pos Kota, Media Indonesia, Bobo, Hidayah, Tempo, Teen, Genie, Motor Plus dan Otomotif)

x. Sosialisasi melalui Media Elektronik

Sosialisasi Keselamatan di beberapa stasiun TV (Trans7, Indosiar dan JakTV) pada acara Jakarta Bersepeda, Info Niaga, Bukan 4 Mata dan Selamat Pagi.

y. Pembuatan Film Animasi

Bertujuan untuk mensosialisasikan program keselamatan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat seluruh Indonesia.

Pada tahun 2010 pembuatan Film animasi Zeta yang direncanakan akan tayang pada tahun 2011.

z. Workshop Manajemen Kampanye

Dilakukan di 2 Propinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Bangka Belitung.

4. Permasalahan yang dihadapi

- a. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Pada tahun 2009, jumlah kecelakaan mencapai 62.960 kejadian, atau meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya (sumber Polri).
- b. Belum jelasnya arah penanganan keselamatan jalan, hal ini disebabkan belum adanya rencana umum bidang keselamatan jalan sehingga di dalam penanganan keselamatan bersifat sporadif, parsial, dan diskontinuitas. Hal ini hanya menghasilkan pemborosan anggaran Negara.
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan.
- d. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan.

5. Upaya yang dilakukan

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat antara lain sebagai berikut :

- a. Program-program revitalisasi batas kecepatan (speed limits) berikut pemantauan dan penindakan pelanggarannya, upaya penjinakan arus lalu lintas (traffic calming), penggunaan helm pengaman dan sabuk keselamatan, alat-alat penegas keberadaan sepeda motor dan pengendaranya (conspicuity), serta pembuatan/penempatan lajur-lajur khusus sepeda motor disarankan untuk diimplementasikan secara lebih intensif dalam 5 tahun ke depan.
- b. Pencanaan Dekade Aksi keselamatan yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2011, dimana pada saat itu akan ditetapkan Rencana Umum Keselamatan Nasional Keselamatan Angkutan Jalan.

- c. Pembentukan Forum Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Direktorat KTD melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kem. Pekerjaan Umum, Kem. Kesehatan, Kem. Pendidikan Nasional).

B A B V  
KINERJA UPT DAN BUMN  
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

A. KINERJA UPT

1. UPT BPLJSKB BEKASI

a. Kondisi BPLJSKB Saat Ini

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi merupakan salah satu UPT dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mendukung tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor yang bertugas untuk melakukan pengujian beberapa jenis/tipe kendaraan untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut laik jalan atau tidak memiliki sarana pengujian yang terdiri dari :

- 1) Alat Pengujian Passenger Car
  - a) Side Slip (Banzai)
  - b) Brake Tester (Banzai)
  - c) Speed Tester (Anzen)
  - d) Axle Load Meter (Banzai)
  - e) Smoke Tester (Banzai)
  - f) Gasoline Gas Analyzer (Autocheck)
  - g) Car Lift
- 2) Alat Pengujian Sepeda Motor
  - a) Brake Tester (Saxon)
  - b) Speed Tester (Saxon)
  - c) Head Light Tester (L.E.T Automotive)
  - d) Sound Level Meter (Saxon)
  - e) Exhaust Blower
- 3) Alat Pengujian Bus dan Truck
  - a) Head Light Tester (Anzen)
  - b) Side Slip (Banzai)
  - c) Brake Tester (Banzai)

- d) Speed Tester (Anzen)
- e) Axle Load Meter (Banzai)
- f) Load Simulator (Rice Lake)
- 4) Elektrik Generating Set (EGS)
  - a) Genset Merk Deutz
  - b) Pengadaan Solar
- 5) Trafo
  - a) Trafo 1 Merk Union
  - b) Trafo 2 Merk Centrado
- 6) Alat uji Emisi Uero 2
  - a) Jenis M1
  - b) Jenis L

Pada tahun 2010 Balai Pengujian telah melakukan penambahan beberapa alat pengujian baru serta penunjang teknis seperti :

- 1) Alat Uji Passenger Car (Saxon)
  - a) Sideslip Tester (Saxon)
  - b) Speed Tester (Saxon)
  - c) Sound Level Meter (Saxon)
  - d) Gas Analyzer (Saxon)
  - e) Smoke Meter (Saxon)
  - f) RPM Meter
  - g) Chassis Tester (Saxon)
  - h) Roller Brake Tester (Saxon)
  - i) Joint Play Detector (Saxon)
  - j) Headlight Tester (L.E.T Luminoscope)
  - k) Vehicle Weighing System (Unipulse)
- 2) Speed Testing for Motor Cycle (Penggerak Depan)
  - Motorcycle Speedometer Tester (Saxon)

Balai Pengujian hingga tahun 2010 telah melakukan beberapa pengujian kendaraan dari berbagai jenis tipe. Untuk data jumlah dan jenis tipe yang telah dilakukan pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1  
Rekapitulasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor di BPLJSKB  
Tahun 2006 -2010

No.	THN	Jenis Kendaraan								Jumlah Uji
		Penumpang	Barang	Bus	Landasan	Traktor Head	Khusus	Roda 3	Sepeda Motor	
1	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2006	281	57	14	72	-	14	12	152	602
3	2007	301	66	14	83	-	12	5	111	592
4	2008	385	41	14	54	-	10	7	136	647
5	2009	257	31	6	46	15	15	9	59	438
6	2010	384	134	18	40	-	10	10	128	724
TOTAL		1.608	329	66	295	15	61	43	586	3.003

Sumber : Dit. LLAJ Ditjen Hubdat, 2010

b. Permasalahan yang dihadapi

Ada terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BPLJSKB antara lain :

1. Peralatan uji tipe yang ada di Balai PLJSKB rata-rata usianya sudah mencapai 27 tahun sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan teknologi otomotif. Untuk itu diperlukan backup peralatan dan pengadaan alat pengujian baru yang sesuai dengan teknologi otomotif yang mutakhir.
2. Sebagian besar pegawai di Balai Pengujian sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga diperlukan tenaga-tenaga muda sebagai pengganti yang pensiun, khususnya untuk tenaga penguji.
3. Terbatasnya staf yang memiliki kualifikasi pendidikan S1 Teknik atau yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang diperlukan dalam pengembangan Balai PLJSKB mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk pengembangan Balai kedepan.
4. Diperlukan dana yang sangat besar untuk pengembangan pengujian tipe di Balai PLJSKB, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi otomotif yang berkembang sangat pesat.
5. Diklat-diklat teknis yang menunjang pekerjaan bagi para pegawai yang ada di Balai PLJSKB masih cukup terbatas.

c. Upaya yang dilakukan

Untuk mengatasi permasalahan, upaya yang dilakukan antara lain :

1. Perlu ditingkatkan pertemuan – pertemuan rutin untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dilingkungan BPLJSKB dengan instansi pembina

(seperti LLAJ dan Sedditjen), sehingga dari segi SDM tumbuh keakraban, suasana kerja yang baik serta motivasi kerja yang baik pula. Dari segi program akan lebih terorganisir, terkordinasi dan terarah untuk menjadikan Balai PLJSKB yang mendapat pengakuan Global.

2. Penjadwalan dan prioritas terhadap program perbaikan / penggantian / pengadaan peralatan pengujian, utilitas, computer, jaringan khusus untuk akses internet, lemari file dan lain-lain memerlukan manajemen yang lebih baik dengan program yang lengkap, khusus untuk program pekerjaan dengan biaya yang relative besar pembuatan data dukungnya sebaiknya dilaksanakan melalui jasa konsultasi. Mengingat pekerjaan ini cukup rumit dan keterbatasan kemampuan staf Balai PLJSKB
3. Perlu disediakan dana yang cukup untuk pengembangan Balai PLJSKB dan perawatan seluruh alat yang akan dilakukan dengan sistem contract.
4. Perlu penambahan sarjana teknis baru agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pengujian, teknologi kendaraan bermotor dan teknologi peralatan pengujian saat ini.
5. Mengingat peralatan uji emisi gas buang EURO-2 memerlukan perawatan ketelitian yang tinggi serta gas kalibrasi yang masih diimport, serta belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang mampu melakukan kalibrasi disarankan untuk menyediakan dana yang cukup dalam pelaksanaan Maintenance Contract.

## 2. UPT PENYEBERANGAN

### a. UPT. Penyeberangan Kalabahi

#### 1) Kondisi Saat Ini

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mengawali pengoperasiannya sejak pertengahan tahun 1994 membawa dampak sosial dan ekonomi positif terutama ketersediaan fasilitas bongkar muat yang memadai dan dapat memperlancar mobilisasi, distribusi kebutuhan pokok kendaraan maupun penumpang serta memperlancar pelaksanaan program pemerintah di kawasan penyeberangan.

UPT. Penyeberangan Kalabahi selama Tahun 2010 telah melayani 3 (tiga) lintasan yaitu :

- a) Kalabahi – Kupang (2 kali seminggu)
- b) Kalabahi – Teluk Gurita (2 kali seminggu)
- c) Kalabahi – Baranusa Hingga Larantuka (2 kali seminggu)

Lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian sedangkan untuk lintasan masing-masing dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita dan Baranusa hingga Larantuka dilayani oleh kapal tipe 175 gt yang home basenya di pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sedangkan untuk kapal lainnya setelah bongkar muat barang dan penumpang langsung diberangkatkan.

Selain dengan kesediaan layanan angkutan yang menimbulkan animo masyarakat akan jasa dimaksud maka seringkali terjadi kekosongan pelayanan lintasan khusus untuk lintasan dari Kalabahi tujuan Teluk Gurita dan Baranusa hingga Agustus dikarenakan adanya docking tahunan dan tidak tersedianya kapal pengganti dan hal tersebut sudah disampaikan kepada operator tapi sampai sekarang belum ada realisasi.

Hal ini menyangkut pengawasan 2 asset pelabuhan masing-masing berlokasi di Maritaing dan Bakalang telah dilakukan pengawasan berikut pelaporan dan sesuai arahan dari Pemerintah Daerah setempat saat pengawasan mengharapkan kiranya asset tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

a) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

(1) Urusan Kepegawaian

Untuk mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi maka aspek ketersediaan personil (pegawai) cukup penting menyangkut kualitas dan kuantitas.

Pada tahun anggaran 2010 memperoleh tambahan pegawai sebanyak 2 (dua) orang dan kontrak lanjutan tenaga honorer sebanyak 12 orang

Tabel V.2  
Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan  
UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S I	D.III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Penata	III/c	-	-	1	-	-	1
2.	Penata Muda Tk.I	III/b	1	-	-	-	-	1
3.	Penata Muda	III/a	1	-	-	-	-	1
4.	Pengatur	II/c	-	4	1	-	-	5
5.	Honorar	-	1	-	5	1	-	7
J u m l a h			3	4	7	1	-	15

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2010.

## (2) Tata Kelola Keuangan

### i. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Mengingat volume kegiatan yang relatif kecil maka penyetoran BNPB dilakukan 2 (dua) minggu sekali selanjutnya akumulasi setoran dan dilaporkan setiap akhir bulan.

Untuk target PNPB Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi sebesar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Desember 2010 baru mencapai Rp. 19.134.973,- atau 76.54% hal tersebut dikarenakan volume kegiatan yang relatif kecil dan mobilitas kapal yang hanya melayani 3 (tiga) lintasan.

### ii. Anggaran Rutin

Pada tahun Anggaran 2010 Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi mendapat alokasi dana rutin Rp. 1.450.964.000,-. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional yang sampai dengan bulan Desember mencapai Rp. 1.133.294.920,- atau 128,03% dari keseluruhan dana tersebut untuk meningkatkan daya serap khusus terkait belanja modal yang bertanda bintang berupa kegiatan pembangunan gedung operasional 2 (dua) unit masing-masing berukuran 36 m2 dan pengadaan pakaian dinas.

### iii. Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN)

Keberadaan barang inventaris milik negara sebagai sarana penting untuk mendukung optimalisasi kegiatan kepelabuhanan. Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi telah melakukan inventarisasi dan pelaporan berkala meliputi

keseluruhan barang yang dimiliki termasuk 2 (dua) bidang tanah berikut dermaga plengsengan milik Kementerian Perhubungan dengan status hak pakai.

b) Bidang Operasional

Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi selama tahun 2010 telah melayani 3 (tiga) lintasan dimana lintasan tersebut dilayani oleh beberapa kapal secara bergantian. Data produksi Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi tahun 2010 dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :

Tabel V.3  
Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010

No	Keterangan	Turun/Bongkar	Naik/Muat
1.	Penumpang Dewasa	30.782	24.838
2.	Penumpang Anak	1.219	1.251
3.	Golongan I	-	-
4.	Golongan II	3.259	1.670
5.	Golongan III	144	287
6.	Golongan IV	136	197
7.	Barang (Ton)	1.083	623

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi, 2010.

2) Permasalahan yang dihadapi

- a) Dengan selesai dibangunnya dermaga II (plengsengan) tidak bisa langsung digunakan karena belum tersedia fasilitas tambat yang memadai
- b) Mengingat lebih dari 50% status pegawai adalah tenaga kontrak maka sangat mempengaruhi kinerja secara optimal
- c) Daya serap realisasi DIPA yang masih dirasakan kurang karena ada sebagai dana berupa Belanja Modal yang tidak dapat dicairkan sehingga mempengaruhi presentasi daya serap DIPA 2010
- d) Alokasi anggaran perjalanan dinas yang relatif kecil sehingga mengganggu kegiatan lintas komunikasi yang ,esti dilakukan secara regular maupun insidentil
- e) Dengan ditolakny a usulan pencairan dana tanda bintang berupa pembangunan gedung operasional maka membutuhkan waktu yang cukup agar dapat diusulkan kembali mengingat legalitas lahan.

3) Upaya yang dilakukan

- a) Mengusulkan untuk digunakannya dermaga II (plengsengan) dengan kegiatan tambat yang dilengkapi dengan fasilitas tambat
- b) Akan diusulkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Darat agar dapat dipertimbangkan sesuai formasi pegawai untuk diangkat menjadi CPNS sesuai kebutuhan.
- c) Mengingat Perolehan pencairan pembangunan gedung operasional adalah berupa persyaratan dan legalitas lahan maka dapat dilakukan pendekatan dengan Pemerintah Daerah Alor karena yang menjadi persyaratan bukan hanya ijin kelola lahan dari Bupati Alor tapi sertifikat hak pakai.
- d) Mengusulkan dengan data dukung agar alokasi DIPA dapat mencakup keseluruhan Perjalanan dinas Pada tahun Anggaran berjalan.
- e) Kiranya setiap usulan fisik kendalanya lebih melihat kepada aspek legalitas sebagai bagian dari persyaratan.

b. UPT. Penyeberangan Kariangau

1) Kondisi Saat Ini

Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau adalah UPT yang dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Pelabuhan Penyeberangan Kariangau melayani 3 lintasan, yaitu :

- a) Lintasan Balikpapan – Penajam (lintas antar Kabupaten – Kota)
- b) Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Mamuju (Sulawesi Barat)
- c) Lintasan Balikpapan (Kalimantan Timur) – Taipa (Sulawesi Tengah)

Dengan keseluruhan armada berjumlah 11 (sebelas) unit Kapal Motor Penyeberangan yang beroperasi pada masing-masing lintasan adalah:

- a) Balikpapan – Penajam
  - (1) KMP. Bili (PT. ASDP Indonesia Ferry)
  - (2) KMP. Kambaniru (PT. ASDP Indonesia Ferry)
  - (3) KMP. Goropa (PT. ASDP Indonesia Ferry)
  - (4) KMP. Trunojoyo (PT. Dharma LautanUtama)
  - (5) KMP. Ulin Ferry (PT. Dharma Lautan Utama)
  - (6) KMP. Tawes (PT. Pasca Dana Sundari)

- (7) KMP. Kineret (PT. Sadena Mitra Bahari)
- (8) KMP. Dharma Badjra (PT. Dharma Lautan Utama)
- b) Balikpapan – Mamuju
  - (1) KMP. Mandala Nusantara (PT. Jembatan Madura)
  - (2) KMP. Jembatan Madura (PT. Jembatan Madura)
- c) Balikpapan – Taipa
  - (1) KMP. Madani (PT. ASDP Indonesia Ferry)

Meskipun pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah diresmikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan bagi para pemakai jasa, sehingga transportasi darat pada ketiga lintasan tersebut diatas cukup lancar tanpa adanya hambatan yang berarti.

a) Bidang Administrasi

Kegiatan pada bidang ini adalah kegiatan ketata usahaan atau administrasi perkantoran yang meliputi :

(1) Urusan Umum

Selama tahun 2010 data surat – menyurat tercatat sebanyak 254 surat yang masuk, sedangkan surat keluar sebanyak 209 surat.

(2) Urusan rumah tangga Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik termasuk Pengawasan barang – barang Inventaris Kantor yang ditangani oleh Bendaharawan Materiil. Namun kami menyadari bahwa dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang dipengaruhi oleh kekurangan pegawai, adakalanya 1 (satu) pegawai merangkap sampai dengan 2 (dua) jabatan belum termasuk tugas – tugas operasional. Laporan barang-barang inventaris tersebut diatas yang berada dalam lingkungan Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau telah dilaksanakan dengan baik.

(3) Urusan Kepegawaian

Hingga akhir tahun 2010 jumlah pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tercatat sebanyak 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil sudah termasuk Pimpinan. Jika melihat tugas – tugas yang mengelola administrasi dan keuangan / jabatan –

jabatan fungsional serta tugas-tugas operasional di lapangan, idealnya jumlah pegawai yang tersedia berjumlah 30 (tiga puluh) orang pegawai. Namun demikian tetap diusahakan untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sebaik-baiknya dengan keterbatasan personil yang ada.

Sedangkan untuk pegawai Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau sebanyak 24 orang dengan perincian : PNS (14) dan tenaga honorer (10 orang)

Tabel V.3  
Jenjang Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan  
UPT. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau

No	PANGKAT	GOL	TINGKAT PENDIDIKAN					Jumlah
			S I	D.III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Penata TK.I	III/d	1	-	-	-	-	1
2.	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	2	-	-	2
3.	Penata Muda	III/a	1	-	-	-	-	1
4.	Pengatur	II/c		5				5
5.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	2	-	-	2
6.	Pengatur Muda	II/a	-	-	3	-	-	3
J u m l a h			3	5	7	-	-	14

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau,2010

#### (4) Urusan Keuangan

- i. Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau pada Tahun Anggaran 2010 memperoleh dana anggaran yang dituangkan dalam DIPA No. 0162/022-03.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 8.142.251.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Belanja Modal Rp. 6.480.400.000,-
  - Belanja Pegawai Rp. 497.510.000,-
  - Belanja Barang Rp. 1.164.341.000,-
  - Jumlah Rp. 8.142.251.000,-
- ii. Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 6.351.610.705,-
- iii. Pertanggung Jawaban keuangan atas realisasi penggunaan anggaran tersebut secara berkala dilaporkan dalam bentuk Laporan Bulanan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan pengiriman serta tembusan sesuai ketentuan yang berlaku.

- iv. Pemeriksaan Kas oleh Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni setiap Triwulan disamping itu pula pada waktu – waktu tertentu dilaksanakan pemeriksaan bila diperlukan.
- v. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Dengan jumlah penerimaan yang telah disetorkan selama tahun 2010 terlampir.

b) Bidang Operasional

Kegiatan operasional Pelabuhan pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas-tugas yang sarannya sebagai berikut :

- (1) Terciptanya kelancaran arus lalu lintas dan angkutan Penyeberangan barang dan kendaraan, yang didukung oleh jumlah kapal motor penyeberangan yang memadai.
- (2) Pemanfaatan seluruh prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang tersedia guna mendukung kelancaran angkutan antara lain : Dermaga, Jalan dan Lapangan Parkir, Ruang Tunggu dan Pos – Pos Pengawasan
- (3) Pelaksanaan pungutan jasa pelabuhan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan dasar hukum pungutannya Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2009 (Jasa Sandar, Jasa Tanda Masuk Pelabuhan, Jasa Pemeliharaan dermaga, Sewa Ruang, Sewa Listrik dan Air, khusus untuk lintasan Balikpapan – Mamuju, pada Kantor Pelabuhan Penyeberangan Kariangau tidak dilakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhitung mulai Oktober 2010 karena lintasan tersebut melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta dan bukan pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau)
- (4) Penertiban dan pengawasan dalam Wilayah Pelabuhan yang dilaksanakan dengan pihak terkait.

c) Bidang Pengaturan

Secara umum pengaturan berdasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM.60 Tahun 2002, adapun hal-hal lain yang diatur secara khusus antara lain :

- (1) Pelaksanaan pungutan jasa Pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 06 Januari 2009.
- (2) Penertiban dan Pengamanan Pelabuhan berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/B/256/1969 dan 010/20/MPHB/1969 tanggal 29 Mei 1969.

Pengaturan penumpang, barang dan kendaraan melalui Pelabuhan baik tiba maupun berangkat adalah sebagai berikut :

(1) Berangkat

- i. Pada umumnya penumpang langsung ke loket penjualan tiket mendapatkan tiket dan langsung menuju kapal melalui Pos Pengawasan guna pemeriksaan ticket.
- ii. Kendaraan
  - o Kendaraan muatan barang / Truck diparkir di lapangan parkir yang telah disediakan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, selanjutnya didaftar dan diurutkan naik ke kapal apabila telah membeli ticket dan melunasi kewajiban jasa pelabuhan.
  - o Wajib daftar tersebut dan pemenuhan kewajiban jasa pelabuhan diperlakukan pula terhadap kendaraan jenis lainnya (Bus, dan kendaraan pribadi baik roda 4 maupun roda 2)
- iii. Barang dimuat ke kapal dengan 2 (dua) cara pemuatan :
  - o Muatan barang diatas kendaraan seperti cara pemuatan di Pelabuhan Penyeberangan lainnya yang sudah tidak menerima barang curah.
  - o Muatan barang curah / diatur langsung diatas deck kapal yang jumlahnya hanya sedikit, sebab hanya mengisi ruang yang kosong, apabila muatan kendaraan diatas kapal tidak penuh. Dengan cara pemuatan ini oleh pedagang masih dianggap lebih menguntungkan dari pada langsung diatas

kendaraan, dan cara pemuatan ini masih dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja barang di pelabuhan untuk membiayai hidup keluarganya.

(2) Tiba

- i. Penumpang yang menggunakan kendaraan diarahkan keluar melalui pintu gerbang pelabuhan untuk selanjutnya ke tempat tujuan masing-masing sedangkan penumpang non kendaraan diarahkan ke ruang tunggu, selanjutnya memilih kendaraan umum yang telah disediakan di lapangan parkir untuk menuju tempat tujuan akhir masing-masing.
- ii. Semua jenis kendaraan sebelum keluar pelabuhan diwajibkan untuk melunasi kewajiban jasa pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan seperlunya terhadap muatannya, kemudian melanjutkan perjalanan sesuai tujuan.
- iii. Barang
  - o Bagi muatan barang diatas kendaraan proses pelaksanaan pelayanannya seperti kendaraan, diarahkan langsung melalui pintu gerbang keluar. Bagi muatan barang curah, dimuat kembali ke kendaraan yang menjemput dengan menggunakan jasa tenaga kerja di pelabuhan dan kendaraan yang memuat barang curah diperbolehkan keluar setelah menyelesaikan kewajibannya dengan pihak pelabuhan.

d) Bidang Pembangunan

Kegiatan ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya baik yang bersifat proyek maupun pemeliharaan rutin yang anggarannya tertuang dalam DIPA Pelabuhan Penyeberangan Kariangau T.A 2010. Untuk kegiatan pembangunan yang bersifat proyek telah selesai pengerjaannya sedangkan yang bersifat pemeliharaan masih dalam tahap pelaksanaan, berupa pemeliharaan gedung dan bangunan. Posisi pelaksanaan belanja barang / modal saat ini untuk pekerjaan instalasi penggantian Hidrolik MB (Moveable Bridge) telah dikontrakkan dan telah selesai pengerjaannya.

Tabel V.3  
Data Produksi Angkutan Penyeberangan Ferry Tahun 2010

Keterangan	Kariangau - Panajam	Panajam-Kariangau	Balikpapan – Mamuju – Balikpapan	Balikpapan – Taipa – Balikpapan
Trip	13.973	13.973	284	91
Jml. Pnp	211.800	87.682	43.864	9.624
Gol I	39	29	8	3
Gol II	163.859	166.226	2.650	682
Gol III	122	142	0	15
Gol IV a	105.630	108.962	894	806
Gol IV b	34.258	36.370	0	0
Gol V a	1.118	1.179	3.688	583
Gol V b	55.073	57.409	0	0
Gol VI a	4.755	5.199	456	209
Gol VI b	16.735	18.373	0	0
Gol VII	1.804	1.704	35	83
Gol VIII	4	11	6	28

Sumber : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, 2010

2) Permasalahan yang dihadapi

- a) Masih adanya pendangkalan pada alur muara sungai Wain Kariangau, sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal oleh kegiatan operasi penyeberangan lintasan Balikpapan – Mamuju yang selama ini melakukan operasi bongkar muat angkutan pada pelabuhan swasta Kampung baru.
- b) Masih adanya kapal penyeberangan untuk lintasan Kariangau – Panajam yang sering kandas pada alur muara sungai Wain Kariangau karena pendangkalan alur muara sungai Wain Kariangau tersebut.
- c) Masih terjadi antrian kendaraan pada lintasan Kariangau – Panajam.
- d) Masih kurangnya sumber daya manusia untuk dapat memperlancar kegiatan operasional dan administrasi.

3) Upaya yang dilakukan

- a) Melakukan pelaksanaan kegiatan pengerukan disepanjang alur yang dangkal.
- b) Guna lebih meningkatkan pelayanan dan pengaturan di UPT. Kariangau perlu adanya penambahan pegawai menjadi 30 (tiga puluh) orang pegawai yang diharapkan dapat terealisasi sebelum penghapusan sistem Kerja Sama Operasional (KSO).

### c. UPT. Penyeberangan Gorontalo

- 1) Lintasan penyeberangan
  - a) Gorontalo – Pagimana (Sulteng).
  - b) Gorontalo – Wakai – Ampana.
- 2) Jadwal kapal penyeberangan
  - a) KMP. Baronang (Komersil) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Pagimana.
  - b) KMP. Tuna Tomini (Perintis) PT. ASDP, Lintas Gorontalo – Wakai – Ampana.
- 3) Produksi Angkutan 2010
  - a) Lintas Gorontalo – Pagimana
    - (1) Penumpang : 86.618 Penumpang
    - (2) R4 : 5.634 Unit
    - (3) R2 : 2.775 Unit
  - b) Gorontalo – Wakai
    - (1) Penumpang : 16.648 Penumpang
    - (2) R4 : 612 Unit
    - (3) R2 : 92 Unit
  - c) Wakai – Ampana
    - (1) Penumpang : 12.719 Penumpang
    - (2) R4 : 961 Unit
    - (3) R2 : 157 Unit
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a) Jumlah Karyawan dengan Jabatan Struktur
    - (1) Kepala Kantor / UPT : 1 orang (Eselon V)
    - (2) Petugas TU dan Kepegawaian : 1 orang (Non Eselon)
    - (3) Fungsional Lalu Lintas Angkutan : 1 orang (Non Eselon)
    - (4) Fungsional Jasa-jasa Pelabuhan : 1 orang (Non Eselon)
    - (5) Fungsional Sarana dan Prasarana : 1 orang (Non Eselon)
    - (6) Fungsional Keamanan dan Ketertiban : 1 orang (Non Eselon)
    - (7) Staff : 17 orang
- 5) Sarana dan Prasarana
  - a) Luas Tanah Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo : 42.486 m<sup>2</sup>
  - b) Luas Dermaga Plengsengan : 96 m<sup>2</sup>
  - c) Luas Gedung Kantor : 198 m<sup>2</sup>

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| d) Luas Crag Terminal Penumpang           | : 360 m <sup>2</sup>          |
| e) Luas Rumah Operasional dan Rumah Dinas | : 135 m <sup>2</sup> (3 unit) |
| f) Luas Lapangan Parkit dan Jalan         | : 6.474 m <sup>2</sup>        |
| g) Luas Gang Way                          | : 385 m <sup>2</sup>          |
| h) Kapasitas Bak penampung air tawar      | : 20 m <sup>2</sup>           |
| i) Cat Walk                               | : 69 m <sup>2</sup>           |
| j) Breasting Dolpin dan Fender            | : 3 buah                      |
| k) Morning Dolpin                         | : 4 buah                      |
| l) Jembatan Timbang Crag                  | : 1 set                       |
| m) Daya Listrik PLN                       | : 13.200 watt                 |
| n) Genset 15 KVA                          | : 12.200 watt                 |
| o) Luas Kolom Pelabuhan                   | : 27.375 m <sup>2</sup>       |
| p) Kedalaman Kolam Pelabuhan              | : 4,5 m <sup>2</sup>          |
| q) Break Water                            | : 2.700 m <sup>2</sup>        |
| r) Rambu Suar (Beacon tetap)              | : 5 unit                      |
| s) Speed Boat (rusak)                     | : 1 unit                      |
| t) Pagar Tembok Pelabuhan                 | : 1.200 m <sup>2</sup>        |
| u) Pagar BRC                              | : 600 m <sup>2</sup>          |
| v) Mushola                                | : 36 m <sup>2</sup>           |
- 6) Data Sarana Kapal Penyeberangan
- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a) KMP. Baronang (Komersil)           |                          |
| (1) Lintas Penyeberangan              | : Gorontalo – Pagimana   |
| (2) Waktu Tempuh Pelayanan            | : 10 s/d 12 jam          |
| (3) Jadwal Trip                       | : 2 hari sekali          |
| (4) Kapasitas Angkut Penumpang        | : 320 s/d 400 orang      |
| (5) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 | : 21 unit                |
| (6) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 | : 20 s/d 30 unit         |
| (7) Kapasitas Angkut Barang           | : 50 ton                 |
| (8) Spesifikasi Teknis KMP. Baronang  |                          |
| • Kapasitas Muat                      | : 526 GT (tahun 1993)    |
| • Panjang                             | : 45,30 m                |
| • Lebar                               | : 12 m                   |
| • Draft air                           | : 2 m                    |
| • Main Engine                         | : Nigata 2 x 650 HP      |
| • Mesin Pembantu                      | : 2 x 115 HP (Generator) |

- b) KMP. Tuna Tomini (Perintis)
- (1) Lintas Penyeberangan : Gorontalo–Wakai-Ampana
  - (2) Waktu Tempuh Pelayanan : 17 s/d 18 jam
  - (3) Jadwal Trip : seminggu dua kali
  - (4) Kapasitas Angkut Penumpang : 250 s/d 300 orang
  - (5) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 4 : 16 unit
  - (6) Kapasitas Angkut Kendaraan Roda 2 : 20 s/d 30 unit
  - (7) Kapasitas Angkut Barang : 50 ton
  - (8) Spesifikasi Teknis KMP. Tuna Tomini
    - Kapasitas Muat : 546 GT (tahun 2006)
    - Panjang : 40,3 m
    - Lebar : 10,5 m
    - Draft air : 2 m
    - Main Engine : Yanmar 2 x 620 HP
    - Mesin Pembantu : 2 x 115 HP (Generator Listrik)

## B. KINERJA BUMN

### 1. PERUM DAMRI

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumber Daya Manusia	6,185	5,910	5,614	5,614	5,597
2	Alat Produksi					
	a. Armada	1,926	1,674	1,691	1,896	1,965
	b. Siap Guna	1,775	1,635	1,593	1,838	1,715
	c. Siap Guna Operasi	1,285	1,229	1,309	1,424	1,400
	d. Siap Operasi	1,075	1,016	1,108	1,190	1,259
3	Produksi (dlm. Ribuan)					
	a. Panjang Perjalanan	94,227	96,436	98,086	107,006	113,456
	b. Jasa Angkutan					
	- Penumpang	49,989	47,460	45,407	43,804	42,512
	- Penumpang - KM	899,027	847,415	1,007,875	981,096	1,088,844
	- Ton - KM	12,398	14,002	13,362	20,574	26,436
4	Laba Rugi (dlm. Ribuan Rupiah)					
	a. Pendapatan					
	- Operasional	354,775,756	364,895,852	440,968,191	492,872,902	505,663,748

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
	- Subsidi	25,507,488	29,597,427	37,105,926	46,739,673	31,756,421
	- Lain-lain	8,194,322	18,467,904	22,121,549	8,219,157	9,899,792
	Jumlah Pendapatan	388,477,566	412,961,183	500,195,666	547,831,732	547,319,961
	b. Biaya					
	- Komisi Penjualan	7,017,780	7,871,105	9,696,518	9,960,447	11,365,347
	- Biaya Langsung	307,499,297	312,693,935	351,042,760	367,338,518	352,350,218
	- Biaya Tidak Langsung	18,743,813	17,297,537	17,982,012	19,885,334	23,637,761
	- Biaya Usaha & Adm. Umum	88,491,634	76,508,953	94,203,583	110,107,739	125,160,804
	- Biaya Lain-lain	2,964,581	1,760,149	2,058,327	1,072,399	476,991
	Jumlah Biaya	424,717,105	416,131,679	474,983,200	508,364,437	512,991,151
	c. Laba - Rugi (sebelum pajak)	36,239,539	3,170,496	25,212,466	39,467,295	34,328,810
	d. Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan	7,352,666	10,742,161	9,833,950	0	0
	e. Laba - Rugi (Bersih)	28,886,873	7,571,665	15,378,516	39,467,295	34,328,810

Sumber : Perum DAMRI, Oktober 2010.

## 2. PT. ASDP INDONESIA FERRY

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Alat Produksi						
	a. Armada	89	89	80	87	91	97
	b. Pelabuhan	34	34	34	34	34	34
	c. Lintas						
	- Komersial	33	36	32	35	35	40
	- Perintis	80	94	104	86	82	97
2	Segmen Penyeberangan Komersial						
	a. Trip	104,526	114,936	93,979	97,464	97,551	121,454
	b. Penumpang (orang)	4,695,684	5,094,580	4,352,391	5,047,858	5,074,062	5,147,072
	c. R-2 (unit)	1,578,438	2,004,528	1,679,293	1,826,384	2,044,866	2,266,288
	d. R-4 (unit)	872,530	855,788	1,127,897	1,268,856	1,188,714	1,301,830
	e. Barang (ton)	645,865	554,377	411,761	470,028	368,234	409,924
3	Segmen Penyeberangan Perintis						
	a. Trip	27,919	17,793	27,932	27,033	37,041	25,079
	b. Penumpang (orang)	919,581	579,681	667,087	575,297	633,095	571,447

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
c.	R-2 (unit)	233,965	131,166	132,401	135,264	230,930	163,661
d.	R-4 (unit)	97,017	47,932	55,288	53,910	108,654	61,843
e.	Barang (ton)	152,337	63,416	83,928	130,640	140,313	58,611

Sumber : PT. ASDP Indonesia Ferry, 2010

## B A B VI P E N U T U P

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2010 merupakan wahana informasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini tercermin pelaksanaan kegiatan dibidang transportasi darat yaitu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa angkutan darat khususnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi darat yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum laporan tahunan ini menggambarkan kegiatan-kegiatan transportasi darat yang meliputi bidang angkutan jalan, bidang angkutan penyeberangan dan bidang angkutan perkotaan serta keselamatan transportasi darat yang membutuhkan faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan, operasional dan pembangunan yaitu dengan adanya kebijakan dan program yang jelas, tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sistem kerjasama dan koordinasi yang baik, serta didukung dengan peralatan kerja yang cukup.

Sedangkan UPT dan BUMN dibawah pembinaan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat perlu peningkatan tuntutan pelayanan jasa angkutan, terus mempertahankan dan mengembangkan pelayanan jasa angkutan dengan terus melakukan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan yaitu dengan peningkatan kinerja SDM yang ada.

## LAMPIRAN I

### A. LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI REALISASI DATA PENUMPANG ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2010 (1431 H) PERIODE ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK (H- S/D H+7)

#### 1. UMUM

Realisasi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi (darat, kereta api, laut dan udara) mengalami PENURUNAN (tabel 1a) sebesar 0,35 % dibandingkan dengan jumlah pemudik pada tahun 2009 pada periode yang sama dari H-7 sampai dengan H+7 (dari jumlah 13.980.378 pemudik pada tahun 2009 menjadi 13.931.204 pemudik pada tahun 2010).

Tabel 1a.  
Prosentase Realisasi Penumpang Umum  
Angkutan Lebaran Tahun 2009 & 2010  
(Periode H-7 s/d H+7)

NO	MODA	JUMLAH PEMUDIK		%
		2009	2010	
ARUS MUDIK (H-7 s/d H+7)				
A. Angkutan Umum				
1	Moda Darat			
	a. Angkutan Jalan	5,383,629	5,464,134	1.50%
	b. Angkutan Penyeberangan	3,282,763	3,164,896	-3.59%
2	Moda Kereta Api	2,431,948	2,393,277	-1.59%
3	Moda Laut	718,307	409,429	-43.00%
4	Moda Udara	2,163,731	2,499,468	15.52%
Sub Total Mudik		13,980,378	13,931,204	-0.35%

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 1a.

Perbandingan Jumlah Pemudik pada 4 Moda Angkutan



Realisasi jumlah angkutan pribadi (sepeda motor dan kendaraan pribadi) berdasarkan pemantauan di 6 (enam) titik (Ciasem, Sadang, Merak, Cikoneng, Rajamandala dan Tanjung Pura) sebagai berikut :

- Sepeda motor mengalami penurunan sebesar 15 % (dari jumlah 2.711.149 sepeda motor pada tahun 2009 menjadi 2.302.246 sepeda motor pada tahun 2010)
- Mobil pribadi mengalami peningkatan sebesar 18 % (dari jumlah 1.306.219 kendaraan pada tahun 2009 menjadi 1.540.481 kendaraan pada tahun 2010).

Tabel 1b.  
 Prosentase Realisasi Angkutan Pribadi  
 Angkutan Lebaran Tahun 2009 & 2010  
 (Periode H-7 s/d H+7)

NO	MODA	JUMLAH KEND. (UNIT)		%
		2009	2010	
<b>ARUS MUDIK (H-7 s/d H+7)</b>				
<b>B. Angkutan Pribadi :</b>				
1	Sepeda Motor	2,711,149	2,302,246	-15%
2	Mobil Pribadi	1,306,219	1,540,481	18%
<b>Sub Total Mudik</b>		<b>4,017,368</b>	<b>3,842,727</b>	<b>-4.35%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 1b.

Perbandingan Jumlah Pemudik pada Sepeda Motor dan Mobil Pribadi



## 2. Penumpang Moda Angkutan Jalan

Penumpang Moda angkutan jalan pada Angkutan Lebaran Tahun 2010 (1431 H) jika dibandingkan dengan Angkutan Lebaran Tahun 2009 (1430 H) pada pantauan H-7 hingga H+7 terjadi penurunan (tabel 2) jumlah bus yang berangkat sebesar 0,26 % dari 266.303 bus pada tahun 2009 menjadi 265.609 bus pada tahun

2010. Untuk jumlah penumpang yang terpantau pada H-7 hingga H+7 juga mengalami peningkatan sebesar 1,50 % dari 5.383.629 penumpang menjadi 5.464.134 penumpang.

Sesuai dengan data realisasi penumpang moda angkutan jalan pada tahun 2010, puncak arus mudik terjadi pada H-2 (8 September 2010) dengan jumlah 452.472 penumpang dengan prosentase kenaikan sebesar 0,82 % jika dibandingkan dengan tahun 2009. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+1 (12 September 2010) dengan jumlah 439.789 penumpang dengan prosentase kenaikan sebesar 31,31 % jika dibandingkan dengan tahun 2009.

Tabel 2.  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan  
Di 12 Provinsi pada 44 Terminal Utama/Bantuan

HARI	JUMLAH BUS		%	JUMLAH PENUMPANG		%
	2009	2010		2009	2010	
<b>Arus Mudik</b>						
H-7	16,802	14,194	-15.52%	352,612	215,814	-38.80%
H-6	14,139	15,123	6.96%	194,273	266,076	36.96%
H-5	14,541	17,727	21.91%	261,851	312,361	19.29%
H-4	16,598	17,841	7.49%	294,954	313,658	6.34%
H-3	19,252	18,862	-2.03%	403,471	405,553	0.52%
H-2	18,065	18,876	4.49%	448,802	452,472	0.82%
H-1	14,046	16,927	20.51%	346,288	340,486	-1.68%
H1	11,476	13,449	17.19%	293,271	278,525	-5.03%
H2	13,863	15,639	12.81%	402,029	393,704	-2.07%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>138,782</b>	<b>148,638</b>	<b>7.10%</b>	<b>2,997,551</b>	<b>2,978,649</b>	<b>-0.63%</b>
<b>Arus Balik</b>						
H+1	16,389	18,450	12.58%	334,917	439,789	31.31%
H+2	23,797	16,398	-31.09%	293,489	294,121	0.22%
H+3	17,963	17,014	-5.28%	369,242	401,468	8.73%
H+4	19,569	18,243	-6.78%	358,394	369,417	3.08%
H+5	16,982	16,692	-1.71%	349,357	347,569	-0.51%
H+6	17,775	14,603	-17.85%	358,001	301,330	-15.83%
H+7	15,046	15,571	3.49%	322,678	331,791	2.82%
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>127,521</b>	<b>116,971</b>	<b>-8.27%</b>	<b>2,386,078</b>	<b>2,485,485</b>	<b>4.17%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>266,303</b>	<b>265,609*</b>	<b>-0.26%</b>	<b>5,383,629</b>	<b>5,464,134</b>	<b>1.50%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

\*) Perbandingan tanpa terminal Pal Enam dan Samarinda Seberang

Grafik 2a.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Jalan pada Arus Mudik



Grafik 2b.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Jalan pada Arus Balik



Tabel 3.  
 Realisasi Penumpang Moda Angkutan Jalan  
 (2 Titik Baru Terminal Pal Enam, Kalimantan Selatan dan Samarinda  
 Seberang, Kalimantan Timur)

HARI	JUMLAH BUS	JUMLAH PENUMPANG
	2010	2010
Arus Mudik		
H-7	81	1,585
H-6	94	1,946
H-5	100	3,175
H-4	108	2,779
H-3	112	2,930
H-2	99	2,001
H-1	50	1,970
H1	18	780
H2	59	1,384
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>721</b>	<b>18,550</b>
Arus Balik		
H+1	46	1,570
H+2	94	3,158
H+3	69	2,766
H+4	102	2,719
H+5	68	2,011
H+6	63	1,745
H+7	93	1,075
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>535</b>	<b>15,044</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>1,256</b>	<b>33,594</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

### 3. Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan

Penumpang Moda angkutan penyeberangan dari H-7 sampai dengan H+7, dibandingkan dengan Lebaran Tahun 2009 (1430 H) jumlah penumpang terjadi penurunan sebesar 3,59 % dari 3.282.763 orang menjadi 3.164.896 orang.

Sesuai dengan data realisasi penumpang moda angkutan Penyeberangan pada tahun 2010, puncak arus mudik terjadi pada H-2 (8 September 2010) dengan jumlah 310.946 penumpang. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+4 (15 September 2010) dengan jumlah 223.078 penumpang.

Tabel 4.  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Penyeberangan di 14 Lintas Penyeberangan

NO	HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
		2009	2010	
Arus Mudik				
1	H-7	149,512	125,373	-16.15%
2	H-6	136,162	175,029	28.54%
3	H-5	148,886	211,112	41.79%
4	H-4	194,395	186,571	-4.02%
5	H-3	267,891	236,101	-11.87%
6	H-2	330,892	310,946	-6.03%
7	H-1	254,969	230,768	-9.49%
8	H1	159,666	126,273	-20.91%
9	H2	151,933	123,029	-19.02%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>		<b>1,794,306</b>	<b>1,725,202</b>	<b>-3.85%</b>
Arus Balik				
10	H+1	154,799	176,308	13.89%
11	H+2	191,020	213,886	11.97%
12	H+3	201,142	215,951	7.36%
13	H+4	209,576	223,078	6.44%
14	H+5	243,639	194,561	-20.14%
15	H+6	275,615	196,534	-28.69%
16	H+7	212,666	219,376	3.16%
<b>TOTAL Arus Balik</b>		<b>1,488,457</b>	<b>1,439,694</b>	<b>-3.28%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>		<b>3,282,763</b>	<b>3,164,896</b>	<b>-3.59%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 3a.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan SDP pada Arus Mudik



Grafik 3b.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan SDP pada Arus Balik



Realisasi jumlah kendaraan roda dua dan roda empat moda angkutan penyeberangan pada periode angkutan lebaran 2010 dari H-7 sampai dengan H+7 mengalami penurunan untuk kendaraan roda dua sebesar 0,19 % dari 370.790 kendaraan pada tahun 2009 menjadi 370.081 kendaraan pada tahun 2010, sedangkan untuk kendaraan roda empat mengalami peningkatan sebesar 8,16 % dari 298.445 kendaraan pada tahun 2009 menjadi 322.796 kendaraan pada tahun 2010.

Tabel 5a.

Realisasi Kendaraan Roda 2 Moda Angkutan Penyeberangan

NO	HARI	JUMLAH KENDARAAN		%
		2009	2010	
<b>Arus Mudik</b>				
1	H-7	12,598	11,632	-7.67%
2	H-6	13,373	18,000	34.60%
3	H-5	14,489	23,045	59.05%
4	H-4	20,785	21,712	4.46%
5	H-3	29,912	27,054	-9.55%
6	H-2	43,896	41,774	-4.83%
7	H-1	38,891	25,393	-34.71%
8	H1	18,634	16,224	-12.93%
9	H2	17,609	18,935	7.53%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>		<b>210,187</b>	<b>203,769</b>	<b>-3.05%</b>
<b>Arus Balik</b>				
10	H+1	17,802	22,078	24.02%
11	H+2	21,477	29,047	35.25%
12	H+3	22,170	25,501	15.02%
13	H+4	20,192	25,112	24.37%
14	H+5	26,042	21,390	-17.86%
15	H+6	31,225	21,231	-32.01%
16	H+7	21,695	21,953	1.19%
<b>TOTAL Arus Balik</b>		<b>160,603</b>	<b>166,312</b>	<b>3.55%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>		<b>370,790</b>	<b>370,081</b>	<b>-0.19%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

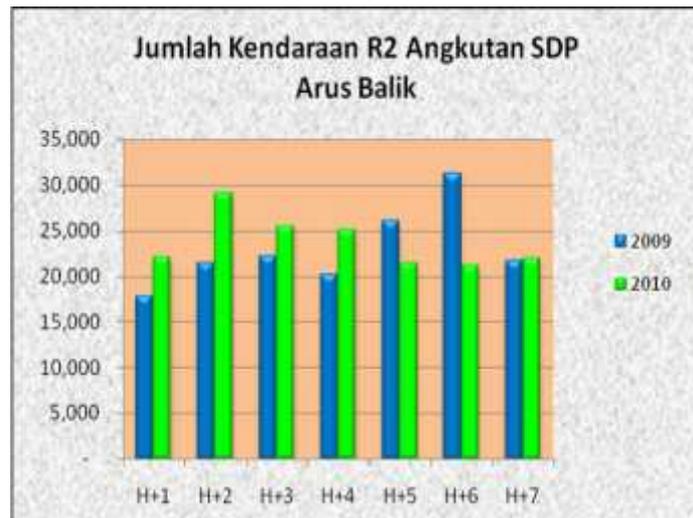
Grafik 4a.

Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Dua SDP pada Arus Mudik



Grafik 4b.

Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Dua SDP pada Arus Balik



Tabel 5b.

Realisasi Kendaraan Roda 4 Moda Angkutan Penyeberangan

NO	HARI	JUMLAH KENDARAAN		%
		2009	2010	
Arus Mudik				
1	H-7	15,273	17,039	11.56%
2	H-6	14,705	20,166	37.14%
3	H-5	16,454	21,249	29.14%
4	H-4	20,200	19,075	-5.57%
5	H-3	25,380	22,781	-10.24%
6	H-2	26,189	25,070	-4.27%
7	H-1	19,984	18,531	-7.27%
8	H1	14,630	13,739	-6.09%
9	H2	12,501	13,362	6.89%
TOTAL Arus Mudik		165,316	171,012	3.45%

NO	HARI	JUMLAH KENDARAAN		%
		2009	2010	
<b>Arus Balik</b>				
10	H+1	13,083	16,636	27.16%
11	H+2	16,877	20,846	23.52%
12	H+3	18,163	21,908	20.62%
13	H+4	20,485	22,821	11.40%
14	H+5	22,873	21,917	-4.18%
15	H+6	22,765	22,829	0.28%
16	H+7	18,883	24,827	31.48%
<b>TOTAL Arus Balik</b>		<b>133,129</b>	<b>151,784</b>	<b>14.01%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>		<b>298,445</b>	<b>322,796</b>	<b>8.16%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

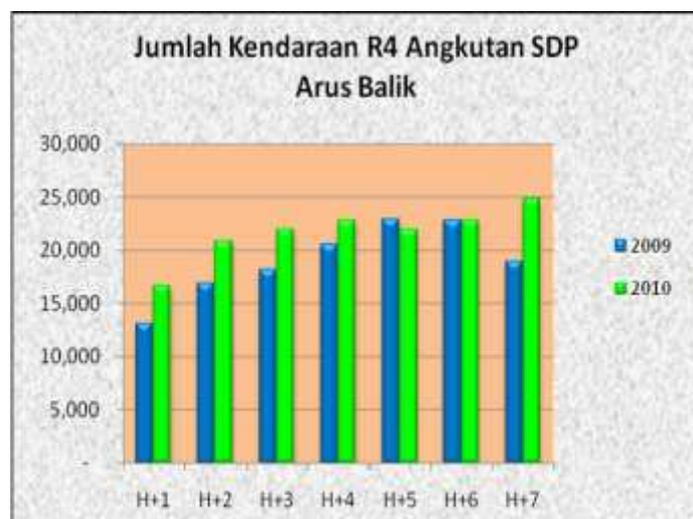
Grafik 5a.

Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Empat SDP pada Arus Mudik



Grafik 5b.

Perbandingan Jumlah Kendaraan Roda Empat SDP pada Arus Balik



#### 4. Penumpang Moda Angkutan Kereta Api

Penumpang moda angkutan kereta api, pada periode H-7 s/d H+7, berdasarkan data yang diperoleh terjadi penurunan total jumlah penumpang sebesar 1,59 % dari 2.431.948 penumpang pada tahun 2009 menjadi 2.393.277 penumpang pada tahun 2010.

Sesuai dengan data realisasi penumpang moda angkutan Kereta Api pada tahun 2010, puncak arus mudik terjadi pada H2 (11 September 2010) dengan jumlah 178.700 penumpang. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+2 (13 September 2010) dengan jumlah 212.594 penumpang.

Tabel 6.  
Realisasi Penumpang Moda Angkutan Kereta Api  
di 9 Daops (Pulau Jawa) dan 3 Divre

HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
	2009	2010	
Arus Mudik			
H-7	106,461	101,018	-5.11%
H-6	96,455	105,276	9.15%
H-5	94,762	112,022	18.21%
H-4	112,348	128,570	14.44%
H-3	145,351	135,504	-6.77%
H-2	163,747	155,693	-4.92%
H-1	141,498	119,806	-15.33%
H1	131,467	128,725	-2.09%
H2	174,920	178,700	2.16%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>1,167,009</b>	<b>1,165,314</b>	<b>-0.15%</b>
Arus Balik			
H+1	169,529	192,897	13.78%
H+2	184,474	212,594	15.24%
H+3	171,799	192,271	11.92%
H+4	176,626	186,088	5.36%
H+5	187,075	167,360	-10.54%
H+6	182,677	172,821	-5.40%
H+7	192,759	103,932	-46.08%
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>1,264,939</b>	<b>1,227,963</b>	<b>-2.92%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>2,431,948</b>	<b>2,393,277</b>	<b>-1.59%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 6a.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan KA pada Arus Mudik



Grafik 6b.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan KA pada Arus Balik



##### 5. Penumpang Moda Angkutan Laut

Penumpang Moda angkutan laut, pada periode H-7 s/d H+7, terdata dengan jumlah total 409.429 penumpang, data ini terpantau pada 52 Pelabuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan jumlah penumpang pada moda angkutan laut yang sangat signifikan sebesar 43,00 % dikarenakan adanya indikasi kurang sinkronnya jadwal cuti bersama dengan jadwal keberangkatan kapal di pelabuhan, selain itu pendeknya masa cuti bersama jika dibandingkan dengan tahun 2009 juga mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan moda angkutan laut.

Sesuai dengan data realisasi penumpang moda angkutan laut pada tahun 2010, puncak arus mudik terjadi pada H-2 (8 September 2010) dengan jumlah 50.395 penumpang. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+2 (13 September 2010) dengan jumlah 32.505 penumpang.

Tabel 7.

Realisasi Penumpang Moda Angkutan Laut di 52 Pelabuhan

HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
	2009	2010	
<b>Arus Mudik</b>			
H-7	32,041	34,352	7.21%
H-6	39,647	28,580	-27.91%
H-5	45,949	34,358	-25.23%
H-4	48,079	32,181	-33.07%
H-3	47,029	25,635	-45.49%
H-2	59,858	50,395	-15.81%
H-1	46,061	33,321	-27.66%
H1	31,046	12,981	-58.19%
H2	33,997	26,739	-21.35%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>383,707</b>	<b>278,542</b>	<b>-27.41%</b>
<b>Arus Balik</b>			
H+1	50,251	14,886	-70.38%
H+2	36,347	32,505	-10.57%
H+3	47,456	10,781	-77.28%
H+4	46,904	20,864	-55.52%
H+5	64,928	25,417	-60.85%
H+6	50,015	22,768	-54.48%
H+7	38,699	3,666	-90.53%
<b>Total Arus Balik</b>	<b>334,600</b>	<b>130,887</b>	<b>-60.88%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>718,307</b>	<b>409,429</b>	<b>-43.00%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 7a.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Arus Mudik



Grafik 7b.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Arus Balik



#### 6. Penumpang Moda Angkutan Udara

Penumpang moda angkutan udara, selama periode H-7 s/d H+7 total jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 15,52 % jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya pada tahun 2009, dari 2.163.731 penumpang menjadi 2.499.468 penumpang pada tahun 2010.

Sesuai dengan data realisasi penumpang moda angkutan udara pada tahun 2010, puncak arus mudik terjadi pada H-6 (4 September 2010) dengan jumlah 266,899 penumpang. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+5 (16 September 2010) dengan jumlah 172.389 penumpang.

TABEL 8.

Realisasi Penumpang Moda Angkutan Udara di 11 Bandar penerbangan Domestik dan 1 Bandara Penerbangan Internasional

HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
	2009	2010	
Arus Mudik			
H-7	120,607	136,476	13.16%
H-6	117,897	266,899	126.38%
H-5	118,688	137,658	15.98%
H-4	136,065	136,072	0.01%
H-3	148,045	160,730	8.57%
H-2	158,629	181,184	14.22%
H-1	154,429	165,673	7.28%
H1	150,113	146,150	-2.64%
H2	138,810	139,099	0.21%
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>1,243,283</b>	<b>1,469,941</b>	<b>18.23%</b>

HARI	JUMLAH PENUMPANG		%
	2009	2010	
Arus Balik			
H+1	110,358	144,914	31.31%
H+2	130,680	164,244	25.68%
H+3	128,099	162,118	26.56%
H+4	134,043	166,974	24.57%
H+5	150,168	172,389	14.80%
H+6	154,091	166,702	8.18%
H+7	113,009	52,186	-53.82%
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>920,448</b>	<b>1,029,527</b>	<b>11.85%</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>2,163,731</b>	<b>2,499,468</b>	<b>15.52%</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

Grafik 8a.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Udara pada Arus Mudik



Grafik 8b.

Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Udara pada Arus Balik



## 7. Data Volume Arus Lalu Lintas

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa volume lalu lintas kendaraan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 15 % dan mobil pribadi selama pemantauan Angkutan Lebaran dari H-7 sampai dengan H+7 di 6 (enam) titik terjadi peningkatan sebesar 18 %.

Gambar 1.

Peta Lokasi Pemantauan Arus Lalu Lintas Angkutan Lebaran 1431 H



Tabel 9.

## TOTAL SEPEDA MOTOR DI 6 TITIK PEMANTAUAN DARI H-7 SD. H+7

PERIODE	CIASEM	SADANG	MERAK	RAJAMANDALA	CIKONENG	TJ. PURA	TOTAL PER HARI
<b>Arus Mudik</b>							
H-7	15,552	17,116	3,334	5,652	16,783	47,686	58,437
H-6	32,258	18,101	5,882	15,532	21,004	30,332	92,777
H-5	77,871	14,279	7,484	17,646	19,176	15,805	136,456
H-4	64,883	19,670	5,822	9,817	21,272	20,550	121,464
H-3	104,254	17,979	17,678	19,562	24,694	23,922	184,167
H-2	152,241	18,533	19,460	38,880	39,811	20,745	268,925
H-1	65,848	19,135	9,944	24,965	32,179	23,875	152,071
H1	54,723	17,553	3,507	15,416	25,171	12,068	116,370
H2	38,269	18,433	7,178	28,585	33,690	9,258	126,155
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>605,899</b>	<b>160,799</b>	<b>80,289</b>	<b>176,055</b>	<b>233,780</b>	<b>204,241</b>	<b>1,256,822</b>
<b>Arus Balik</b>							
H+1	60,329	22,173	9,620	31,868	29,800	32,597	153,790
H+2	75,325	15,781	11,458	22,770	29,866	34,808	155,200
H+3	81,232	18,087	12,965	28,007	32,398	71,786	172,689
H+4	60,978	16,917	13,536	23,526	28,740	65,969	143,697
H+5	78,815	15,616	8,345	17,449	28,988	44,701	149,213
H+6	71,278	10,862	5,951	16,106	21,909	35,233	126,106
H+7	81,343	14,670	5,416	21,698	21,602	42,611	144,729
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>509,300</b>	<b>114,106</b>	<b>67,291</b>	<b>161,424</b>	<b>193,303</b>	<b>327,705</b>	<b>1,045,424</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>1,115,199</b>	<b>274,905</b>	<b>147,580</b>	<b>337,479</b>	<b>427,083</b>	<b>531,946</b>	<b>2,302,246</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

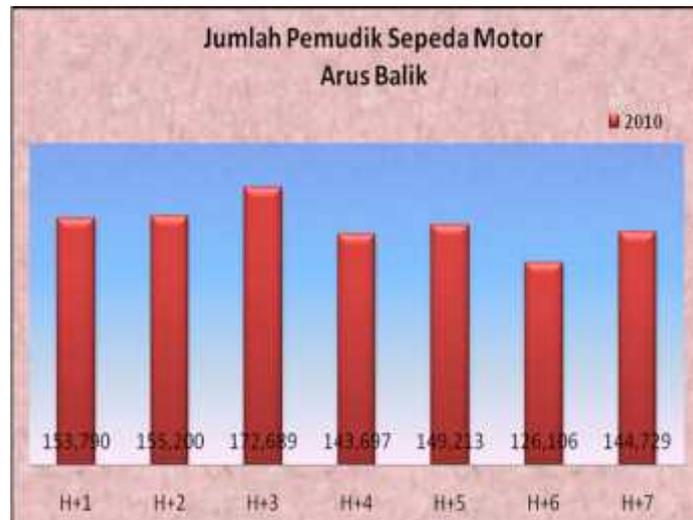
Grafik 9a.

Perbandingan Jumlah Pemudik Sepeda Motor pada Arus Mudik



Grafik 9a.

Perbandingan Jumlah Pemudik Sepeda Motor pada Arus Balik



Tabel 10.

TOTAL MOBIL PRIBADI DI 6 TITIK PEMANTAUAN DARI H-7 SD. H+7

PERIODE	CIASEM	SADANG	MERAK	RAJAMANDALA	CIKONENG	TJ. PURA	TOTAL PER HARI
<b>Arus Mudik</b>							
H-7	11,131	4,283	6,967	6,389	7,932	5,176	36,702
H-6	25,437	5,482	9,286	7,721	10,927	2,260	58,853
H-5	45,570	6,388	11,100	8,146	11,036	1,810	82,240
H-4	36,453	6,386	10,944	7,231	12,089	2,195	73,103
H-3	53,192	14,513	13,261	10,394	14,983	2,197	106,343
H-2	51,100	31,950	15,935	13,915	22,107	1,696	135,007
H-1	45,504	10,820	9,111	12,974	20,513	1,777	98,922
H1	38,240	13,471	5,847	12,382	19,499	1,500	89,439
H2	34,478	12,839	8,221	17,638	26,924	1,370	100,100
<b>TOTAL Arus Mudik</b>	<b>341,105</b>	<b>106,132</b>	<b>90,672</b>	<b>96,790</b>	<b>146,010</b>	<b>19,981</b>	<b>780,709</b>
<b>Arus Balik</b>							
H+1	30,836	11,685	10,335	23,190	25,489	3,123	101,535
H+2	71,852	10,824	11,658	16,918	27,747	2,648	138,999
H+3	47,381	7,985	13,867	17,053	21,938	2,966	108,224
H+4	44,505	7,060	11,894	11,792	22,610	2,698	97,861
H+5	63,168	7,497	11,318	13,450	18,657	2,552	114,090
H+6	60,095	5,762	11,367	10,306	14,232	2,038	101,762
H+7	50,589	5,095	11,916	14,629	15,072	2,701	97,301
<b>TOTAL Arus Balik</b>	<b>368,426</b>	<b>55,908</b>	<b>82,355</b>	<b>107,338</b>	<b>145,745</b>	<b>18,726</b>	<b>759,772</b>
<b>Jumlah TOTAL</b>	<b>709,531</b>	<b>162,040</b>	<b>173,027</b>	<b>204,128</b>	<b>291,755</b>	<b>38,707</b>	<b>1,540,481</b>

Sumber : Posko Angkutan Lebaran, 2010

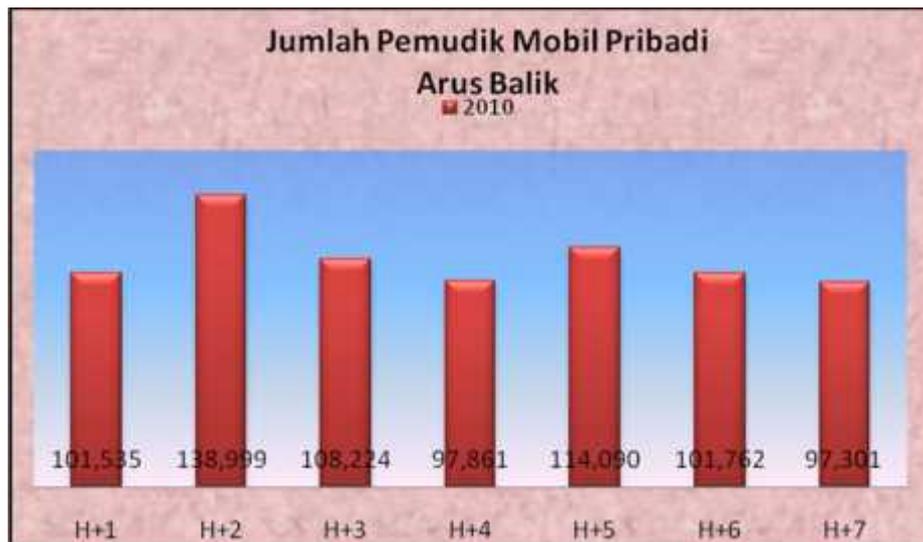
Grafik 10a.

Perbandingan Jumlah Pemudik Mobil Pribadi pada Arus Mudik



Grafik 10b.

Perbandingan Jumlah Pemudik Mobil Pribadi pada Arus Balik



#### 8. Mudik Gratis

Selama Angkutan Lebaran Periode 2010 untuk H-7 sampai dengan H+7 terdapat 17 (tujuhbelas) perusahaan yang melaksanakan program mudik gratis dengan total kendaraan 1.683 bus dengan total jumlah penumpang sebesar 91.907 orang.

#### 9. Pemantauan Tarif Angkutan

Selama arus mudik dan arus balik telah dilakukan pemantauan tarif di 19 titik terminal yaitu Polugadung, Rawamangun, Tanjung Priok, Bekasi, Lebak Bulus, Tangerang, Kalideres, Grogol, Kp. Rambutan, Bandung, Tasikmalaya, Purwokerto, Pekalongan, Cirebon, Tegal, Solo, Jogja, Merak dan Lampung. Disamping itu juga

dilakukan pemantauan tarif secara dinamis yaitu pemantauan dengan mengikuti di dalam kendaraan pada trayek-trayek di luar wilayah JABODETABEK.

Berdasarkan hasil pemantauan tarif dari H-7 sampai dengan H+7 periode angkutan lebaran 2010 yang telah diterima terdapat 29 Perusahaan yang melakukan pelanggaran tarif batas atas dan batas bawah yang tidak sesuai dengan KM. No. 1 Tahun 2009 dengan 73 kasus pelanggaran, hingga saat ini tidak ditemukan penelantaran penumpang oleh perusahaan otobis. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 pada periode yang sama ditemukan 97 kasus pelanggaran tarif dan setelah dilakukan klarifikasi yang terbukti melanggar berjumlah 32 kasus.

Saat ini terhadap laporan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum pada periode Angkutan Lebaran 2010 sedang dilakukan inventarisasi baik yang berasal dari instansi terkait, petugas lapangan maupun masyarakat untuk dapat diproses lebih lanjut. Penjatuhan sanksi terhadap perusahaan angkutan yang terbukti melakukan pelanggaran tarif akan diberikan sanksi setelah dilakukan klarifikasi kebenarannya dan direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2010.

#### 10. Kecelakaan (Sumber POLRI 2010)

Berdasarkan hasil pemantauan di Polda se Indonesia dari H-7 sampai dengan H+7 terdapat 1519 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 342 jiwa, korban luka berat sebanyak 461 orang dan luka ringan sebanyak 938 orang. Total kerugian materiil diperkirakan ± sebesar Rp. 6 Milyar.

Berdasarkan hasil pemantauan di 8 Polda Prioritas dari H-7 sampai dengan H+7 terdapat 706 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 154 jiwa, korban luka berat sebanyak 227 orang dan luka ringan sebanyak 527 orang. Total kerugian materiil diperkirakan ± sebesar Rp. 2.5 Milyar.

---

Jakarta, 19 September 2010

## B. LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI REALISASI DATA PENUMPANG ANGKUTAN NATAL TAHUN 2010 DAN TAHUN BARU TAHUN 2011 BIDANG ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 adalah kegiatan rutin tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai bentuk monitoring dari Hari Raya Besar dan Libur Nasional dimana tingkat arus lalu lintas akan menjadi meningkat.

Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya angkutan darat baik angkutan jalan maupun penyeberangan, maka perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui kondisi lapangan. Sehingga apabila terjadi lonjakan permintaan angkutan, terjadi kemacetan lalu lintas, ataupun hal – hal lain yang dapat mengganggu tingkat keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat segera diketahui dan dicari alternatif pemecahannya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.3747/KP.801/DRJD/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP. 004/62/15/DRJD/2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Jadwal Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Maksud dari penyusunan laporan Akhir Penyelenggaraan Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 adalah untuk mengetahui tingkat permintaan jasa angkutan di Subsektor Perhubungan Darat baik Angkutan Jalan maupun Angkutan Penyeberangan, mengetahui kondisi lalu lintas dan angkutan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dilapangan.

Adapun tujuan dilakukan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan dan penyempurnaan

langkah – langkah dalam hal pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan pada periode Natal dan Tahun Baru yang akan datang.

Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan 3 Januari 2011 dengan titik berat pemantauan Angkutan Jalan di Pulau Jawa, Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali, Maluku (Ambon), Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. (Sumber : Renops Angkutan Natal 2010 dan tahun Baru 2011)

Sedangkan untuk Angkutan Penyeberangan, pemantauan direncanakan dilaksanakan di 11 (sebelas) Lintas Penyeberangan di 10 (sepuluh) Provinsi, dan 3 (tiga) Lintas Penyeberangan Utama, yaitu : Merak - Bakauheni , Ketapang – Gilimanuk dan Padangbai – Lembar. (Sumber : Renops Angkutan Natal 2010 dan tahun Baru 2011).

## 2. PREDIKSI ANGKUTAN NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011

### a. Prediksi Jumlah Penumpang Angkutan Jalan

Prediksi Jumlah Penumpang Moda Angkutan Jalan pada Tahun 2010 diperkirakan naik 7,62% dibanding Tahun 2009 yaitu dari 2.358.495 penumpang menjadi 2.538.274 penumpang



Sumber : Renops Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

b. Prediksi Jumlah Penumpang Angkutan Jalan

Prediksi Jumlah Penumpang Moda Angkutan ASDP Tahun 2010 diperkirakan naik 5% dibanding Tahun 2009, yaitu dari 3.141.399 penumpang menjadi 3.298.469 penumpang dan untuk Kendaraan R4 diperkirakan naik 5% dari tahun 2009, yaitu : 192.621 kendaraan R4 menjadi 202.252 kendaraan R4 pada tahun 2010.

Tahun	Penumpang	Kend. R-4
Natal 2008 & Tahun Baru 2009	3.595.998	214.284
Natal 2009 & Tahun Baru 2010	3.141.399	192.621
Prosentase pertumbuhan	5%	5%
Prediksi Natal 2010 & Tahun Baru 2011	3.298.469	202.252
Kapasitas Terpasang	3.523.488	444.432

Sumber : Renops Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

3. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 sebagai berikut :

Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Perihal Monitoring Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, untuk melakukan :

- a. Pendataan Jumlah Penumpang dan Jumlah Bus di Terminal dan Lokasi Wisata;
- b. Pendataan Jumlah Penumpang / Barang dan Kendaraan serta Jumlah Kapal di Pelabuhan Penyeberangan;
- c. Pemantauan Kondisi Lalu Lintas di Jalan dan Penyeberangan;

b. Koordinasi dengan instansi lain

Untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan lalu lintas serta penurunan tingkat pelayanan jalan lainnya pada daerah atau tempat-tempat rawan kemacetan dan tempat-tempat pariwisata dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pada lokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. Pantai Carita, Anyer (Cilegon – Banten)
- b. Taman Safari (Bogor)
- c. Pantai Pelabuhan Ratu (Sukabumi)
- d. Pantai Pangandaran (Ciamis)
- e. Pantai Pasir Putih (Lampung)

- f. Batu Raden (Purwokerto)
- g. Borobudur (Magelang)
- h. Prambanan (Djogyakarta)

c. Angkutan Jalan

Pemantauan lalu lintas dan angkutan jalan pada tempat – tempat yang dipergunakan sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang (terminal) guna menunjang pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 ini, direncanakan dilakukan di beberapa terminal di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumatera Utara : Terminal Amplas Medan
2. Lampung : Terminal Rajabasa
3. DKI Jakarta : Terminal Pulo Gadung, Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kali Deres
4. Jawa Tengah : Terminal Tegal, Terboyo, Tirtonadi Solo dan Purwokerto
5. D.I. Yogyakarta : Terminal Giwangan
6. Jawa Timur : Terminal Purabaya, Terminal Bungurasih,
7. Bali : Terminal Ubung

Untuk memantau kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah-daerah yang memiliki potensi kegiatan Natal dan Tahun Baru relatif tinggi, telah dibuka hubungan komunikasi radio dan atau telepon untuk memantau kondisi lapangan dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan pada beberapa provinsi, yaitu : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.

d. Angkutan Penyeberangan

Dalam menunjang operasional angkutan penyeberangan selama pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, pemantauan direncanakan dilakukan di 11 (sebelas) Lintas Penyeberangan di 10 (sepuluh) Provinsi, dan 3 (tiga) Lintas Penyeberangan Utama, yaitu : Merak - Bakauheni , Ketapang – Gilimanuk dan Padangbai – Lembar.

Sarana yang tersedia guna menunjang pelayanan jasa transportasi angkutan penyeberangan di pelabuhan Merak – Bakauheni terdiri dari dua jenis kapal penyeberangan yaitu Kapal Cepat dan Kapal Ro – Ro

Sedangkan sarana yang tersedia guna menunjang pelayanan jasa transportasi angkutan penyeberangan dipelabuhan lainnya hanya dilayani oleh satu jenis kapal penyeberangan yaitu Kapal Ro – Ro.

e. Kesiapan Sarana

Kesiapan Sarana pada Moda Angkutan Darat pada Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 adalah sebagai berikut:

NO	MODA	2009	2010
1.	ANGKUTAN JALAN	34.358 Bus	34.395 Bus
2.	ANGKUTAN ASDP	97 Kapal	101 Kapal

Sumber : Renops Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

f. Sistem Informasi dan Komunikasi

1) Untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi diperlengkapi dengan Fasilitas Sistem Informasi dan Komunikasi, yang terdiri atas :

- a) Pembentukan Posko Pemantauan dan Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Ruang Server Road Transport and Traffic Management Centre (RTTMC) Lantai VIII Gedung Karya Kementerian Perhubungan mulai hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 pukul 08.00 WIB terus menerus (termasuk hari besar/libur) sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Januari 2010 pukul 08.00 WIB.
- b) Posko menggunakan peralatan: radio trunking, handy-talky, handphone, telepon / faximile.

2) Pemantauan Statis melalui CCTV:

- a) Pemantauan CCTV sebanyak 22 lokasi di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yaitu :  
Padalarang, Kadipaten, Patrol, Nagrek, Cileunyi, perlintasan KA Sumpiuh dan Karanganyar, Losari, Comal, Pertigaan Ciamis, Pintu Tol Merak, Terminal Terpadu Merak, Pintu Tol Cikampek, Simpang Jomin, JT Balonggandu, Pasar Tegal Gubug Arjawinangun, JT Losarang, JT Tanjung, Sadang, JT Gentong, JT Kulwaru, Simpang Pejagan.
- b) Pemantauan CCTV sebanyak 7 lokasi diruas jalan tol, yaitu: Tol Cikopo, Tol Dawuan, Tol Cileunyi, Tol Ciawi, Tol Padalarang, Tol Kanci dan Pintu Tol Sadang.

- c) Pemantauan CCTV sebanyak 6 Lokasi di moda Angkutan Penyeberangan, yaitu:  
Merak/Bakauheuni, Ujung/Kamal & Ketapang/Gilimanuk.
- 3) Pemasangan Variable Message Sign (VMS) di Jalur Pantura dan Jalur Selatan:  
(Pintu Tol Cikopo, Jembatan Timbang Balonggandu, Jembatan Timbang Losarang, Jembatan Timbang Tanjung, Pintu Tol Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Pertigaan Ciamis, Jembatan Timbang Kulwaru, Jembatan Timbang Gentong).
- 4) Penggunaan Global Positioning System (GPS)  
Sebanyak 170 Unit pada 14 (empat belas) perusahaan AKAP untuk memantau kondisi lalu lintas di Sumatera, Jawa - Bali dan di jaringan jalan Tol, antara lain :  
Tol Padaleunyi, Tol Cikampek dan Tol Bandara Soetta.
- 5) Sistem informasi dan komunikasi juga dilakukan melalui internet dengan alamat Website:  
<http://www.hubdat.web.id> atau <http://www.hubdat-rttmc.web.id>  
dan melalui SMS dengan nomor : 0813 8006 8000

#### 4. REALISASI ANGKUTAN NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011

##### a. REALISASI PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

Data yang berhasil dihimpun oleh petugas Monitoring Angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 selama periode 23 Desember 2010 sampai dengan 3 Januari 2011 menunjukkan hasil bahwa untuk beberapa terminal utama di pulau Jawa rata-rata terjadi penurunan keberangkatan dan kedatangan bus dan penumpang jika dibanding dengan tahun 200, hal ini disebabkan :

- a. Kemungkinan masyarakat memanfaatkan hari libur ke beberapa daerah wisata di pulau Jawa;
- b. Kemungkinan menggunakan moda transportasi selain moda darat.

Ketidaksesuaian jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang kemungkinan disebabkan karena masih adanya keterlambatan kepulangan dengan adanya pengambilan cuti khususnya berkaitan dengan Perayaan Natal bagi yang merayakan dan juga penghimpunan data yang kurang lengkap dikarenakan pelaksanaan monitoring pada masing- masing daerah yang tidak bersamaan pelaksanaannya sehingga data yang diperoleh merupakan gambaran secara global.

Data dari 3 (tiga) terminal utama di DKI Jakarta diperoleh bahwa penurunan jumlah penumpang (kedatangan) yang signifikan terjadi di terminal Pulo Gadung sebesar 34,56% dari tahun 2009 sebesar 100.362 penumpang menjadi 65.676 penumpang di tahun 2010. Secara kuantitatif jumlah bus cukup tersedia dan tidak terjadi lonjakan permintaan jasa angkutan yang berarti, bahkan cenderung normal dan masih dapat tercukupi dengan armada yang tersedia. Dari pemantauan yang dilakukan di sejumlah terminal utama di DKI Jakarta, diperoleh data sebagaimana Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Rekapitulasi Total Kedatangan Bus Dan Penumpang Terminal pada Periode Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011

NO	Terminal	Tahun 2009		Tahun 2010		% Naik / Turun	
		Bus	Pnp	Bus	Pnp	Bus	Pnp
1	Kalideres	5,667	32,323	4,895	32,938	-13.62%	1.90%
2	Pulogadung	3,465	100,362	2,956	65,676	-14.69%	-34.56%
3	Kp. Rambutan	6,684	102,712	5,413	95,102	-19.02%	-7.41%

Sumber : Tim Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

Data dari 3 (tiga) terminal utama di DKI Jakarta diperoleh bahwa penurunan jumlah penumpang (keberangkatan) yang signifikan terjadi di terminal Kp. Rambutan sebesar 29,25% dari tahun 2009 sebesar 84.559 penumpang menjadi 59.826 penumpang di tahun 2010. Dari pemantauan yang dilakukan di sejumlah terminal utama di DKI Jakarta, diperoleh data sebagaimana Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2 : Rekapitulasi Total Keberangkatan Bus Dan Penumpang Terminal pada Periode Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011

NO	Terminal	Tahun 2009		Tahun 2010		% Naik / Turun	
		Bus	Pnp	Bus	Pnp	Bus	Pnp
1	Kalideres	4,944	31,476	4,490	28,485	-9.18%	-9.50%
2	Pulogadung	2,377	31,526	1,969	24,692	-17.16%	-21.68%
3	Kp. Rambutan	6,185	84,559	5,542	59,826	-10.40%	-29.25%

Sumber : Tim Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

Secara total keberangkatan dan kedatangan penumpang di 3 (tiga) terminal utama di DKI Jakarta hampir seluruhnya mengalami penurunan jumlah penumpang dengan rata-rata 17,49%, dengan rincian :

- a. Penurunan jumlah penumpang pada terminal Pulogadung sebesar 31,48% (pada tahun 2009 sebanyak 131.888 penumpang menjadi 90.368 penumpang pada tahun 2010).
- b. Penurunan jumlah penumpang pada terminal Kalideres sebesar 3,72% (pada tahun 2009 sebanyak 63.799 penumpang menjadi 61.423 penumpang pada tahun 2010).
- c. Penurunan jumlah penumpang pada terminal Kp. Rambutan sebesar 17,27% (pada tahun 2009 sebanyak 187.271 penumpang menjadi 154.928 penumpang pada tahun 2010).

Secara total keberangkatan dan kedatangan bus di 3 (tiga) terminal utama di DKI Jakarta hampir seluruhnya mengalami penurunan jumlah operasional bus dengan rata-rata 14,04%, dengan rincian :

- a. Penurunan operasional bus yang terjadi pada terminal Pulogadung sebesar 15,70% (pada tahun 2009 sebanyak 5.842 bus menjadi 4.925 bus pada tahun 2010).
- b. Penurunan operasional bus yang terjadi pada terminal Kp.Rambutan sebesar 14,87% (pada tahun 2009 sebanyak 12.869 bus menjadi 10.955 bus pada tahun 2010).
- c. Penurunan operasional bus yang terjadi pada terminal Kalideres sebesar 11,55% (pada tahun 2009 sebanyak 10.611 bus menjadi 9.835 bus pada tahun 2010).

Secara umum dampak dari penurunan operasional bus di 3 (tiga) terminal utama tidak mempengaruhi penyelenggaraan angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 seiring dengan menurunnya jumlah penumpang (demand) bus untuk melakukan perjalanan selama angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011. Penurunan operasional bus juga tidak berdampak pada penumpukan penumpang di beberapa terminal baik terminal asal/tujuan maupun terminal transit/singgah. Secara detail fluktuasi total jumlah penumpang dan bus selama penyelenggaraan angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 sebagai berikut :

Tabel 3 : Rekapitulasi Total Keberangkatan dan Kedatangan Bus Dan Penumpang Terminal pada Periode Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011

NO	Terminal	Tahun 2009		Tahun 2010		% Naik / Turun	
		Bus	Pnp	Bus	Pnp	Bus	Pnp
1	Kalideres	10,611	63,799	9,385	61,423	-11.55%	-3.72%
2	Pulogadung	5,842	131,888	4,925	90,368	-15.70%	-31.48%
3	Kp. Rambutan	12,869	187,271	10,955	154,928	-14.87%	-17.27%
TOTAL		29,322	382,958	25,265	306,719		
RATA-RATA						-14.04%	-17.49%

Sumber : Tim Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat

Catatan : Perbandingan tahun 2009 – 2010 menggunakan periode yang sama (11 hari), dimana pada tahun 2009 dilakukan monitoring selama 11 hari dan tahun 2010 dilakukan monitoring selama 12 hari, sehingga data pada tanggal 3 Januari 2011 tidak digunakan.

#### b. REALISASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pelaksanaan Posko Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 untuk moda penyeberangan dipusatkan pada 2 (dua) lintasan utama. Untuk mengetahui jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan penyeberangan, pengendara kendaraan roda dua dan roda empat berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan mulai tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan 3 Januari 2011. Kondisi fluktuasi pengguna jasa penyeberangan (lintas : Merak-Bakauheni dan Gilimanuk-Ketapang) selama periode angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 sebagai berikut :

- a. Prosentase kendaraan R2 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10% (pada tahun 2009 sebanyak 53.516 kendaraan R2 menjadi 59.500 kendaraan R2 pada tahun 2010);
- b. Prosentase kendaraan R4 mengalami penurunan rata-rata sebesar 2% (pada tahun 2009 sebanyak 84.819 kendaraan R4 menjadi 81.616 kendaraan R4 pada tahun 2010);
- c. Prosentase penumpang mengalami penurunan rata-rata sebesar 2% (pada tahun 2009 sebanyak 1.096.198 penumpang menjadi 1.043.174 penumpang pada tahun 2010);

Secara detail kondisi fluktuasi jumlah kendaraan dan penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan selama angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 sebagai berikut :

Tabel 4 : Total Angkutan Penyeberangan di 2 (dua) Lintasan Utama Pada Angkutan Natal 2009 Dan Tahun Baru 2010

No	Pelabuhan	Tahun 2009			Tahun 2010			Prosentase		
		R2	R4	PNP	R2	R4	PNP	R2	R4	PNP
1	Pelabuhan Merak	12,682	27,335	355,082	11,660	24,251	315,160	-8%	-11%	-11%
2	Pelabuhan Bakauheni	9,897	25,564	331,733	10,997	23,031	284,936	11%	-10%	-14%
3	Pelabuhan Ketapang	12,812	16,405	184,257	15,361	17,813	227,284	20%	9%	23%
4	Pelabuhan Gilimanuk	18,125	15,515	225,126	21,482	16,521	215,794	19%	6%	-4%
<b>TOTAL</b>		<b>53,516</b>	<b>84,819</b>	<b>1,096,198</b>	<b>59,500</b>	<b>81,616</b>	<b>1,043,174</b>			
<b>RATA-RATA</b>								10%	-2%	-2%

Sumber : Tim Monitoring Posko Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat.

#### c. KEJADIAN KECELAKAAN

Kecelakaan lalu lintas selama penyelenggaraan angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011 sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kronologis Kecelakaan	Keterangan
1	Kamis 23 Desember 2010	terjadi kecelakaan di tol Cipularang Km 92 arah Jakarta antara mobil trailer dengan Honda Freed, tidak menimbulkan korban jiwa dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat.	Sumber : RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
2	Jum'at 24 Desember 2010	terjadi kecelakaan di ruas tol Cikampek Km 07 yang melibatkan 3 kendaraan, Xenia B 1302 KN, Taxi B 2474 FU dan Honda Jazz. Belum bisa dipastikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
3	Selasa 28 Desember 2010	Terjadi 2 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 1 orang dan luka ringan 1 orang di daerah Kabupaten Mojokerto	Sumber : Radio Sonora
4	Rabu 29 Desember 2010	terjadi kecelakaan tunggal Bus Mayasari dengan Nopol B 7384 XA di depan Gedung DPR, untuk korban jiwa masih belum diketahui.	Sumber : TMC Polda Metro
5	Sabtu 1 Januari 2010	pukul 11.17 WIB di ruas jalan tol Cipularang KM 104 + 400, sebuah mobil mini bus terbalik sehingga menyebabkan kemacetan.	Sumber : TMC Polda Metro
6		pukul 12.30 WIB di ruas jalan tol Jagorawi arah Bogor, terjadi arus lalu lintas terpantau tersendat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar.	Sumber : Radio Sonora
7		pukul 13.12 WIB 3 (tiga) kendaraan tertabrak Kereta Api jurusan Jakarta – Surabaya di perlintasan KA Kec. Baureno Bojonegoro Jawa Timur.	Sumber : Radio Elshinta

No	Hari/Tanggal	Kronologis Kecelakaan	Keterangan
8	Minggu 2 Januari 2010	Pukul 13.45 WIB, terjadi kecelakaan tunggal di KM 78/200 arah Jakarta ke Bandung. Mobil Avanza dengan plat B 1875 FFE selip lalu keluar jalur dan menabrak pohon menyebabkan kendaraan terbalik. Insiden ini menimbulkan dua korban yang sudah di bawa ke rumah sakit di Purwakarta.	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
9		Pada Pukul 15.30 di ruas jalan Pantura Situbondo terjadi kecelakaan antara sepeda motor dan Pick Up Korban meninggal 3 Orang.	Sumber : Radio Elshinta
10		Pada pukul 16.00 di lumajang terjadi kecelakaan antara motor dan mobil minibus korban luka 2 orang dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat	Sumber : Radio Elshinta
11		pukul 16.00 WIB di ruas jalan tol Merak Jakarta KM 250, sebuah mobil mini bus (Kijang) mengalami kecelakaan tunggal sehingga menyebabkan kemacetan Korban luka 3 orang.	Sumber : Radio Elshinta

Sumber : Tim Monitoring Posko Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat (diolah dari berbagai sumber)

#### d. KONDISI LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Berdasarkan pemantauan kamera CCTV yang terpasang di 22 titik di jalur Pantura dan jalur Selatan dan beberapa pemantauan dari sumber lain, diketahui bahwa kondisi arus lalu lintas secara keseluruhan terlihat normal, lancar dan terkendali. Namun terjadi kepadatan pada waktu-waktu dan lokasi-lokasi tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Kejadian	Sumber
1	Jumat 24 Desember 2010	Kondisi lalu lintas arah Puncak, Bogor mengalami kemacetan satu arah sejak siang sepanjang lebih dari 3 Km.	Radio Elshinta
2		Pelabuhan PT.Indonesia Ferry (Persero) mengalami kepadatan kendaraan barang dan kendaraan penumpang pada CCTV Merak - Menara A	Melalui pantauan CCTV
3	Rabu 29 Desember 2010	Di jalur Pantura khususnya Pejagan arah Semarang sampai pukul pada pukul 01.00 wib terpantau padat dan didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan bus.	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
4	Kamis 30 Desember 2010	Di daerah Losarang lalu lintas ramai dan agak sedikit tersendat dikarenakan ada peningkatan volume kendaraan pada pukul 00.00 WIB.	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
5	Jumat 31 Desember 2010	Jalur puncak pada pukul 15.00 sudah mengalami kepadatan dan antrian kendaraan. Kendaraan yang melintasi kawasan puncak hanya bisa bergerak merayap. (sumber : Republika)	Radio Elshinta

No	Hari/Tanggal	Kejadian	Sumber
6		Terjadi antrian penumpang di loket pembelian tiket Pelabuhan Merak pada pukul 17.00 WIB.	Melalui pantauan CCTV
7		Jalur puncak pada pukul 18.30 WIB mengalami kepadatan dan antrian kendaraan.	Republika
8		Puncak terisolir pada pukul 21.30 WIB, lalu lintas dari arah Ciawi dan Cianjur sudah ditutup.	www.detik.com
9		Pada pukul 07.00 WIB di Cileunyi, Nagrek, Patrol, Tegal Gubug dan Pintu Tol Merak tampak mulai terjadi kenaikan arus lalu lintas dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya, yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2	Melalui pantauan CCTV
10	Sabtu 1 Januari 2010	Terjadi antrian kendaraan sepanjang kurang lebih 2 KM pada pintu tol Paster menuju Bandung sejak pukul 09:00 WIB (Sumber TMC Polda Metro dan pantauan CCTV jasamarga).	TMC Polda Metro dan pantauan CCTV jasamarga
11		Pukul 14:37 WIB arus lalu lintas di kawasan Cipanas, Puncak menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang diperkirakan mencapai puluhan kilometer.	www.detik.com
12		Pukul 18.30 WIB terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan pada beberapa titik, antara lain yang terpantau pada titik Padalarang menuju Bandung, titik Cileunyi baik menuju sumedang maupun arah sebaliknya menuju tol Purbaleunyi dan pada titik pantauan Tol Padalarang, di keempat arahnya.	Melalui pantauan CCTV
13		Pada pukul 23.30 WIB, lalu lintas di Puncak mengalami kepadatan yang sangat tinggi di dua arah dan pada pukul 00.00 WIB, jalan menuju Puncak ditutup serta diberlakukan satu arah menuju Jakarta.	www.detik.com
14	Minggu 2 Januari 2010	Pada pukul 07.00 WIB di Cileunyi, Padalarang, Nagrek dan Pejagan tampak mulai terjadi kenaikan arus lalu lintas dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya, yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2.	Melalui pantauan CCTV
15		Pukul 08.30 Terjadi antrian / kepadatan kendaraan di jalur puncak arah ciawi menerapkan one way (satu arah), arah ciawi menuju puncak ditutup dan baru dibuka kembali pukul 11.00.	Radio Sonora
16		Antrian kendaraan pada Gerbang tol Padalarang menuju Jakarta sejak pukul 16:00 WIB Kemacetan mencapai 10 Km hal yang sama juga terjadi di Gerbang Tol Pasteur dari Pasir Kaliki tercatat 11.388 kendaraan meninggalkan bandung (Detik.com).	www.detik.com
17		Pukul 17:30 WIB arus lalu lintas dari kawasan Cipanas, Puncak menuju Bogor mengalami kondisi padat merayap cukup panjang diperkirakan mencapai belasan kilometer, jalan dibuka menjadi satu arah menuju arah Bogor, Kendaraan sebaliknya arah bogor puncak diberhentikan di pertigaan Gadog (Sumber Elshinta News and Talk)	Radio Elshinta News and Talk

No	Hari/Tanggal	Kejadian	Sumber
18		Pada pukul 23.00 terjadi peningkatan antrian penumpang pada Loket Penumpang di Pelabuhan Merak, sehingga dibuka 1 (satu) loket tambahan untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat
19		Pada pukul 07.00 (tanggal 3 Januari 2010) WIB dari pantauan di beberapa titik CCTV seperti di Cileunyi, PT Sadang, Padalarang, tampak mulai terjadi kenaikan arus lalu lintas dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya, sedang kondisi arus lalu lintas pada Simpang Jomin padat merayap	RTTMC – Ditjen Perhubungan Darat

Sumber : Tim Monitoring Posko Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 Ditjendat (diolah dari berbagai sumber)

#### 5. PERMASALAHAN ANGKUTAN NATAL 2010 DAN TAHUN BARU 2011

Data yang diperoleh selama pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 menunjukkan bahwa tidak terjadi lonjakan penumpang yang berarti baik untuk terminal – terminal utama maupun di pelabuhan – pelabuhan penyeberangan yang dilakukan monitoring, tidak terjadi kekurangan armada angkutan, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Monitoring Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, diantaranya :

1. Masih terjadi kemacetan di beberapa daerah tujuan wisata.
2. Masih terjadi kecelakaan selama pemantauan angkutan natal 2010 dan tahun baru 2011.

#### 6. SARAN TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan angkutan natal dan tahun baru di masa mendatang, diperlukan beberapa rencana aksi baik yang bersifat koordinatif maupun teknis, antara lain :

1. Peningkatan koordinasi antar instansi dan stakeholder/operator/BUMN baik yang bersifat rencana dan implementasi;
2. Peningkatan implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas ( antara lain : pengaturan lalu lintas pada titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan serta peningkatan kapasitas ruang lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan lalu lintas).

LAMPIRAN II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	1) Jumlah lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi jalan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyedia fasilitas pengawasan muatan angkutan barang, dan penanganan lokasi rawan kecelakaan	22 lokasi (Sumut, Sumbar, Riau, Jabar, Jateng, Kaltim dan Kalsel)	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan keselamatan dan kelancaran
	2) Jumlah fasilitas unit pengujian kendaraan bermotor, peralatan pendukung kendaraan ramah lingkungan, dan fasilitas penunjang keselamatan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi jalan	8 lokasi (Riau, Bengkulu, Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulbar dan Maluku)	
b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip – prinsip good-governance	3) jumlah rancangan, telaah, penetapan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.	6 Peraturan (Perencanaan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Terminal Penumpang, Perencanaan Teknis Terminal Angkutan Barang, Perencanaan Teknis dan Standarisasi Tipikal Terminal Tipe A Asal Tujuan dan Tipe A Transit, Manajemen Rekayasa Ruas Segmen Cikampek-Cirebon – Tahap III, Manajemen Rekayasa Ruas Segmen Cileunyi-Tasikmalaya – Tahap III, Manajemen Rekayasa Ruas Jl. Slamet Riyadi Surakarta)	
	4) Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan manajemen yang dikeluarkan	- Pembekalan teknis kepala terminal jumlah 67 - PPNS jumlah 2.367 - Jumlah penguji seluru Indonesia 1.984	Mengukur kinerja pembinaan SDM bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	5) Paket jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan	- Rakornis bidang LLAJ Regional Kalimantan - Pembekalan teknis kepala terminal	Mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semiloka Perlengkapan Jalan di Ambon</li> <li>- CCTV, RTTMC, VMS, GPS, Smart Card Terminal</li> <li>- Pengadaan kendaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	mendukung peningkatan kinerja kelembagaan bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	6) Jumlah sarana prasarana keperintisan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang menjangkau kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan pedesaan	Bus perintis 37 unit Rute Keperintisan : Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samarinda – Bongan</li> <li>- Samarinda - Muara muntai</li> <li>- Samarinda - Muara Aloh</li> </ul> Poso – Napu Sulawesi Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poso – Napu</li> <li>- Tentena – Gintu</li> <li>- Kolonedale – Matano</li> <li>- Palu – Buol</li> </ul> Jambi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terminal Alam Barojo – Sungai Bahar (Tanjung Lebar)</li> <li>- Bangko - Pamenang - Jelatan – TTKDA</li> <li>- Jambi – Petaling</li> <li>- Bangko – Tanah Garau</li> <li>- Bangko – Air Jernih</li> </ul> Sulawesi Tenggara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendari – Bnua</li> <li>- Kendari – Lamonae</li> <li>- Kendari – Sumber Sari</li> <li>- Kendari – Mawasangka</li> <li>- Kendari – Tondasi</li> <li>- Kendari – Bungku</li> </ul>	Mengukur kinerja kegiatan-kegiatan keperintisan dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan
d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan	7) Jumlah lokasi simpul/terminal transportasi jalan yang siap operasi	13 lokasi (Terminal Tipe A : NAD, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulbar, Jatim, Sulsel (3), Jateng; Terminal Tipe B : Sumsel dan Sulsel)	Mengukur kinerja kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan simpul-simpul transportasi jalan dalam rangka menunjang peningkatan

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
rakyat			kapasitas pelayanan jasa transportasi jalan
	8) Tingkat penyediaan sarana transportasi jalan	- Bus Perintis 37 unit - Bus AKAP 20.802 unit - Bus Pariwisata 11.933 unit - Pengangkut alat berat 1.005 unit - Pengangkut B3 4.299 unit	Mengukur kinerja kegiatan pengadaan sarana transportasi jalan dalam menambah kapasitas pelayanan jasa transportasi jalan
	9) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sistem operasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan	- Pembuatan database angkutan AKAP, Pariwisata - Pembuatan database terminal penumpang tipe A - Pembuatan database jembatan timbang	Mengukur kinerja kegiatan-kegiatan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi yang menunjang pengoperasian sarana dan prasarana transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

## B. DIRERKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional	1) Jumlah Lokasi peningkatan fungsi prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan melalui peningkatan fungsi alur pelayaran sungai dan danau, penyediaan SBNP di lintas penyeberangan dan penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan pelayaran di pelabuhan	1. Pengerukan pelabuhan sungai Rumbang Prov.Kalteng 2. 5 lokasi SBNP (Merak, Soumlaki, Ilwaki, Wahai, Larat)	
	2) Jumlah fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan untuk meningkatkan fungsi sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan		
b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi	3) jumlah rancangan, telaah, penetapan peraturan perundang-undangan di	3. Penyiapan bahan perumusan pembentukan OPP 4. Penyiapan bahan perumusan Pedoman Teknis	

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
(kelembagaan, SDM, dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip – prinsip good-governance	bidang transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.	Pengaturan Alur Pelayaran Sungai. 5. Penyiapan bahan perumusan Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau.	
	4) Jumlah sertifikat kompetensi teknis dan manajemen yang dikeluarkan		
	5) Paket jumlah kegiatan dan penyediaan fasilitas pendukung kelembagaan		
c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai	6) Jumlah sarana prasarana keperintisan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan yang menjangkau kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan pedesaan	99 Lintas Perintis	
d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	7) Jumlah lokasi simpul/pelabuhan/dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang siap operasi	1. 21 lokasi pelabuhan penyeberangan 2. 8 lokasi pelabuhan sungai	
	8) Tingkat penyediaan sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan	1. 1 unit kapal penyeberangan 2. 4 unit bus air	
	9) Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sistem operasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan		

### C. DIRERKTORAT KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
a. Meningkatnya kebijakan keselamatan	1) jumlah rancangan, telaah, penetapan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Pedoman Teknis Database Awak Kapal Sungai dan Danau.</li> <li>2. Penyusunan Konsep Pedoman Teknis Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Sungai dan Danau.</li> <li>3. Pedoman Penyusunan Rencana Umum Keselamatan Transportasi Jalan Bagi Daerah.</li> <li>4. Kajian Teknis Penetapan Batas Kecepatan Maksimum dan Minimum.</li> <li>5. Kajian Teknis Penerapan Dampak Keselamatan Lalu Lintas (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan).</li> <li>6. Kajian Teknis Inspeksi Keselamatan Jalan (Road Safety Inspection).</li> <li>7. Penyusunan Pedoman Teknis Pendidikan Sertifikasi Instruktur Lembaga Mengemudi dan Instruktur Lembaga Pendidikan Pengemudi Angkutan.</li> <li>8. Penyusunan Pedoman Pengemudi yang Berkeselamatan.</li> </ol>	Mengukur kinerja pelaksanaan fungsi regulator dalam menyediakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi di bidang keselamatan transportasi jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.
b. Meningkatkan disiplin masyarakat dalam rangka penyelenggaraan keselamatan.	2) Jumlah penurunan pelanggaran masyarakat dalam berdisiplin berlalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagai Sosialisasi Keselamatan melalui Media Cetak yang bertujuan untuk mensosialisasikan program keselamatan transportasi. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat dan para Stakeholder.</li> <li>2. Berbagai sosialisasi Keselamatan melalui Media Elektronik (TV dan radio) yang bertujuan untuk mensosialisasikan program keselamatan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat seluruh Indonesia.</li> <li>3. Monitoring Angkutan Lebaran yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan</li> </ol>	Mengukur kinerja pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas jalan dalam rangka peningkatan keselamatan dan penurunan pelanggaran masyarakat.

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
		<p>kesiapan sarana dan prasarana lalu lintas yang mendukung keselamatan masyarakat khususnya yang sedang melakukan perjalanan mudik selama masa angkutan lebaran. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah masyarakat yang sedang mudik lebaran. Selain itu, dipantau juga perilaku pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Hal ini dilakukan karena penyebab utama dari kecelakaan adalah dikarenakan factor manusia.</p> <p>4. Workshop Manajemen Kampanye Keselamatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan arahan dan panduan khususnya kepada daerah yang akan melakukan kegiatan sosialisasi keselamatan jalan di daerahnya. Hal ini dilakukan agar sosialisasi yang dilakukan lebih mengena pada sasaran, efektif dan terarah. Sasaran yang dituju dalam kegiatan ini adalah para Stakeholder yang terkait di daerah.</p> <p>5. Berbagai Program Aksi bagi pengemudi angkutan umum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengemudi angkutan umum untuk menciptakan safer user dan mampu meningkatkan disiplin pengguna jalan.</p> <p>6. Pemilihan Pelajar Pelopor yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat khususnya pelajar dalam bidang keselamatan jalan, sehingga dengan peran serta pelajar di dalam aspek keselamatan akan mampu meningkatkan kualitas dari keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.</p>	
c. Meningkatnya partisipasi masyarakat, swasta dan	3) Jumlah kabupaten/kota yang telah berpartisipasi di bidang keselamatan	1. Monitoring Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di daerah	Mengukur tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
<p>instansi terkait dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan.</p>	<p>transportasi darat</p>	<p>bertujuan meningkatkan kompetensi kemampuan investigator kecelakaan lalu lintas jalan serta menumbuhkan kembangkan kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan agar dapat memberikan usulan perbaikan sebagai upaya preventif pencegahan kecelakaan lalu lintas supaya tidak terulang kembali kecelakaan serupa. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan Pelatihan Ivestigasi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di 4 daerah, yaitu DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Bangka Belitung.</p> <p>2. Pelatihan Audit Keselamatan Jalan yang mempunyai tujuan memberikan pengenalan kepada peserta tentang ruang lingkup audit keselamatan jalan, tata cara pelaksanaan audit serta teori pendukung yang relevan. Sasaran yang dituju adalah pejabat atau pegawai dinas perhubungan atau LLAJ di daerah. Provinsi yang sudah diadakan Pelatihan Audit Keselamatan Jalan pada tahun 2010 adalah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.</p> <p>3. Inspeksi Keselamatan Sarana Dan Prasarana Angkutan Penyeberangan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana angkutan penyeberangan sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas keselamatan. Kegiatan inspeksi sarana dan prasarana angkutan penyeberangan pada tahun 2010 sudah dilakukan di empat provinsi, yaitu: Kota Palangkaraya dan Propinsi Kalimantan Tengah;</p>	<p>bidang keselamatan jalan.</p>

Sasaran	Uraian Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan Pemilihan
		4. Pelatihan Penelitian Kecelakaan Alur Pelayaran Asdp yang mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani kecelakaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, memberikan pemahaman dan pelatihan pelaksanaan penelitian kecelakaan alur pelayaran sungai dan danau sehingga peserta memiliki kompetensi yang memadai. Provinsi yang sudah diadakan Pelatihan pada tahun 2010 adalah Jambi dan Kalimantan Selatan.	
d. Meningkatkan jumlah prasarana keselamatan	4) Jumlah lokasi penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)/LRK	<p>1. Berbagai kegiatan investigasi berkaitan dengan DED DRK baik di lalu lintas jalan ataupun di alur pelayaran ASDP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas.</p> <p>2. Pengadaan Helm Anak Telah dilakukan Pengadaan dan pembagian helm sebanyak 3.750 unit helm yang berguna untuk menunjang keselamatan berkendara dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi.</p> <p>3. Perbaikan LRK Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas jalan. Perbaikan ini sangat penting dalam rangka menurunkan resiko terjadinya kecelakaan di lokasi tersebut. Pada tahun 2010 ada dua Provinsi yang telah dilakukan perbaikan, yaitu Bali dan Nusa Tenggara Barat.</p>	

LAMPIRAN III  
LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA TAHUN ANGGARAN 2010

1. PAGU ANGGARAN

a. Total DIPA TA.2010 sebesar Rp. 1.838.442.619.000,-

• Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp.	1.833.442.619.000,-	( 99,73 % )
PNBP	: Rp.	0,-	( 0,00 % )
PLN	: Rp.	5.000.000.000,-	( 0,27 % )

• Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	34.928.554 .000,-	( 1,90 % )
Belanja Barang	: Rp.	299.258.536.000,-	( 16,28 % )
Belanja Modal	: Rp.	1.499.255.529.000,-	( 81,82 % )

2. Jumlah Kantor di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat: 82 UPT/Satker terdiri dari :

- a. Program LLAJ : 40 Satker
- b. Program LLASDP : 37 Satker
- c. Kantor Pusat & UPT : 5 Kantor

### 3. Kegiatan-kegiatan Pokok yang dilaksanakan Ditjen Perhubungan Darat

#### a. BIDANG LLAJ

1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (termasuk Manajemen Rekayasa Lalu Lintas) di 32 (tiga puluh dua) Propinsi dengan dana sebesar Rp. 382,29 Miliar.
2. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 11 (sebelas) Propinsi dengan Pagu sebesar Rp. 9,41 Miliar.
3. Pembangunan Terminal Penumpang di 15 (lima belas) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 93,54 Miliar.
4. Pengadaan Bus sebanyak 128 unit dengan Pagu sebesar Rp. 67,95 Milyar
5. Pengadaan dan Pemasangan Converter Kit dengan Pagu sebesar Rp. 4,75 Milyar
6. Subsidi Operasi Bus Perintis di 22 (dua puluh dua) Propinsi pada 145 lintas dengan Pagu sebesar Rp. 48,23 Miliar.
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan Pagu sebesar Rp. 32,39 Miliar.
8. Studi Kebijakan Transportasi Darat dengan Pagu sebesar Rp. 31,92 Miliar.

b. BIDANG LLASDP

1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru pada 9 (sembilan) lokasi pada 9 (sembilan) Propinsi dengan Pagu sebesar Rp. 49,77 Miliar.
2. Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lanjutan sebanyak sebanyak 47 (empat puluh) lokasi pada 30 (tiga puluh) Propinsi dengan total Pagu sebesar Rp. 471,39 Miliar.
3. Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan sebanyak 9 (sembilan) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 40,30 Miliar.
4. Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan sebanyak 1 (satu) dengan Pagu sebesar Rp. 4,15 Miliar.
5. Pembangunan Kapal Baru sebanyak 5 (lima) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 17,5 Miliar.
6. Pembangunan Bus Air Baru sebanyak 4 (empat) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 10 Miliar.
7. Pembangunan Kapal Lanjutan sebanyak 14 (empat belas) Unit dengan Pagu sebesar Rp. 228,93 Miliar.
8. Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan sebanyak 5 (lima) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 6,55 Miliar.
9. Rehabilitasi Dermaga Danau sebanyak 5 (lima) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 12,91 Miliar.
10. Pengadaan/Pemasangan SBNP sebanyak 6 (enam) unit dengan Pagu sebesar Rp, 2,7 Miliar.
11. Pembangunan Break Water pada 4 (empat) lokasi dengan Pagu sebesar Rp. 70,96 Miliar.
12. Subsidi 49 (empat puluh sembilan) Kapal Angkutan Penyeberangan Perintis pada 111 Lintas Penyeberangan Perintis dengan Pagu sebesar Rp.140,23 Miliar.

#### 4. Pelaksanaan/Penyerapan Anggaran Tahun 2010 posisi 31 Desember 2010

Realisasi penyerapan DIPA (Revisi) TA.2010 posisi per 31 Desember 2010, Keuangan = Rp. 1.702.537.074.723,- (92,61 %) ; Fisik = 97.82%, terdiri dari :

- Rincian per Sumber Dana :

RM : Rp. 1.701.773.132.323,- ( 92,57 %)

PLN : Rp. 763.942.400,- (15,28 %)

- Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai : Rp. 28.533.047.094,- ( 81.69 % )

Belanja Barang : Rp. 266.010.035.105,- ( 88.,89 %)

Belanja Modal : Rp. 1.407.993.992.524 ,- ( 93.60 % )

#### 5. Jumlah Paket Kontrak Strategis :

a. Total Kontrak : 222 Paket

b. Sudah Kontrak : 215 Paket

c. Belum Kontrak : 7 Paket, terdiri dari :

- tanda bintang = 4 paket

- PHLN = 1 paket

- Kegiatan tidak dilaksanakan = 2 paket

Terdiri dari :

1. Kegiatan bertanda bintang 4 paket antara lain :

- a. Kegiatan Pembangunan Gedung Khusus, 1 Paket;
- b. Pembangunan Jembatan terminal Cekik di Bali, 1 Paket;
- c. Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB, 2 Paket.

2. Kegiatan PHLN 1 Paket yaitu TA.IBRD Road Safety Awareness 4843/INO-srip pada Satker Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat.

3. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan 2 paket yaitu Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Sapeken Tahap I, 1 Paket ; Pembangunan Shelter di Jabodetabek, 1 Paket.

#### 6. Dana Tidak Terserap TA. 2010

a. Total Pagu	:	Rp.	1.838.442.619.094,-
b. Realisasi	:	Rp.	1.702.537.075.000,-
c. Sisa Dana Tidak Terserap	:	Rp.	135.905.544.000,-

SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	DANA TIDAK TERSERAP	PROSENTASE PENYERAPAN
RUPIAH MURNI				
BELANJA PEGAWAI	34,928,554,090	28,533,047,000	6,395,507,000	81.69
BELANA BARANG	299,258,536,000	266,010,035,000	33,248,501,000	88.89
BELANJA MODAL	1,499,255,529,000	1,407,230,050,000	92,025,479,000	93.86
PLN				
BELANJA MODAL	5,000,000,000	763,943,000	4,236,057,000	15.28
TOTAL	1,838,442,619,090	1,702,537,075,000	135,905,544,000	92.61

RINCIAN TABEL DI ATAS SBB :

A. BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 6.395.507.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Belanja Transito Satker Kantor Pusat Ditjen Phb. Darat	1.769.145.000	Kelebihan Alokasi Dana
2.	Sisa Gaji Pegawai dan Lembur	4.626.362.000	Kelebihan Alokasi Dana

B. BELANJA BARANG SEBESAR RP. 33.248.501.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Satker Pengembangan Keperintisan Sisa Kontrak Subsidi Perintis SDP	16.160.614.000	
2.	Sisa Kontrak Subsidi Keperintisan LLAJ	2.064.567.000	
2.	Pakaian Dinas Pegawai	81.600.000	Dana Non Alokasi (Diblokir)
3.	Diklat Teknis Bekasi	150.000.000	Dana Non Alokasi (Diblokir)
4.	Sisa Dana Kegiatan (82 UPT/Satker)		
	- Belanja Barang Operasional	5.155.433.000	
	- Belanja Barang Non Operasional	500.000.000	
	- Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.800.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan	500.000.000	
	- Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.436.287.000	
	- Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.400.000.000	

C. BELANJA MODAL SEBESAR RP. 96.261.536.000,-

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
1.	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Sepeken Kab Sumenep Thp I	4.000.000.000	Adanya penolakan masyarakat setempat untuk melaksanakan pembangunan dermaga tsb
2.	Pembangunan Shelter di Jabodetabek	1.000.000.000	Belum ada kesepakatan dengan Dishub DKI Jakarta
3.	TA. IBRD Road Safety Awareness 3843/INO SRIP (BLN)	4.236.057.000	Lelang Ulang
4.	Pembangunan Gedung Khusus sebesar	5.000.000.000	IMB belum ada
5.	Pemb. Jembatan Terminal Cekik di Bali	3.000.000.000	Diblokir dikarenakan administrasi penghapusan Jembatan Timbang yang lama belum dapat dipenuhi
6.	Pemasangan Alat PKB untuk Propinsi NAD dan Kalteng	1.707.000.000	Diblokir dikarenakan ketidaksiapan data dukung
7.	Pembangunan Gedung Operasional di 5 Lokasi (Sulut, Sultra, Sulsel, NTT dan Kalabahi)	1.703.016.000	Diblokir dikarenakan sertifikat tanah/IMB belum ada
8.	Pengadaan Alat Laboratorium	476.800.000	Tidak disetujui pencairannya oleh DJA disebabkan tidak sesuai dengan Tupoksi
9.	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda - 2	28.000.000	Dana Non Alokasi (Diblokir)
10.	Studi LLASDP	100.000.000	Dana Non Alokasi (Diblokir)
11.	Sisa Kontrak Strategis Belanja Modal	46.678.681.000	

NO	SATKER/KEGIATAN	ALOKASI DANA	ALASAN TIDAK DILAKSANAKAN
12.	Sisa Kontrak Kegiatan Non Strategis -Studi	13.849.003.000 3.051.082.000	
13.	Selisih Nilai Kontrak dengan Realisasi akibat tidak terpenuhinya progress fisik - Pemb. Dermaga Labuhan Tahap I ( Fisik 44,89% ). - Rehab Dermaga Saubeba ( Fisik 20 % ) - Pemb. Terminal ALBN Entrop ( Fisik 0,05% )	2.227.993.000 1.586.413.000 7.617.461.000	Tidak terpenuhi karena gangguan alam, dan kondisi di lapangan. Tidak terpenuhi akibat bencana gempa. Akibat permasalahan sengketa tanah.